



Badan Pusat Statistik

LAPORAN KINERJA

Deputi Bidang Statistik Sosial

2025

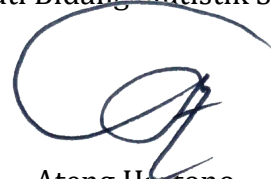
KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Deputy Bidang Statistik Sosial Badan Pusat Statistik disusun sebagai perwujudan kewajiban dalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan program dan kegiatan oleh Deputy Bidang Statistik Sosial secara periodik. Penyusunan laporan dilaksanakan sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Deputy Bidang Statistik Sosial bertujuan untuk memberikan gambaran capaian kinerja yang mencerminkan hasil (*outcome*) serta prestasi kerja Deputy dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi. Pada tahun 2025, rata-rata capaian kinerja indikator kinerja Deputy Bidang Statistik Sosial tercatat sebesar 108,25 persen. Berdasarkan skala penilaian yang digunakan sebagai acuan, capaian tersebut menunjukkan bahwa kinerja Deputy Bidang Statistik Sosial berada pada kategori **sangat baik**.

Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi aktif dalam penyusunan, sampai terbitnya laporan ini. Semua kritik dan saran yang bersifat konstruktif sangat kami terima untuk penyempurnaan laporan dimasa mendatang. Semoga laporan ini dapat menjadi masukan bagi para pemangku kepentingan dalam mengevaluasi perencanaan manajemen dan mendorong peningkatan kinerja di masa mendatang.

Jakarta, Januari 2026
Deputy Bidang Statistik Sosial



Ateng Hartono
NIP. 19690109 199211 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi Unit Kerja/Satuan Kerja.....	2
1.3. Sumber Daya Manusia (SDM) dan Dukungan Anggaran	2
1.4. Potensi dan Permasalahan	5
1.5. Sistematika Penyajian Laporan	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA	10
2.1 Visi dan Misi BPS.....	10
2.2 Target Kinerja Deputi Bidang Statistik Sosial 2025 - 2029	17
2.3 Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Statistik Sosial 2025	19
2.4 Dukungan BPS Terhadap Prioritas Nasional, Prioritas Presiden, dan Isu Strategis Nasional Tahun 2025	20
2.5 Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2025.....	24
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	27
3.1 Realisasi, Capaian Kinerja, dan Nilai Penilaian Kinerja Organisasi Tahun 2025	27
3.2 Capaian Kinerja Deputi Bidang Statistik Sosial Terhadap Target Rencana Strategis (Renstra)	46

3.3	Capaian Prioritas Nasional dan Prioritas Presiden, dan Isu Strategis Nasional Tahun 2025	49
3.4	Prestasi dan Inovasi Deputi Bidang Statistik Sosial Tahun 2025.....	69
3.5	Realisasi dan Efisiensi Anggaran	75
BAB IV PENUTUP		79
4.1	Kesimpulan.....	79
4.2	Rekomendasi Perbaikan Kinerja.....	80
LAMPIRAN.....		90

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Deputi Bidang Statistik Sosial.....	18
Tabel 2. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Deputi Bidang Statistik Sosial	19
Tabel 3. Anggaran pada Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Statistik Sosial 2025	20
Tabel 4. Besaran Anggaran yang dapat Digunakan Menurut Kegiatan	26
Tabel 5. Nilai NKO, Predikat PKO dan Interpretasi PKO.....	29
Tabel 6. Nilai dan Predikat PKO Deputi Bidang Statistik Sosial Tahun 2025.....	30
Tabel 7. Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja per Sasaran.....	32
Tabel 8. Tingkat Pemanfaatan Data Statistik Sosial	34
Tabel 9. Capaian Kinerja Deputi Bidang Statistik Sosial Tahun 2025	46
Tabel 10. Realisasi dan Efisiensi Anggaran Deputi Bidang Statistik Sosial.....	75

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Persentase Sumber Daya Manusia Menurut Tingkat Pendidikan.....	3
Gambar 2 Persentase Pegawai Menurut Jenis Jabatan pada Deputi Bidang Statistik Sosial, Tahun 2025	4
Gambar 3. Capaian Kinerja Deputi Bidang Statistik Sosial Tahun 2023-2025	28
Gambar 4 Perbandingan Capaian Kinerja Deputi Bidang Statistik Sosial	30
Gambar 5 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin dan Miskin Ekstrem Indonesia, 2020-2025	60
Gambar 6. Penerimaan Piagam Penghargaan Pelaksanaan EPSS BPS pada Penilaian Statistik Berkualitas 2025 Unit Kerja Eselon II BPS Pusat	71
Gambar 7 Interface Web Infra Podes 2025	74

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Statistik Sosial 2025	90
Lampiran 2. Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2025.....	94
Lampiran 3. Jumlah Pegawai Menurut Golongan Kepangkatan Tahun 2025	94
Lampiran 4. Jumlah Pegawai Menurut Jabatan Tahun 2025	95
Lampiran 5. Daftar Dokumen Pemerintah yang Digunakan sebagai Dasar Hitung.....	96
Lampiran 6. Daftar K/L/Pemda Target Pembinaan Tahun 2025	99
Lampiran 7. Daftar Prestasi/Penghargaan Deputi Bidang Statistik Sosial Menurut Unit Kerja/Satuan Kerja Tahun 2025	100
Lampiran 8. Daftar Inovasi Deputi Bidang Statistik Sosial Menurut Unit Kerja/Satuan Kerja Tahun 2025	102
Lampiran 9. Alokasi Anggaran Belanja Unit Kerja TA 2025	105
Lampiran 10. Capaian Kinerja Unit Kerja TA 2025	109
Lampiran 11. Surat Hasil Penilaian SAKIP.....	110

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Tahun 2025 Deputy Bidang Statistik Sosial disusun sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan statistik sosial, sekaligus sebagai implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014. Laporan ini menyajikan gambaran komprehensif mengenai perencanaan kinerja, capaian kinerja, serta pengelolaan sumber daya dan anggaran selama tahun 2025 dalam mendukung perumusan kebijakan berbasis data, khususnya pada bidang kependudukan, kesejahteraan rakyat, dan ketahanan sosial.

Pada tahun 2025 Deputy Bidang Statistik Sosial menetapkan dua sasaran kegiatan dan dua indikator kinerja utama (IKU) beserta targetnya yang dituangkan pada Perjanjian Kinerja Deputy Bidang Statistik Sosial Tahun 2025. Adapun target, realisasi, dan capaian kinerja Deputy Bidang Statistik Sosial tahun 2025 yang dicapai untuk kedua IKU sebagai berikut:

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian Kinerja 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Peningkatan pemanfaatan data dan insight Statistik Sosial yang Berkualitas	IKU 1. Tingkat Pemanfaatan Data Statistik Sosial	81,31%	94,73%	116,50%
Terwujudnya Penyelenggaraan Statistik Sektoral Kementerian/Lembaga Mitra Bidang Statistik Sosial yang berkualitas	IKU 2. Persentase kenaikan rata-rata nilai IPS K/L Mitra Deputy Statistik Sosial dalam penyelenggaraan Statistik Sektoral	18,13%	18,13%	100%
Capaian Kinerja Deputy Bidang Statistik Sosial 2025				108,25%

Pada tahun 2025, capaian kinerja pada masing-masing IKU sudah sesuai target, bahkan capaian IKU 1 melebihi target yang ditetapkan, dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 108,25 persen. Capaian kinerja untuk IKU 1 dalam sasaran strategis pertama mencapai 116,50 persen sedangkan capaian kinerja untuk IKU 2 pada sasaran strategis kedua mencapai 100 persen. Ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan kegiatan yang dilakukan Deputy Bidang Statistik Sosial sangat berhasil melampaui

target indikator kinerja sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan baik dalam Renstra maupun Perjanjian Kinerja.

Pada penilaian SAKIP tahun 2025, Deputi Bidang Statistik Sosial memperoleh nilai sebesar 73,00 dengan predikat **Sangat Baik**. Dengan nilai PKO Deputi Bidang Statistik Sosial sebesar 94,50 dengan predikat **Baik**. Kinerja tersebut menunjukkan konsistensi dalam menjaga kualitas output statistik sosial di tengah berbagai tantangan, termasuk penyesuaian anggaran dan kompleksitas pelaksanaan kegiatan berskala nasional. Dari sisi kelembagaan, dukungan sumber daya manusia yang didominasi oleh pegawai berpendidikan tinggi serta penguasaan metodologi statistik dan teknologi informasi menjadi faktor penting dalam mendukung pencapaian kinerja tersebut.

Kegiatan Deputi Bidang Statistik Sosial Tahun 2025 dalam penyelenggaraan statistik bersumber pada APBN dengan pagu pada Perjanjian Kinerja sebesar Rp 43.300.323.000 yang terdistribusi pada Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan sebesar Rp 32.574.470.000,-, Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat sebesar Rp 3.713.679.000,-, dan Direktorat Ketahanan Sosial sebesar Rp 7.012.174.000,-. Dengan adanya efisiensi anggaran menyebabkan pagu yang dapat digunakan dilakukan penyesuaian dengan besaran masing-masing direktorat sebagai berikut:

- Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan sebesar Rp 5.111.551.000,- dengan realisasi Rp 4.519.159.868,- (88,41 persen);
- Direktorat Kesejahteraan Rakyat sebesar Rp 2.562.794.000,- dengan realisasi Rp 2.233.981.126,- (87,17 persen)
- Direktorat Statistik Ketahanan Sosial menjadi sebesar Rp.1.669.416.000,- dengan realisasi sebesar Rp1.412.265.949,- (84,60 persen).

Total pagu anggaran Deputi Bidang Statistik Sosial tahun 2025 mencapai Rp 9.343.761.000,-. Hingga akhir tahun 2025, realisasi anggaran tercatat sebesar Rp 8.165.406.943,- atau 87,39 persen dari total pagu anggaran yang telah ditetapkan.

Dengan rata-rata capaian kinerja yang persentasenya melebihi persentase realisasi anggaran maka dapat dikatakan Deputi Bidang Statistik Sosial yang diimplementasikan dalam kegiatan di masing-masing direktorat dibawahnya telah melakukan efisiensi anggaran.

Secara ringkas upaya efisiensi yang dilakukan unit kerja di Deputi Bidang Statistik Sosial tahun 2025 melalui ketiga direktorat yang ada dibawahnya sebagai berikut:

- a. Optimalisasi pemanfaatan teknologi melalui pelatihan, rapat, koordinasi, pembinaan statistik sektoral, dan sosialisasi yang dilaksanakan secara daring untuk menekan biaya operasional.
- b. Peningkatan efisiensi perjalanan dinas dengan pelaksanaan yang lebih selektif, penggunaan tiket dengan skema hemat biaya, serta pengaturan supervisi berbasis kebutuhan prioritas.
- c. Penguatan efisiensi penyelenggaraan pelatihan melalui pemanfaatan peserta cadangan dari daerah guna mengurangi kebutuhan instruktur pusat.
- d. Integrasi dan sinergi kegiatan, termasuk penggabungan agenda dan pelaksanaan rapat tanpa dukungan biaya transport lokal bagi peserta mitra.
- e. Optimalisasi penggunaan anggaran pertemuan melalui pemilihan paket meeting di bawah standar biaya serta pengelolaan jumlah peserta secara efektif tanpa mengurangi kualitas output.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Laporan Kinerja Pemerintah Deputy Bidang Statistik Sosial Tahun 2025 merupakan laporan yang berisi target, sasaran, dan realisasi terhadap tugas dan tanggung jawab Deputy Bidang Statistik Sosial periode tahun 2025. Penyusunan Laporan Kinerja Deputy Bidang Statistik Sosial 2025 disusun sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi atas penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) oleh Deputy Bidang Statistik Sosial ini.

Selanjutnya, penyusunan laporan kinerja merupakan amanat yang tercantum dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan kinerja tahunan merupakan ringkasan tentang keluaran dari kegiatan dan hasil yang dicapai dari program sebagaimana ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan APBN. Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi Deputy Bidang Statistik Sosial atas penggunaan anggaran.

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Deputy Bidang Statistik Sosial adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program/kegiatan dan pengelolaan anggaran dalam rangka mencapai sasaran/target yang telah ditetapkan. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah diwajibkan melaporkan pelaksanaan akuntabilitas kinerjanya sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan organisasi, dan menyampaikan laporan kinerja setiap tahun.

Adapun tujuan penyusunan laporan kinerja adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan sasaran Deputy Bidang Statistik Sosial selama tahun 2025. Penyusunan laporan kinerja merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban Deputy Bidang Statistik Sosial dalam rangka mewujudkan

pemerintahan yang baik yang ditandai dengan adanya transparansi, partisipasi serta akuntabilitas serta memberikan umpan balik dalam rangka penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan dan peningkatan kinerja Deputi Bidang Statistik Sosial.

1.2. Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi Unit Kerja/Satuan Kerja

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik, Deputi Bidang Statistik Sosial mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang statistik sosial. Dalam menjalankan tugas, Deputi Bidang Statistik Sosial menyelenggarakan fungsi, yaitu:

1. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan, pemberian bimbingan, dan pembinaan di bidang statistik kependudukan, kesejahteraan rakyat, dan ketahanan sosial;
2. Pengendalian terhadap kebijakan teknis di bidang statistik kependudukan, kesejahteraan rakyat, dan ketahanan sosial;
3. Pelaksanaan pengembangan statistik kependudukan, kesejahteraan rakyat, dan ketahanan sosial; dan
4. Pelaksanaan tugas sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala.

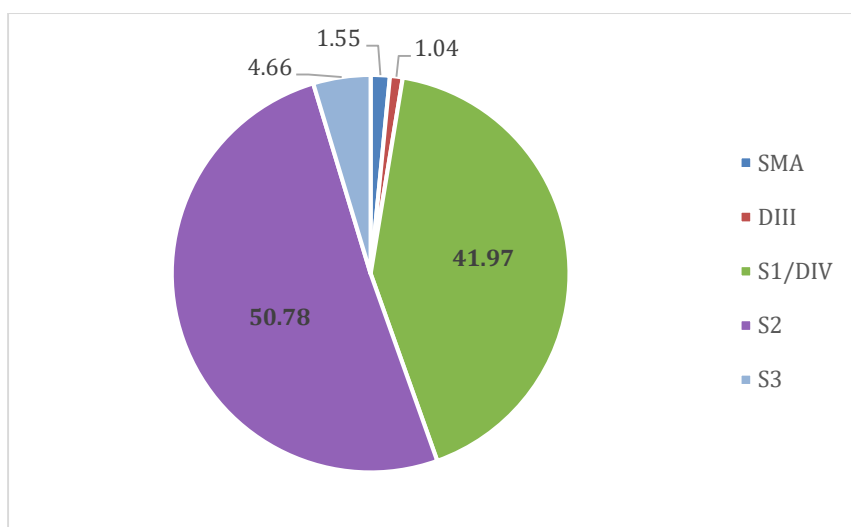
Adapun susunan Organisasi Deputi Bidang Statistik Sosial terdiri atas Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan; Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat; dan Direktorat Statistik Ketahanan Sosial, di mana masing-masing direktorat tersebut terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

1.3. Sumber Daya Manusia (SDM) dan Dukungan Anggaran

1.3.1. Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jabatan

Pada tahun 2025, jumlah SDM Deputi Bidang Statistik Sosial sebanyak 193 orang. Jika dilihat menurut pendidikan yang ditamatkan, yakni sebagai berikut: 9 orang (4,66 persen) berpendidikan S3; 98 orang (50,78 persen) berpendidikan S2; 81 orang (41,97 persen) berpendidikan S1/DIV; 2 orang (1,04 persen) berpendidikan DIII; dan

3 orang (1,55 persen) berpendidikan SMA. Komposisi ini menunjukkan bahwa struktur SDM didominasi oleh tenaga profesional berpendidikan tinggi yang mencerminkan kuatnya kapasitas unit kerja Deputy Bidang Statistik Sosial dalam meningkatkan kapasitasnya dalam menyediakan data statistik sosial yang berkualitas serta mampu memberikan insight dalam pemanfaatan data. Secara keseluruhan, kondisi ini merupakan modal yang sangat positif untuk mendorong kinerja organisasi yang lebih inovatif, adaptif, dan berbasis pengetahuan dalam mendukung pencapaian tujuan strategis.



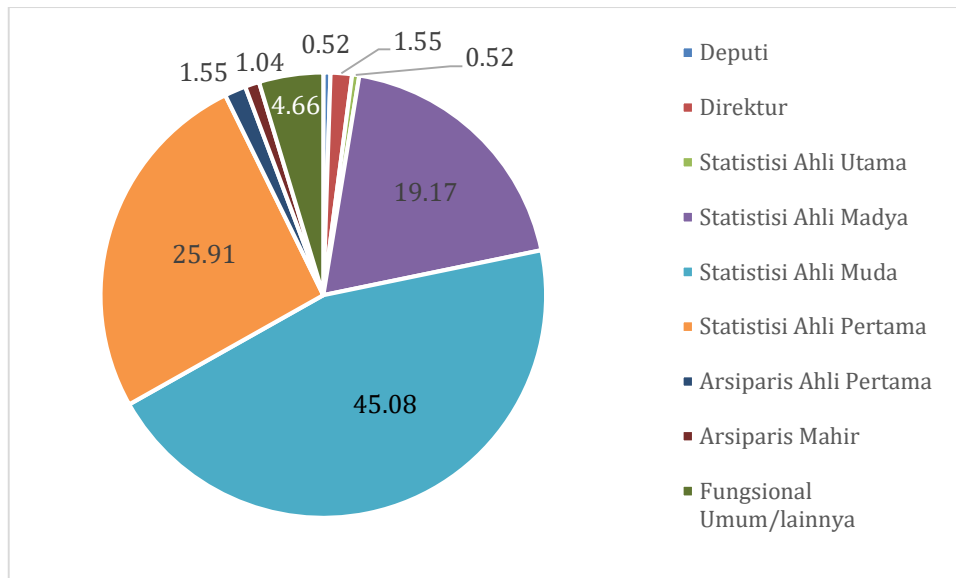
Gambar 1 Persentase Sumber Daya Manusia Menurut Tingkat Pendidikan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Pasal 7, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dikelompokkan menurut kebutuhan jumlah dan jenis jabatan yang terdiri dari: Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT), Jabatan Fungsional (JF), dan Jabatan Administrasi (JA). Komposisi pegawai di unit kerja Deputy Bidang Statistik Sosial adalah sebagai berikut:

- Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT): Terdapat 1 orang (0,52%) yang menduduki posisi pimpinan sebagai Deputy, dan 3 orang direktur (1,55%).
- Jabatan Fungsional (JF): Merupakan kelompok terbesar yang terdiri dari Statistisi Ahli Utama (0,52%), Statistisi Ahli Madya (19,17%), Statistisi Ahli Muda (45,08%), Statistisi Ahli Pertama (25,91%), Arsiparis Ahli Pertama (1,55%), Arsiparis Mahir (1,04%).

- Jabatan Administrasi (JA): 4,66% yang menjalankan tugas pada posisi fungsional umum/pelaksana/CPNS.

Rincian komposisi SDM berdasarkan jenis jabatan tersebut disajikan secara visual pada gambar berikut.



Gambar 2 Persentase Pegawai Menurut Jenis Jabatan pada Deputi Bidang Statistik Sosial, Tahun 2025

Komposisi jabatan fungsional ini didominasi oleh Statistisi Ahli Muda sebagai tenaga ahli di bidang statistik untuk menghadapi pekerjaan yang terus berkembang dan inovatif. Tenaga ahli di bidang administrasi juga sangat penting perannya dalam menunjang kegiatan teknis. Dari komposisi diatas, perlu penambahan tenaga administrasi karena pekerjaan administrasi sebagian besar masih ditangani oleh tim teknis.

1.3.2. Pagu Anggaran Tahun 2025

Dari sisi anggaran, guna mencapai kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2025, telah dialokasikan total anggaran (sebelum adanya penyesuaian) sebesar Rp 43.300.323.000,- yang dituangkan ke dalam 3 (tiga) program dengan rincian sebagai berikut:

1. Program Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan sebesar Rp 32.574.470.000,-

2. Program Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kesejahteraan Rakyat sebesar Rp 3.713.679.000,-
3. Program Penyediaan dan Pengembangan Statistik Ketahanan Sosial sebesar Rp 7.012.174.000,-

Dengan berjalannya waktu ada beberapa kegiatan yang tidak dilakukan karena adanya penyesuaian anggaran. Pada akhir tahun 2025, setelah adanya penyesuaian di lingkungan Deputi Bidang Statistik Sosial, sampai akhir triwulan IV 2025 pagu anggaran Deputi Bidang Statistik Sosial menjadi sebagai berikut:

1. Program Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan sebesar Rp 5.111.551.000,-
2. Program Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kesejahteraan Rakyat sebesar Rp Rp 2.562.794.000,-
3. Program Penyediaan dan Pengembangan Statistik Ketahanan Sosial sebesar Rp 1.669.416.000,-

Sampai dengan akhir triwulan IV 2025, realisasi penggunaan anggaran kegiatan Deputi Bidang Statistik Sosial adalah sebagai berikut:

1. Program Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan sebesar Rp 4.519.159.868,- (88,41 persen)
2. Program Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kesejahteraan Rakyat sebesar Rp 2.233.981.126 (87,17 persen)
3. Program Penyediaan dan Pengembangan Statistik Ketahanan Sosial sebesar Rp 1.412.265.949,- (84,60 persen)

1.4. Potensi dan Permasalahan

Deputi Bidang Statistik Sosial memiliki tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang statistik sosial. Dalam menjalankan tugasnya, berbagai kegiatan prioritas diselenggarakan Deputi Bidang Statistik Sosial guna menghasilkan berbagai data statistik sosial yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Kegiatan yang diselenggarakan Deputi Bidang Statistik Sosial mampu menghasilkan berbagai ukuran maupun indikator statistik sosial yang berkualitas, lengkap, mutakhir, dan terpercaya. Kelengkapan data statistik sosial selama ini telah

mampu memberikan andil penting dalam bidang perencanaan, *monitoring*, dan evaluasi pembangunan nasional. Selanjutnya, seiring dengan kemajuan teknologi informasi, Deputi Bidang Statistik Sosial juga memanfaatkan kemajuan teknologi dalam pengumpulan data. Dengan demikian, data dapat tersedia lebih cepat (*faster*), dapat diperoleh lebih mudah (*easier*), lebih berkualitas (*better*) dan lebih murah (*cheaper*).

Identifikasi potensi yang dimiliki oleh unit kerja Deputi Bidang Statistik Sosial dalam rangka menunjang pelaksanaan program kerja pemerintah, yaitu:

1. Kekuatan dan kapasitas SDM.

Didukung pegawai berpendidikan tinggi ($\pm 98,44\%$) dengan keahlian teknis, komposisi statistisi memadai, serta iklim kerja yang kondusif. Hal ini menjadi modal kuat dalam menjaga kualitas pelaksanaan survei, publikasi, kegiatan ad-hoc, serta peningkatan layanan data dan keberlanjutan kegiatan statistik strategis.

2. Penguatan kolaborasi nasional dan internasional.

Aktif membangun sinergi lintas Kementerian/Lembaga melalui integrasi data administrasi (termasuk inisiasi *Statistical Population Register* dan kerja sama dalam melaksanakan Pendataan Penduduk IKN), kolaborasi dengan lembaga internasional (UN, World Bank, UNICEF, WHO, dll.), serta partisipasi dalam berbagai forum global untuk peningkatan kapasitas, adopsi praktik terbaik, dan penguatan peran statistik sosial.

3. Pemanfaatan teknologi dan inovasi statistik.

Penggunaan CAPI, pengolahan data terintegrasi, dashboard monitoring-evaluasi, pemanfaatan Big Data, serta pengembangan web infra dan metode statistik baru (termasuk SAE untuk ECDI) menjadi potensi penting dalam meningkatkan efisiensi, ketepatan waktu, kualitas data, dan pengendalian mutu secara real time.

4. Ketersediaan data strategis nasional.

Pelaksanaan survei utama seperti Sakernas, SUPAS 2025, Susenas, dan Podes menjadi sumber data mutakhir untuk menggambarkan dinamika sosial ekonomi, kependudukan, ketenagakerjaan, kemiskinan, demokrasi, dan kesejahteraan. Data tersebut mendukung evaluasi pembangunan,

penyusunan proyeksi penduduk, RPJPN, SDGs, serta berbagai indikator strategis nasional.

5. Dukungan kuat terhadap kebutuhan pengguna data dan kebijakan.
Data Susenas dan indikator sosial ekonomi digunakan dalam penyusunan berbagai indeks nasional (IPA, IPHA, IPKA, gini ratio, kemiskinan, dll.), publikasi statistik tematik (anak, pemuda, lansia, perumahan, sosial budaya), serta mendukung penghitungan IKU K/L dan penyusunan kebijakan berbasis data.
6. Fleksibilitas dan kontribusi pada kegiatan strategis nasional.
Selain kegiatan rutin, direktorat juga berperan dalam berbagai kegiatan ad-hoc strategis seperti DTSEN, survei program nasional, verifikasi program sosial, penghitungan kemiskinan ekstrem, statistik kriminal, serta pengembangan indikator dan metodologi baru.
7. Budaya inovasi dan penguatan pengetahuan internal.
Didukung berbagai inisiatif pengembangan kapasitas, diseminasi pengetahuan, publikasi internal, forum ilmiah, serta kegiatan organisasi yang memperkuat budaya kolaboratif, produktivitas, dan inovasi berkelanjutan.

Deputi Bidang Statistik Sosial memiliki potensi yang strategis, namun juga menghadapi permasalahan maupun tantangan dalam pelaksanaan tugasnya. Permasalahan/tantangan tersebut sebagai berikut:

1. Tekanan pelaksanaan kegiatan statistik berskala besar.
Pelaksanaan beberapa kegiatan pendataan secara bersamaan (SUPAS, Sakernas, dan pendataan IKN) menimbulkan tantangan dalam pengaturan jadwal, alokasi petugas, koordinasi pusat-daerah, serta pengendalian kualitas, khususnya di wilayah dengan keterbatasan SDM dan kondisi operasional lapangan yang beragam.
2. Beban koordinasi, administrasi, dan keterbatasan sumber daya.
Tingginya kebutuhan koordinasi lintas pusat-daerah dan antar-instansi, beban pekerjaan administrasi pada fungsional statistisi, keterbatasan jumlah SDM pembina statistik sektoral, serta ketimpangan kapasitas teknis

SDM antar K/L menjadi tantangan dalam menjaga efektivitas pelaksanaan kegiatan statistik dan pembinaan sistem statistik nasional.

3. Keterlambatan dan keterbatasan ketersediaan data

Respon dan ketersediaan data dari K/L mitra maupun unit lain yang tidak tepat waktu berpotensi menghambat penyusunan publikasi, integrasi data, serta pemenuhan kebutuhan indikator strategis.

4. Tantangan kualitas data dan pemanfaatannya

Variasi kapasitas petugas lapangan, keterbatasan pelatihan, perubahan jadwal rilis, serta keterbatasan pemahaman pemangku kepentingan terhadap pemanfaatan data berpotensi memengaruhi kualitas, konsistensi, ketepatan waktu, serta tingkat pemanfaatan data statistik sosial. Selain itu, persepsi bias, perbedaan standar statistik, dan rendahnya integrasi dapat memengaruhi tingkat kepercayaan terhadap data.

5. Keterbatasan anggaran dan dampaknya terhadap pelaksanaan kegiatan.

Kebijakan efisiensi anggaran memengaruhi frekuensi kegiatan, kualitas pelatihan petugas, dukungan operasional, serta kebutuhan tambahan SDM untuk peningkatan sampel dan kegiatan statistik, yang berpotensi berdampak pada capaian kinerja.

6. Kebutuhan penguatan tata kelola dan efisiensi proses.

Diperlukan penyederhanaan format publikasi, penguatan koordinasi lintas direktorat, serta peningkatan efektivitas pembinaan statistik sektoral agar pelaksanaan kegiatan dan penyusunan output dapat lebih cepat, konsisten, dan berkualitas.

1.5. Sistematika Penyajian Laporan

Laporan Kinerja merupakan sarana untuk mengomunikasikan pencapaian kinerja Deputi Bidang Statistik Sosial BPS. Capaian kinerja tersebut dibandingkan dengan Perjanjian Kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan kinerja Deputi Bidang Statistik Sosial pada periode yang sama. Analisis atas capaian kinerja memungkinkan teridentifikasinya kendala dan hambatan untuk perbaikan kinerja di masa datang.

Oleh karena itu, sistematika penyajian Laporan kinerja Deputy Bidang Statistik Sosial Badan Pusat Statistik tahun 2025 adalah sebagai berikut.

Bab I. Pendahuluan

Pada bab ini diuraikan latar belakang; dasar hukum; maksud dan tujuan disusunnya laporan kinerja; kedudukan, tugas, fungsi, dan struktur organisasi Deputy Bidang Statistik Sosial; sumber daya manusia dan dukungan anggaran; potensi dan permasalahan serta sistematika penyajian laporan.

Bab II. Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan mengenai visi, misi, dan tujuan/sasaran strategis yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Deputy Bidang Statistik Sosial 2025–2029 dan Perjanjian Kinerja (PK) Deputy Bidang Statistik Sosial 2025.

Bab III. Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini diuraikan mengenai Capaian Kinerja Deputy Bidang Statistik Sosial 2025, Perkembangan Capaian Kinerja Deputy Bidang Statistik Sosial, dan Capaian Kinerja Deputy Bidang Statistik Sosial terhadap Target Renstra 2025–2029, termasuk menguraikan secara sistematis keberhasilan/kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi hambatan/kendala tersebut.

Disajikan pula alokasi dan realisasi anggaran Deputy Bidang Statistik Sosial tahun anggaran 2025 dalam mendukung capaian kinerja dan pelaksanaan tupoksi serta tugas-tugas lainnya termasuk analisis capaian indikator kinerja dan efisiensi anggaran.

Bab IV. Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum tentang keberhasilan dan kegagalan, permasalahan ini dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja Deputy Bidang Statistik Sosial serta strategi pemecahan masalah serta upaya tindak lanjut perbaikan yang akan dilakukan Deputy Bidang Statistik Sosial untuk meningkatkan kinerjanya di tahun mendatang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Visi dan Misi BPS

Visi BPS

Visi dan misi Badan Pusat Statistik 2025-2029 dirumuskan dengan memperhatikan isu strategis kelembagaan BPS yang berpengaruh pada peran dan posisi dalam penyediaan statistik resmi berkualitas untuk mendukung pencapaian Visi Indonesia Emas 2045. Perumusan ini juga selaras dengan arah kebijakan RPJPN 2025-2029, RPJMN 2025-2029, serta Visi Presiden dan Wakil Presiden 2024-2029 yaitu “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”, dengan delapan Misi Asta Cita dan 17 Program Prioritas. Dengan memperhatikan hal tersebut, maka visi Badan Pusat Statistik adalah **“Lembaga Independen, Tepercaya, dan Berperan Aktif dalam Mendukung Perumusan Kebijakan Berbasis Data Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”**.

Isu-isu strategis BPS dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2029;

Sebagaimana tercantum dalam Penjelasan atas Pasal 5 ayat 1, memberikan mandat kepada BPS untuk mengoordinasikan dan melaksanakan pengukuran Indikator 5 (lima) Sasaran Visi dan 45 Indikator Utama Pembangunan (IUP). Berdasarkan hasil identifikasi, dari keseluruhan indikator tersebut, terdapat 33 persen indikator yang dihasilkan oleh BPS dan sisanya dihasilkan K/L lain, termasuk lembaga asing. Hal ini mengimplikasikan bahwa BPS harus menjaga kualitas 33 persen indikator yang dihasilkan selama periode 2025-2029, sekaligus memperkuat koordinasi dengan K/L lain agar indikator yang mereka hasilkan memiliki kualitas yang setara dengan indikator yang dihasilkan BPS. Dalam konteks ini, BPS harus berperan aktif dalam mendukung perumusan kebijakan berbasis data melalui penyediaan berbagai indikator pembangunan.

2. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
BPS berperan dalam mendukung Transformasi Digital Nasional melalui penyediaan data digital yang andal serta digitalisasi proses bisnis statistik.
3. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 232 Tahun 2024 tentang Penanggung Jawab Bidang dan Sekretariat Tim Nasional Persiapan dan Percepatan Keanggotaan Indonesia dalam Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (*Organisation for Economic Cooperation and Development*);
Keputusan tersebut memberikan mandat kepada BPS untuk menjadi Koordinator Bidang Statistik dan Data. Dengan demikian, BPS tidak hanya bertanggung jawab untuk menerapkan praktik terbaik OECD pada statistik yang dihasilkannya, tetapi juga menjamin bahwa statistik yang dihasilkan oleh kementerian/lembaga/dinas/instansi (K/L/D/I) telah mengacu pada standar yang sama sehingga dapat dijadikan rujukan data statistik di tingkat nasional dan internasional.
4. Adanya gejolak ekonomi global, peningkatan ketegangan geopolitik, perkembangan teknologi informasi, arus data yang tumbuh dan berkembang dengan sangat cepat, disrupsi Revolusi Industri 4.0, dinamika ekonomi domestik, dan perubahan fokus program-program pembangunan pemerintah;
Hal tersebut mewajibkan BPS untuk senantiasa menyediakan statistik resmi yang berkualitas dan mampu memberikan wawasan bagi pengguna khususnya dalam pengambilan keputusan maupun perumusan kebijakan pemerintah.
5. Independensi BPS dalam menjaga objektivitas dan netralitas indikator statistik;
BPS berperan penting dalam menyediakan indikator yang menggambarkan perkembangan kondisi sosial, ekonomi, dan politik. Namun, potensi politisasi terhadap indikator ini dapat menimbulkan bias, serta mengganggu stabilitas nasional dan pengambilan keputusan yang tepat. Oleh karena itu, BPS harus menjaga independensi dengan mengedepankan objektivitas dan netralitas dalam setiap kegiatan statistik agar data yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kondisi riil di lapangan dan terbebas dari intervensi kepentingan politik.

Misi BPS

Untuk mencapai visi Badan Pusat Statistik, maka ditetapkan tiga (3) misi yang saling terintegrasi sebagai panduan langkah ke depan. Adapun misi BPS tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Menyediakan data statistik berkualitas dan *Insight* untuk perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan.

Misi ini merupakan fondasi utama dalam mewujudkan visi BPS. Data statistik yang berkualitas dan *insight* yang mendalam sangat dibutuhkan untuk mendukung perumusan kebijakan yang berbasis data. Dengan menyediakan data yang berkualitas, BPS memastikan bahwa pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dapat mengambil keputusan yang efektif dan terarah. Hal ini sejalan dengan Visi BPS untuk menjadi lembaga yang tepercaya dan berperan aktif dalam mendukung pembangunan nasional. Data yang berkualitas juga menjadi bukti konkret dari independensi BPS karena dihasilkan melalui metodologi yang ilmiah dan tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu.

2. Menguatkan kepemimpinan BPS dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)

Misi ini bertujuan untuk memperkuat peran BPS sebagai lembaga statistik utama di Indonesia yang mengoordinasikan dan memimpin seluruh kegiatan statistik nasional. Dengan menguatkan kepemimpinan dalam SSN, BPS mengoordinasi agar seluruh data yang dihasilkan oleh berbagai instansi dan lembaga di Indonesia memenuhi standar yang sama, konsisten, dan dapat diintegrasikan. Hal ini mendukung Visi BPS untuk menjadi lembaga yang independen dan tepercaya karena koordinasi yang baik dalam SSN akan menciptakan data yang konsisten dan terstandar, serta memastikan transparansi dalam proses pengumpulan dan penyajian data. Selain itu, kepemimpinan yang kuat dalam SSN juga memperkuat peran aktif BPS dalam mendukung kebijakan berbasis data.

3. Menguatkan kapasitas kelembagaan statistik yang efektif dan efisien.

Keberhasilan Misi 1 dan Misi 2 membutuhkan kelembagaan yang tangguh. Untuk itu, BPS berfokus pada pengembangan SDM yang unggul, optimalisasi

tata kelola organisasi, dan pemanfaatan teknologi mutakhir. Melalui efektivitas dan efisiensi, BPS mampu menjalankan tugasnya secara profesional dan independen, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi.

Melalui ketiga misi tersebut, BPS berkomitmen untuk menjembatani kebutuhan data nasional dengan perumusan kebijakan yang strategis dan berbasis data. Dengan demikian, Visi BPS sebagai lembaga independen, tepercaya, dan berperan aktif dapat terwujud secara konsisten memberikan manfaat optimal bagi pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Tujuan BPS

Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi di atas, BPS menetapkan tiga tujuan strategis yang saling mendukung, yang dirancang untuk memastikan keberhasilan dalam setiap aspek penting dari operasionalnya:

Tujuan 1: Mewujudkan Perumusan Kebijakan dan Pengambilan Keputusan Berbasis Data Statistik Berkualitas dan Insight yang Relevan.

Tujuan ini merupakan fondasi utama dalam mencapai visi BPS. Dengan menghasilkan statistik berkualitas dan menyediakan wawasan yang relevan, BPS mendukung penyusunan kebijakan yang berbasis bukti. Kebijakan yang disusun dengan data yang tepat dan akurat meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan terhadap BPS, serta memperkuat peran aktif BPS menyediakan data yang mendukung proses perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan.

Indikator Kinerja pada tujuan ini adalah Tingkat Pemanfaatan Data Statistik (TPDS).

Tujuan 2: Mewujudkan penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional yang Andal, Efektif, dan Efisien,

Keberhasilan BPS dalam menyediakan data berkualitas tidak terlepas dari peran Sistem Statistik Nasional. SSN yang andal, efektif, dan efisien memastikan integrasi, konsistensi, dan akurasi data yang dihasilkan. Tujuan ini berkontribusi secara langsung pada tercapainya Visi BPS sebagai lembaga tepercaya. Dengan memastikan sistem yang kokoh dan

terintegrasi, BPS dapat memperkuat posisi strategisnya dalam menyediakan data yang mendukung proses perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan. Hal ini akan meningkatkan peran aktif BPS di berbagai level pemerintahan dan masyarakat.

Indikator Kinerja pada tujuan ini adalah Indeks Reformasi Birokrasi.

Tujuan 3: Mewujudkan Tata Kelola Badan Pusat Statistik yang Berkualitas, Akuntabel, Efektif, dan Efisien dalam Menyelenggarakan Statistik.

Tata kelola yang baik merupakan landasan yang mendukung kedua tujuan lainnya. Tata kelola yang berkualitas, akuntabel, efektif, dan efisien memastikan bahwa BPS mampu menjalankan tugasnya secara profesional dan transparan yang pada akhirnya memperkuat kapasitas kelembagaan. Dengan efisiensi dalam operasional dan akuntabilitas yang tinggi, BPS dapat lebih efektif dalam menjalankan fungsinya, memperkuat kepercayaan publik, dan mendukung proses perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan berbasis data.

Indikator kinerja pada tujuan ini adalah Indeks Reformasi Birokrasi.

Sasaran Strategis BPS

Sebagai tolok ukur pencapaian kinerja untuk setiap tujuan, BPS menetapkan tiga sasaran strategis beserta indikator kerjanya sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya Peningkatan Pemanfaatan Data Statistik Berkualitas dan Insight dalam Perumusan Kebijakan dan Pengambilan Keputusan.

Sasaran strategis pertama BPS diarahkan pada peningkatan pemanfaatan data statistik yang berkualitas dan dilengkapi dengan insight untuk mendukung perumusan kebijakan serta pengambilan keputusan berbasis bukti. Keberhasilan sasaran ini diukur melalui Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) Tingkat Pemanfaatan Data Statistik, yang mencerminkan efektivitas diseminasi data, relevansi informasi yang disediakan, serta penguatan budaya penggunaan data di

kalangan pemangku kepentingan. Peningkatan pemanfaatan data berperan penting dalam meningkatkan ketepatan kebijakan, efisiensi perencanaan dan alokasi sumber daya, serta kepercayaan publik terhadap kebijakan berbasis data. Namun demikian, pencapaian sasaran tersebut masih menghadapi sejumlah risiko, antara lain rendahnya tingkat pemanfaatan data akibat keterbatasan literasi data, keterlambatan atau ketidakterediaan data yang relevan, belum optimalnya digitalisasi proses statistik, pemanfaatan sumber data alternatif yang masih terbatas, serta dampak kebijakan efisiensi anggaran. Untuk memitigasi risiko tersebut, BPS perlu menerapkan pengelolaan risiko secara berkelanjutan melalui penguatan literasi data, peningkatan kolaborasi lintas sektor, inovasi diseminasi data, penyesuaian prioritas dan jadwal rilis data, serta pemanfaatan big data dan data administratif guna meningkatkan pemanfaatan data statistik secara berkelanjutan.

Sasaran Strategis 2 : Terwujudnya Kualitas Penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional yang Baik dan Terpadu

Sasaran strategis kedua menegaskan komitmen BPS dalam memperkuat penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN) yang berkualitas, terintegrasi, dan selaras antar-sektor sebagai fondasi kebijakan publik berbasis bukti. Keberhasilan sasaran ini diukur melalui Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) berupa Indeks Pembangunan Statistik (IPS), yang menggambarkan tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral pada instansi pusat dan daerah, serta mencerminkan kapasitas kelembagaan dalam membangun ekosistem statistik yang terstandar, terkoordinasi, dan berkelanjutan.

SSN yang terpadu memberikan manfaat strategis berupa peningkatan keselarasan dan keterbukaan data, pencegahan duplikasi informasi, serta efisiensi penyelenggaraan statistik melalui sinergi lintas sektor. Namun, pencapaian sasaran ini masih menghadapi risiko berupa lemahnya koordinasi antar-instansi yang menyebabkan duplikasi atau rendahnya kualitas data, serta inkompatibilitas data akibat belum adanya standar statistik yang seragam. Oleh karena itu, pengelolaan risiko yang terencana dan berkelanjutan menjadi kunci untuk meningkatkan IPS secara konsisten dan memastikan terwujudnya SSN yang berkualitas dan terpadu.

Sasaran Strategis 3 : Terwujudnya Kinerja Badan Pusat Statistik yang Bersih, Akuntabel, dan Profesional.

Sasaran strategis ketiga menegaskan komitmen BPS dalam mewujudkan kelembagaan yang menjunjung prinsip tata kelola yang baik (*good governance*), berintegritas, dan akuntabel dalam penyelenggaraan statistik. Keberhasilan sasaran ini diukur melalui Indeks Reformasi Birokrasi, yang mencerminkan capaian BPS dalam penguatan integritas organisasi, efisiensi proses bisnis, akuntabilitas kinerja, serta peningkatan kualitas layanan publik. Kelembagaan yang bersih dan profesional berperan penting dalam memperkuat kepercayaan publik, meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya, serta menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam mendukung kebijakan publik berbasis data.

Namun, pencapaian sasaran ini masih menghadapi berbagai risiko, antara lain belum optimalnya kinerja pegawai akibat lemahnya budaya kerja, keterbatasan adaptasi transformasi digital, serta sistem manajemen SDM dan pengawasan internal yang belum sepenuhnya efektif. Selain itu, risiko penyimpangan tata kelola dan rendahnya kolaborasi lintas

sektor dapat menurunkan efisiensi organisasi, melemahkan kualitas layanan statistik, serta merusak kepercayaan publik. Oleh karena itu, pengelolaan risiko secara berkelanjutan melalui penguatan pengawasan internal, pengembangan SDM, inovasi layanan publik, peningkatan digitalisasi, dan penguatan kolaborasi menjadi kunci dalam meningkatkan Indeks Reformasi Birokrasi serta mewujudkan kinerja BPS yang bersih, akuntabel, dan profesional.

Visi dan Misi BPS akan terwujud dengan baik dengan dukungan dari berbagai Deputi. Namun sampai dengan Laporan Kinerja Deputi Bidang Statistik Sosial ini disusun, visi, misi, dan tujuan Deputi Bidang Statistik Sosial **belum ditetapkan**.

2.2 Target Kinerja Deputi Bidang Statistik Sosial 2025 - 2029

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Deputi Bidang Statistik Sosial tahun 2025–2029, serta mendukung pencapaian RPJMN tahun 2025–2029, Deputi Bidang Statistik Sosial berkontribusi pada 2 (dua) sasaran strategis dan 2 (dua) sasaran program yang mencerminkan hasil dari program dan kegiatan Deputi Bidang Statistik Sosial. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian, setiap sasaran strategis dan program diukur dengan menggunakan indikator kinerja sasaran strategis, indikator kinerja program dan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:

Tabel 1. Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Deputi Bidang Statistik Sosial

No	Sasaran Strategis/ Sasaran Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target				
				2025	2026	2027	2028	2029
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Terwujudnya peningkatan pemanfaatan data statistik yang berkualitas dan insight dalam perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan							
	Peningkatan Pemanfaatan data dan Insight Statistik Sosial yang berkualitas	Tingkat Pemanfaatan Data Statistik Sosial	Persen	81,31	83,27	85,23	87,19	89,15
2	Terwujudnya kualitas penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional yang baik dan terpadu							
	Terwujudnya Penyelenggaraan Statistik Sektoral Kementerian/Lembaga Mitra Deputi Bidang Statistik Sosial yang Berkualitas	Persentase Kenaikan Rata-Rata Nilai IPS K/L Mitra Deputi Bidang Statistik Sosial dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persen	18,13	13,62	15,53	18,00	19,73

Sasaran strategis dan target kinerja Deputi Bidang Statistik Sosial menunjukkan arah pembangunan statistik sosial yang semakin kuat, terukur, dan berorientasi pada dampak. Sasaran pertama menekankan peningkatan pemanfaatan data dan insight statistik sosial dalam perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan. Target yang meningkat dari 81,31 persen pada 2025 menjadi 85,23 persen dalam jangka menengah (tahun 2027) dan menjadi 89,15 persen pada akhir periode Renstra (tahun 2029) mencerminkan upaya berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas, relevansi, serta aksesibilitas data statistik sosial sehingga semakin dipercaya dan digunakan oleh para pemangku kepentingan. Tren kenaikan ini juga menunjukkan penguatan peran statistik sosial sebagai dasar *evidence-based policy* yang mendorong kebijakan lebih tepat sasaran dan responsif terhadap terjadinya dinamika sosial.

Sasaran kedua menegaskan komitmen terhadap penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional yang terpadu melalui peningkatan kualitas statistik sektoral pada Kementerian/Lembaga mitra. Target persentase kenaikan rata-rata nilai IPS K/L yang tetap positif hingga 19,73 persen pada 2029 menunjukkan adanya proses pembinaan dan penguatan tata kelola statistik sektoral yang berkesinambungan. Hal ini mencerminkan semakin baiknya koordinasi, standar, dan kualitas data sektoral yang dihasilkan, sehingga mampu mendukung integrasi data nasional yang lebih kuat. Secara keseluruhan, kedua sasaran strategis tersebut menggambarkan fondasi yang

kokoh dalam mewujudkan ekosistem statistik yang berkualitas, terintegrasi, dan berdampak nyata bagi pembangunan nasional.

2.3 Perjanjian Kinerja Deputy Bidang Statistik Sosial 2025

Dokumen perjanjian kinerja ditandatangani oleh Deputy Bidang Statistik Sosial dan Kepala BPS pada tanggal 19 Februari 2025. Dalam dokumen tersebut ditetapkan satuan dan target yang harus dicapai pada tahun 2025 dari setiap indikator kinerja sesuai sasaran program, disertai besaran anggaran yang dapat dipergunakan.

Tabel 2. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Deputy Bidang Statistik Sosial

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
Peningkatan pemanfaatan data dan insight Statistik Sosial yang Berkualitas	Tingkat Pemanfaatan Data Statistik Sosial	Persen	81,31
Terwujudnya Penyelenggaraan Statistik Sektorial Kementerian/Lembaga Mitra Bidang Statistik Sosial yang berkualitas	Persentase kenaikan rata-rata nilai IPS K/L Mitra Deputy Statistik Sosial dalam penyelenggaraan Statistik Sektorial	Persen	18,13

Tingkat Pemanfaatan Data Statistik Sosial ditargetkan mencapai 81,31 persen pada tahun 2025, yang mencerminkan komitmen untuk memastikan data dan insight yang dihasilkan semakin relevan, mudah diakses, serta digunakan secara luas oleh para pemangku kepentingan dalam perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan. Pencapaian target ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas kebijakan publik yang lebih tepat sasaran, terukur, dan responsif terhadap dinamika sosial.

Di sisi lain, target persentase kenaikan rata-rata nilai IPS Kementerian/Lembaga mitra sebesar 18,13 persen menunjukkan upaya berkelanjutan dalam memperkuat penyelenggaraan statistik sektorial yang berkualitas. Melalui pembinaan, koordinasi, dan harmonisasi dalam kerangka Sistem Statistik Nasional, kualitas tata kelola dan standar statistik sektorial diharapkan semakin meningkat, sehingga

menghasilkan data yang lebih andal, konsisten, dan terintegrasi. Secara keseluruhan, kedua target tersebut menggambarkan sinergi antara peningkatan kualitas data dan optimalisasi pemanfaatannya untuk mendukung pembangunan yang lebih efektif dan berbasis bukti.

Untuk mencapai target kinerja Deputy Bidang Statistik Sosial diperlukan anggaran yang memadai. Berikut adalah alokasi anggaran pada unit kerja Deputy Bidang Statistik Sosial yang tercantum dalam dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2025.

Tabel 3. Anggaran pada Perjanjian Kinerja Deputy Bidang Statistik Sosial 2025

Kode	Kegiatan	Anggaran
2905	Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan	Rp. 32.574.470.000,-
2906	Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kesejahteraan Rakyat	Rp. 3.713.679.000,-
2907	Penyediaan dan Pengembangan Statistik Ketahanan Sosial	Rp. 7.012.174.000,-
Jumlah		Rp. 43.300.323.000,-

2.4 Dukungan BPS Terhadap Prioritas Nasional, Prioritas Presiden, dan Isu Strategis Nasional Tahun 2025

Prioritas Nasional :

1. Pembinaan Statistik Sektoral

Sejalan dengan Visi BPS 2025–2029, yaitu “Lembaga yang Independen, Terpercaya, dan Berperan Aktif dalam Mendukung Perumusan Kebijakan Berbasis Data Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”, salah satu misi yang ditetapkan BPS adalah Menguatkan Kepemimpinan BPS dalam Penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN). Misi ini menegaskan peran BPS dalam memastikan bahwa data yang dihasilkan berbagai instansi

pemerintah memenuhi standar, konsisten, dan terintegrasi untuk mendukung kebijakan berbasis data.

Peran BPS dalam pembinaan statistik sektoral memiliki dasar hukum pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, yang mengamanatkan BPS untuk melakukan pembinaan kepada penyelenggara kegiatan statistik dalam rangka pengembangan Sistem Statistik Nasional dan mendukung pembangunan nasional. Pelaksanaan pembinaan kepada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/Pemda) dilaksanakan oleh Tim Pembina Statistik Sektoral (Tim PSS) di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota, yang bertugas melakukan sosialisasi, komunikasi, dan koordinasi dengan kementerian/lembaga serta pemerintah provinsi/kabupaten/kota sebagai lokus pembinaan.

Deputi Bidang Statistik Sosial berperan aktif dalam memberikan asistensi teknis, penguatan kelembagaan, dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia di kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah agar mampu menyelenggarakan statistik sektoral yang sesuai dengan prinsip-prinsip statistik resmi. Pembinaan ini diciptakan agar setiap instansi memiliki pemahaman yang seragam tentang metodologi, standar metadata, serta tata kelola data, sehingga mampu menghasilkan data sektoral yang konsisten, berkualitas, dan dapat dikompilasi dalam kerangka Sistem Statistik Nasional untuk mendukung perumusan kebijakan berbasis data.

Prioritas Presiden

1. Inpres 4 2025 : Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN)

Pelaksanaan Inpres Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional. Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) merupakan basis data terpadu yang digunakan untuk mendukung perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan pembangunan sosial ekonomi, termasuk penargetan program perlindungan sosial dan pengentasan kemiskinan. Penyusunan DTSEN dilaksanakan melalui integrasi dan pemutakhiran berbagai sumber data sosial ekonomi sesuai dengan standar statistik dan prinsip Satu Data Indonesia.

Badan Pusat Statistik berperan sebagai pembina, koordinator, dan penyedia statistik dalam penyelenggaraan pengelolaan dan pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Peran tersebut dilaksanakan melalui penyusunan metodologi dan standar data, integrasi serta pemutakhiran data sosial ekonomi, serta pengendalian kualitas data guna menjamin akurasi, keterpaduan, dan konsistensi DTSEN sebagai dasar perumusan dan evaluasi kebijakan pembangunan sosial ekonomi.

Tiap Direktorat pada Deputi Bidang Statistik Sosial memiliki beberapa tugas dalam pelaksanaan DTSEN, antara lain:

- a. Bertanggung jawab melakukan identifikasi data hasil Sensus dan Survei di masing-masing Direktorat yang dapat digunakan untuk melakukan pemadanan/pemutakhiran DTSEN;
- b. Bertanggung jawab melakukan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga dan instansi lainnya terkait Data tiap Direktorat yang dapat digunakan untuk melakukan pemadanan/pemutakhiran DTSEN;
- c. Bertanggung jawab melakukan pembinaan dan atau memberikan masukan kepada direktorat lain yang melakukan pembinaan terhadap Kementerian/Lembaga dan instansi lainnya tersebut yang telah teridentifikasi di poin b untuk meningkatkan kualitas Data yang dapat digunakan untuk melakukan pemadanan/pemutakhiran DTSEN;
- d. Bertanggung jawab mengevaluasi hasil DTSEN termasuk evaluasi terhadap implementasi standar data pada poin c dalam pemutakhiran data di Kementerian/Lembaga dan instansi terkait.

2. Dukungan terhadap Pengentasan Kemiskinan Ekstrem

Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem didukung melalui penyediaan data statistik, termasuk penghitungan tingkat kemiskinan ekstrem secara berkala. Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat, Direktorat Statistik Ketahanan Sosial bersama unit kerja terkait di BPS pusat dan daerah berperan dalam menyediakan data dasar yang diperlukan untuk

mendukung pemantauan dan evaluasi kebijakan pengentasan kemiskinan ekstrem.

3. Dukungan terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG)

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu prioritas pemerintah dalam meningkatkan kualitas SDM melalui perbaikan status gizi anak sekolah dan kelompok rentan. BPS mendukung pelaksanaan program tersebut melalui penyediaan data statistik sosial ekonomi dan gizi yang digunakan sebagai dasar perencanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan, serta dalam mengukur dampak program terhadap kesejahteraan masyarakat. Melalui kuesioner Susenas Maret dan September 2025, BPS mengumpulkan informasi terkait anggota rumah tangga penerima Program Makan Bergizi Gratis untuk kelompok sasaran anak sekolah. Selain itu Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat juga menjadi bagian dalam kegiatan Adhoc Survei Evaluasi dan Monitoring Program Makan Bergizi Gratis, pada Survei Khusus dan Survei Baseline, di bawah komando Deputi Neraca dan Analisis Statistik.

Direktorat Kependudukan dan Ketenagakerjaan turut mendukung dalam pelaksanaan survei khusus monitoring dan evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (SK-MBG) Tahap I dan II melalui keterlibatan pada seluruh tahapan kegiatan, mulai dari perencanaan hingga pengolahan hasil. Dukungan tersebut diwujudkan melalui keterlibatan sebagai Instruktur Utama dan Instruktur Nasional dalam Pelatihan SK-MBG untuk memastikan keseragaman pemahaman konsep, metodologi, serta standar kualitas pengumpulan data. Selain itu, Direktorat Kependudukan dan Ketenagakerjaan turut berperan sebagai anggota tim manajemen lapangan yang mengawal pelaksanaan pendataan agar berjalan sesuai pedoman, serta sebagai anggota tim analisis yang bertanggung jawab dalam pengolahan, validasi, dan cleaning data guna menjamin akurasi dan konsistensi hasil survei.

Sementara Direktorat Statistik Ketahanan Sosial dalam hal ini berperan dalam berbagai kegiatan, antara lain: sebagai Instruktur Nasional survei MBG, asistensi analisis laporan MBG, dan supervisi pelaksanaan lapangan. Responden Survei Khusus adalah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Supplier

(penyedia bahan baku), Sekolah, serta rumah tangga dan siswa yang menerima MBG.

Isu Strategis Nasional

1. Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai Pusat Pemerintahan Baru

Penetapan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai pusat pemerintahan baru merupakan isu strategis nasional yang memerlukan dukungan data statistik yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi. Dalam rangka mendukung perencanaan, pembangunan, dan pemantauan perkembangan IKN, BPS berperan dalam penyediaan data dasar dan indikator statistik yang menggambarkan kondisi demografi, sosial, ekonomi, serta lingkungan di wilayah IKN dan daerah penyangga.

Dukungan tersebut diwujudkan melalui pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data statistik sektoral dan lintas sektor, termasuk data kependudukan, ketenagakerjaan, kemiskinan, perumahan, infrastruktur, dan perekonomian wilayah. BPS juga berperan dalam penguatan integrasi data dan penerapan standar statistik nasional untuk memastikan keterbandingan dan konsistensi data sebagai dasar perumusan kebijakan terkait pembangunan IKN.

Selain itu, BPS mendukung pengembangan IKN melalui pemanfaatan teknologi dan inovasi statistik, termasuk pemutakhiran data berbasis wilayah kecil dan penguatan sistem data spasial, guna menyediakan informasi yang relevan bagi pengambilan keputusan dan evaluasi kebijakan pembangunan IKN secara berkelanjutan.

Dalam penyelenggaraan penyediaan data dasar dan indikator statistik yang menggambarkan kondisi demografi, sosial, ekonomi, serta lingkungan di wilayah IKN, Deputi Bidang Statistik Sosial berperan dalam Pendataan Penduduk Ibu Kota Nusantara (PPIKN) serta penyusunan publikasinya.

2.5 Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2025

Berdasarkan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik, Deputi Bidang Statistik Sosial

mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang statistik sosial. Dalam melaksanakan tugasnya, Deputi Bidang Statistik Sosial menyelenggarakan fungsi berikut: (a) perumusan kebijakan teknis pelaksanaan, pemberian bimbingan, dan pembinaan di bidang statistik kependudukan, kesejahteraan rakyat, dan ketahanan sosial; (b) pengendalian terhadap kebijakan teknis di bidang statistik kependudukan, kesejahteraan rakyat, dan ketahanan sosial; (c) pelaksanaan pengembangan statistik kependudukan, kesejahteraan rakyat, dan ketahanan sosial; dan (d) pelaksanaan tugas sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala. Pada tahun 2025 Deputi Bidang Statistik Sosial akan melaksanakan rencana kerja sesuai dengan tupoksi pada Perban tersebut.

Dalam pelaksanaan Rencana Kerja 2025, Pagu total anggaran yang dialokasikan untuk Deputi Bidang Statistik Sosial sesuai dengan yang tercantum pada PK Deputi Bidang Statistik Sosial 2025 sebesar Rp43.300.323.000,-. Seperti halnya pada tahun-tahun sebelumnya, tidak semua pagu total anggaran tersebut dapat digunakan. Hal ini dikarenakan adanya kebijakan efisiensi anggaran untuk seluruh kementerian/lembaga termasuk BPS tidak terkecuali pada unit kerja di lingkup Deputi Bidang Statistik Sosial. Dampak efisiensi tersebut yaitu besar anggaran yang dapat digunakan untuk pelaksanaan kegiatan pada lingkup Deputi Bidang Statistik Sosial sampai akhir triwulan IV Tahun 2025 hanya sebesar Rp 9.343.755.000,-, rincian per direktorat dapat disajikan pada Tabel 4.

**Tabel 4 Besaran Anggaran yang dapat Digunakan Menurut Kegiatan
Deputi Bidang Statistik Sosial 2025**

	Kegiatan	Anggaran
2905	Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan	Rp5.111.551.000,-
2906	Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kesejahteraan Rakyat	Rp2.562.794.000,-
2907	Penyediaan dan Pengembangan Statistik Ketahanan Sosial	Rp1.669.416.000,-
	Jumlah	Rp9.343.755.000,-

BAB III

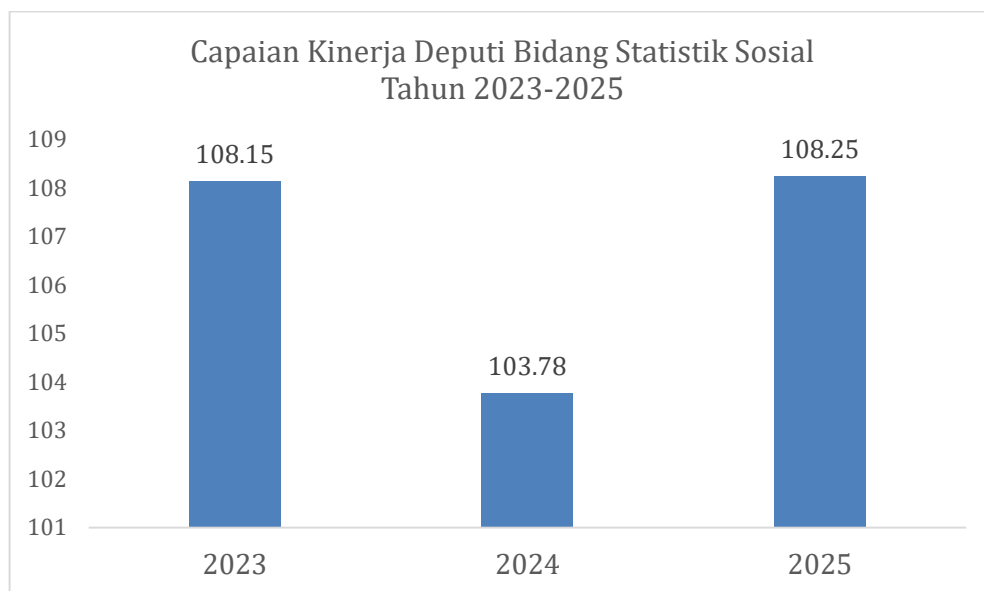
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Realisasi, Capaian Kinerja, dan Nilai Penilaian Kinerja Organisasi Tahun 2025

Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban dari Deputi Bidang Statistik Sosial dalam rangka menguraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis kinerja, sekaligus untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan suatu program dan kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan selama satu tahun secara periodik. Pengukuran kinerja diperlukan untuk memonitor pencapaian kinerja pada perjanjian kinerja, selanjutnya membandingkan antara rencana kinerja dengan capaian setiap indikator kinerja. Keberhasilan atau kegagalan suatu kinerja dilihat melalui hasil pengukuran kinerja, evaluasi kinerja, dan analisis akuntabilitas kinerja berdasarkan sasaran strategis yang telah ditetapkan dan melalui indikator kinerja utama. Evaluasi kinerja dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja (*performance gap*) yang terjadi, baik terhadap penyebab terjadinya gap maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan, sehingga dapat ditindaklanjuti dalam perencanaan/program/kegiatan di masa yang akan datang.

Pada tahun 2025, Deputi Bidang Statistik Sosial mempunyai 2 (dua) sasaran strategis dengan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU). Seluruh sasaran dan IKU telah diukur capaian kinerjanya setiap triwulanan. Capaian kinerja Deputi Bidang Statistik Sosial tahun 2025 merupakan pencapaian dari indikator-indikator tujuan dan sasaran strategis selama tahun 2025, dihitung berdasarkan perbandingan antara realisasi dengan target Indikator Kinerja Utama pada masing-masing tujuan maupun sasaran, yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025

a. Perbandingan Capaian Kinerja Total Deputi Bidang Statistik Sosial Tahun 2023-2025



Gambar 3. Capaian Kinerja Deputi Bidang Statistik Sosial Tahun 2023-2025

Capaian kinerja Deputi Bidang Statistik Sosial selama tahun 2023-2025 mempunyai nilai di atas 100, yang artinya capaian kinerja sangat baik. Hal ini menunjukkan bahwa unit kerja Deputi Bidang Statistik Sosial memiliki performa kinerja yang sangat kuat, konsisten, dan berhasil melampaui target kinerja yang ditetapkan dengan nilai yang sangat dekat dengan target perencanaan. Artinya dalam tahap perencanaan dan penetapan target sudah sangat tepat. Pada tahun 2023 kinerja mencapai 108,15, kemudian tetap terjaga pada level sangat baik di tahun 2024 sebesar 103,78 yang mencerminkan ketahanan dalam menjaga performa kinerja, serta kembali meningkat pada tahun 2025 menjadi 108,25. Tren ini menegaskan penguatan strategi, sinergi yang semakin solid, serta optimalisasi sumber daya dan inovasi, sekaligus menunjukkan komitmen tinggi dalam menjaga kualitas data, meningkatkan layanan statistik, dan mendukung kebijakan pembangunan berbasis data secara berkelanjutan.

2. Penilaian Kinerja Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2024, Penilaian Kinerja Organisasi (PKO) adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan pencapaian pelaksanaan

program atau kegiatan atau aktivitas dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Nilai PKO diambil dari kertas kerja monitoring Triwulan IV di mana nilai SAKIP yang diisi adalah nilai SAKIP tahun 2025 yang dirilis Inspektorat pada Bulan Desember 2025. Predikat PKO kemudian dikelompokkan menjadi 5 dengan rincian Nilai Kinerja Organisasi (NKO), predikat dan interpretasinya disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5. Nilai NKO, Predikat PKO dan Interpretasi PKO

Nilai Kinerja Organisasi (NKO)	Predikat PKO	Interpretasi PKO
$X > 100\%$	ISTIMEWA	Tingkat implementasi manajemen kinerja dan capaian kinerja sudah sangat memuaskan dan di atas ekspektasi. Praktik Baik ini dapat menjadi contoh bagi organisasi/unit lain
$80\% < X \leq 100\%$	BAIK	Tingkat implementasi manajemen kinerja dan capaian kinerja sudah sangat baik dan sesuai ekspektasi.
$60\% < X \leq 80\%$	BUTUH PERBAIKAN	Tingkat implementasi manajemen kinerja dan capaian kinerja sudah cukup baik namun masih di bawah ekspektasi/target.
$40\% < X \leq 60\%$	KURANG	Tingkat implementasi manajemen kinerja dan capaian kinerja masih kurang dan masih di bawah ekspektasi/target.
$0\% < X \leq 20\%$	SANGAT KURANG	Tingkat implementasi manajemen kinerja dan capaian kinerja masih sangat kurang dan di bawah ekspektasi/target.

Pada tahun 2025, nilai Penilaian Kinerja Organisasi (PKO) Deputy Bidang Statistik Sosial adalah 94,5, dimana berdasarkan Permenpan RB Nomor 22 Tahun 2024 termasuk ke dalam predikat “Baik”. Interpretasi untuk PKO dengan predikat “Baik” adalah tingkat manajemen kinerja dan capaian kinerja sudah sangat baik dan sesuai ekspektasi.

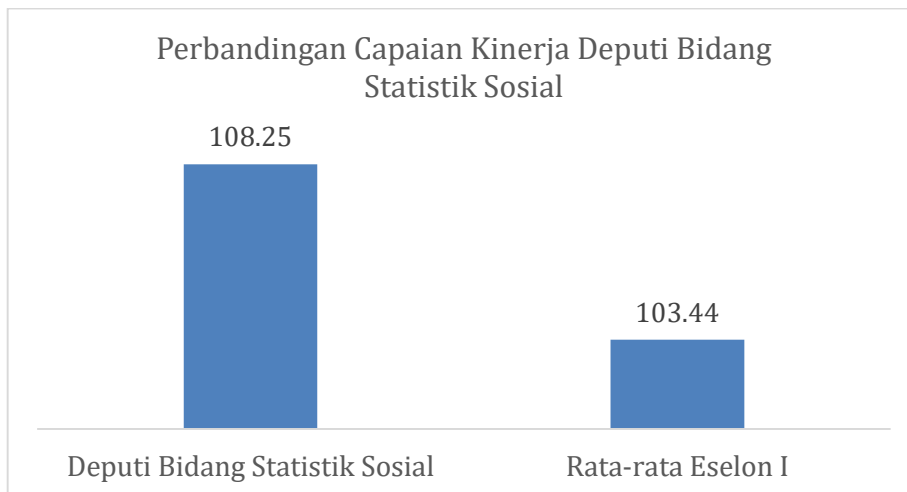
Tabel 6. Nilai dan Predikat PKO Deputy Bidang Statistik Sosial Tahun 2025

Unit Kerja :	Deputi Bidang Statistik Sosial									
Nilai SAKIP 2025:	73,00									
Predikat SAKIP 2025:	BB/Sangat Baik									
Tujuan/Sasaran/Indikator Kinerja	Target	Satuan	Penilaian Kinerja Organisasi (PKO)							
			Normalisasi Capaian PK (1)	Koreksi Normalisasi Capaian PK Berdasarkan Predikat AKIP (2)	Nilai Akhir Capaian PK = (1)x(100%-(2))					
T1. Mewujudkan Perumusan Kebijakan dan Pengambilan Keputusan Berbasis Data Statistik Berkualitas dan Insight yang Relevan										
1.1.0	Peningkatan pemanfaatan data dan insight Statistik Sosial yang Berkualitas									
	1.1.0.1	Tingkat Pemanfaatan Data Statistik Sosial	81,31	Persen	110	10%	99			
		1.1.0.1.1	Persentase pengguna data yang menggunakan data bidang statistik sosial sebagai dasar perencanaan, monitoring, dan evaluasi							
T2. Mewujudkan Penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional yang Andal, Efektif, dan Efisien										
2.1.0	Terwujudnya Penyelenggaraan Statistik Sektoral Kementerian/Lembaga Mitra Bidang Statistik Sosial yang berkualitas									
	2.1.0.1	Persentase kenaikan rata-rata nilai IPS K/L Mitra Deputi Statistik Sosial dalam penyelenggaraan Statistik Sektoral	18,13	Persen	100,00	10%	90			
					Total Capaian PK		189			
					NKO Rata-rata Capaian PK		94,5			
					Predikat PKO		BAIK			

Sumber: Kertas Kerja Pengukuran Kinerja Triwulan IV Tahun 2025

3. Perbandingan Capaian Kinerja Deputy Bidang Statistik Sosial dengan Rata-Rata Capaian Kinerja Eselon I pada Lingkup Badan Pusat Statistik Tahun 2025

Perbandingan capaian kinerja Deputy Bidang Statistik Sosial dengan rata-rata capaian kinerja Eselon I di BPS dapat dilihat dari gambar berikut:



Gambar 4 Perbandingan Capaian Kinerja Deputy Bidang Statistik Sosial

Capaian kinerja Deputy Bidang Statistik Sosial menunjukkan hasil yang sangat membanggakan dan berada di atas rata-rata kinerja Eselon I. Dengan nilai capaian sebesar 108,25 persen, Deputy Bidang Statistik Sosial tidak hanya melampaui target

kinerja yang ditetapkan, tetapi juga unggul dibandingkan rata-rata capaian kinerja Eselon I yang sebesar 103,44 persen. Hal ini mencerminkan efektivitas pelaksanaan kinerja, kekuatan koordinasi, serta optimalisasi sumber daya dan inovasi dalam mendukung penyediaan statistik sosial yang berkualitas. Kinerja yang lebih tinggi dari rata-rata ini sekaligus menegaskan peran strategis Deputi Bidang Statistik Sosial sebagai unit yang produktif dan memiliki kontribusi optimal dalam mendukung kebijakan pembangunan berbasis data.

Berdasarkan hasil tersebut, pada tahun 2025 Deputi Bidang Statistik Sosial telah mengidentifikasi dan mulai melaksanakan sejumlah upaya perbaikan kinerja sebagai bagian dari rencana tindak lanjut berdasarkan capaian kinerja pada tahun 2025 sebagai berikut:

- a. Penguatan perencanaan dan pengendalian kinerja berbasis hasil, peningkatan efisiensi dan kualitas proses bisnis statistik melalui transformasi digital, serta optimalisasi koordinasi lintas unit kerja dalam mendukung pelaksanaan program strategis;
- b. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan pemantauan kinerja secara berkala terus dilakukan untuk memastikan perbaikan kinerja dapat berjalan berkelanjutan dan berdampak nyata pada peningkatan capaian kinerja pada periode berikutnya;
- c. Tingginya capaian pada IKU pembinaan statistik sektoral mencerminkan efektivitas pelaksanaan pendampingan, koordinasi, dan sinergi dengan kementerian/lembaga mitra dalam penyelenggaraan statistik sektoral. Upaya penguatan standarisasi data, peningkatan pemahaman terhadap prinsip sinergi data, serta optimalisasi peran Deputi Bidang Statistik Sosial melalui ketiga direktorat yang ada dibawahnya dalam pembinaan statistik sektoral selama Tahun 2025 memberikan kontribusi signifikan terhadap capaian kinerja secara keseluruhan.
- d. Meningkatkan kolaborasi dan koordinasi tim. Dalam rangka peningkatan kinerja, Deputi Bidang Statistik Sosial melakukan penyusunan tim pada masing-masing direktorat dengan ketua dan anggota tim yang diusahakan tidak lintas tim. Hal ini untuk memudahkan koordinasi tim dalam pelaksanaan beberapa

kegiatan yang diampu. Selain itu untuk meningkatkan kolaborasi dengan kementerian/lembaga mitra Deputi Bidang Statistik Sosial.

- e. Penyusunan mitigasi risiko kegiatan. Setiap tim yang menjadi pengampu indikator kinerja utama pada setiap direktorat melakukan penyusunan mitigasi risiko untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola potensi risiko yang dapat menghambat tercapainya target kinerja yang sudah ditetapkan.
- f. Melakukan perbaikan kinerja berdasarkan evaluasi kegiatan yang dilakukan tiap tim.
- g. Melakukan upaya perbaikan pelaksanaan Pembinaan Statistik Sektorale agar dapat dilaksanakan lebih baik dengan menyusun rancangan jadwal pembinaan sejak awal tahun.

4. Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja per Sasaran Tahun 2023-2025

Untuk melihat kinerja Deputi Bidang Statistik Sosial dilakukan dengan membandingkan target, realisasi, dan capaian kinerja selama beberapa tahun, yaitu tahun 2023-2025. Perbandingan tersebut secara detail dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7. Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja per Sasaran

Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja	Satuan	Target			Realisasi			Capaian Kinerja (%)		
		2023	2024	2025*)	2023	2024	2025	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Sasaran 1. Peningkatan pemanfaatan data dan insight Statistik Sosial yang Berkualitas									116.50	
Tingkat Pemanfaatan Data Statistik Sosial	Persen	N/A (Belum dijadikan indikator)	81.31	N/A (Belum dijadikan indikator)	94.73	N/A (Belum dijadikan indikator)	116.50			
Sasaran 2. Terwujudnya Penyelenggaraan Statistik Sektorale Kementerian/Lembaga									100.00	

Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja	Satuan	Target			Realisasi			Capaian Kinerja (%)		
		2023	2024	2025*)	2023	2024	2025	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Mitra Bidang Statistik Sosial yang berkualitas										
Persentase kenaikan rata-rata nilai IPS K/L Mitra Deputi Statistik Sosial dalam penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persen	N/A (Belum dijadikan indikator)		18.13	N/A (Belum dijadikan indikator)		18.13	N/A (Belum dijadikan indikator)		100.00

*) Sumber : Target PK Deputi Bidang Statistik Sosial 2025

Berdasarkan Tabel 7, terdapat dua sasaran dan dua Indikator Kinerja Utama (IKU) Deputi Bidang Statistik Sosial yang merupakan sasaran dan indikator baru yang ditetapkan pada tahun 2025 dan pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2023-2024 keduanya belum dijadikan indikator kinerja. Oleh karena itu, untuk target, realisasi, dan capaian kinerja per sasaran hanya terisi untuk tahun 2025 dan tidak bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Sasaran kegiatan Deputi Statistik Sosial yang pertama yaitu Peningkatan Pemanfaatan Data dan Insight Statistik Sosial yang Berkualitas dengan IKU Tingkat Pemanfaatan Data Statistik Sosial. Realisasi sasaran kinerja pertama/IKU pertama dapat mencapai target sebesar 94,73 persen dari target 81,21 persen sehingga diperoleh capaian kinerja sebesar 116,50 persen.

Adapun sasaran Deputi Bidang Statistik Sosial kedua yaitu Terwujudnya Penyelenggaraan Statistik Sektoral Kementerian/Lembaga Mitra Bidang Statistik Sosial yang berkualitas dengan IKU kedua yaitu Persentase kenaikan rata-rata nilai IPS K/L Mitra Deputi Statistik Sosial dalam penyelenggaraan Statistik Sektoral. Realisasinya sama dengan target yang ditetapkan yaitu sebesar 18,13 persen sehingga capaian kinerja yang diperoleh untuk sasaran kedua sebesar 100 persen.

5. Analisis Capaian Kinerja Deputi Bidang Statistik Sosial Tahun 2025 per IKU

a. Capaian Tingkat Pemanfaatan Data Statistik Sosial

Pengukuran Indikator Tingkat Pemanfaatan Data Statistik Sosial diukur melalui pemanfaatan data statistik sosial pada dokumen pemerintah untuk dasar perumusan kebijakan (UU, RPJPN, Perpres, RPJMN, Renstra K/L, RPJMD Provinsi, dan RKPD Provinsi) serta diukur dengan tingkat pemanfaatan data statistik sosial oleh pengguna data yang diperoleh melalui survei pemanfaatan data statistik.

Tabel 8. Tingkat Pemanfaatan Data Statistik Sosial pada Deputi Bidang Statistik Sosial, Tahun 2025

Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Sasaran 1. Peningkatan pemanfaatan data dan insight Statistik Sosial yang Berkualitas				
IKU 1. Tingkat Pemanfaatan Data Statistik Sosial	Persen	81,31	94,73	116,50

Capaian kinerja pada Sasaran 1/Indikator Kinerja Utama 1 menunjukkan hasil yang sangat positif dan melampaui target yang telah ditetapkan. Tingkat Pemanfaatan Data Statistik Sosial berhasil mencapai 94,73 persen, jauh di atas target sebesar 81,31 persen, sehingga menghasilkan capaian kinerja sebesar 116,50 persen. Kondisi ini mencerminkan meningkatnya kepercayaan dan kebutuhan pemangku kepentingan terhadap data serta insight Statistik Sosial dalam mendukung perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan yang berbasis bukti. Data Statistik Sosial tidak hanya tersedia, tetapi semakin dimanfaatkan secara luas dalam berbagai proses perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan. Capaian yang melampaui target ini menjadi indikator kuat bahwa peran Statistik Sosial semakin strategis dan memberikan kontribusi

nyata dalam mendukung kebijakan publik yang lebih tepat sasaran, terukur, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Berikut adalah hasil survei Tingkat pemanfaatan data statistik untuk Deputi Bidang Statistik Sosial yang dikeluarkan oleh Direktorat Diseminasi Statistik:

No	Unit Kerja	TPDS-dp	TPDS-u	TPDS
1	Deputi Bidang Statistik Sosial	98.57	79.36	94.73

Nilai Tingkat Pemanfaatan Data Statistik (TPDS) terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu Tingkat Pemanfaatan Data Statistik Dokumen Pemerintah (TPDS-dp) Tahun 2025 dan Tingkat Pemanfaatan Data Statistik Menurut Persepsi Pengguna (TPDS_u) dengan bobot masing-masing 80 persen dan 20 persen,

Tingkat Pemanfaatan Data Statistik Dokumen Pemerintah (TPDS-dp) Tahun 2025 sebagai berikut:

Unit Kerja	Jumlah Pi.Qi	Jumlah Dokumen	TPDS-dp
Deputi Bidang Statistik Sosial	69	70	98.57

Tingkat Pemanfaatan Data Statistik Menurut Persepsi Pengguna (TPDS_u)

Dimensi	Deputi Bidang Statistik Sosial
Distribusi dan Aksesibilitas	99.74
Relevansi	93.03
Frekuensi Penggunaan	39.28
Citra dan Kepercayaan	93.96
Dampak Pada Kebijakan	70.76
TPDS-u	79.36

Data statistik sosial di Deputi Bidang Statistik Sosial disediakan oleh Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Direktorat Kesejahteraan Rakyat, dan Direktorat Ketahanan Sosial dalam bentuk

publikasi/laporan. Meskipun semua publikasi/laporan dari semua direktorat pada Deputi Bidang Statistik Sosial tersebut dapat diselesaikan dengan baik, akan tetapi dalam penyusunannya masih ditemui berbagai kendala pada triwulan I-IV. Berbagai strategi dilakukan sebagai solusi untuk mengatasi kendala-kendala tersebut.

Kendala yang dihadapi serta solusi yang dilakukan oleh Deputi Bidang Statistik Sosial adalah sebagai berikut:

Kendala	Solusi
<ul style="list-style-type: none"> - Pada tahapan pengolahan data untuk publikasi, durasi cleaning raw data SAKERNAS Agustus 2025 melampaui estimasi awal akibat kompleksitas anomali data yang ditemukan pada tahap integrasi sehingga berdampak pada pergeseran jadwal tahapan proses bisnis statistik selanjutnya termasuk analisis dan diseminasi. 	<ul style="list-style-type: none"> - Penyesuaian timeline dalam penyusunan publikasi
<ul style="list-style-type: none"> - Pada publikasi yang memerlukan data sekunder dari K/L mitra, permintaan data sudah dilakukan sejak triwulan sebelumnya tetapi masih belum optimal kecepatan respon dari K/L mitra (eksternal), sehingga berdampak pada pergeseran timeline pemeriksaan publikasi dan jadwal rilis. 	<ul style="list-style-type: none"> - Penyesuaian jadwal rilis publikasi
<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah sampel Susenas yang bertambah untuk menyediakan data di DOB tidak sebanding dengan jumlah SDM - Pelaksanaan persiapan Susenas Maret 2026 bersamaan dengan audit kinerja oleh BPK di pusat dan 	<ul style="list-style-type: none"> - Melibatkan pegawai dari unit kerja Es. II lainnya yang terkait dengan materi kuesioner Susenas sebagai intama dan manajer kelas dalam pelatihan innas

Kendala	Solusi
<p>daerah, dengan banyaknya permintaan dokumen fokus tim Susenas menjadi terpecah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bencana banjir di Aceh dan Sumatera Utara mengakibatkan innas dari daerah tersebut tidak dapat mengikuti pelatihan dan tertundanya pengolahan Seruti triwulan IV 2025 - Karena tingginya permintaan data Susenas, publikasi hasil Susenas September 2024 dirilis lebih cepat dari jadwal ARC - Keterbatasan waktu dalam penyelesaian publikasi karena sebagian besar publikasi memiliki jadwal ARC yang berdekatan dan adanya kegiatan DTSEN - Podes: Sosialisasi hasil Podes 2025 sebagai salah satu media untuk mendiseminasikan hasil Podes tidak dapat dilaksanakan - Desa Cantik: (1) Website Desa Cantik yang belum bisa dirilis untuk Publik, (2) Proses Penyusunan Kepka dan Perka memakan waktu review kepka di JDIIH yang cukup lama, (3) Kendala dalam menentukan Target Desa Cantik binaan 2026 karena beberapa daerah tidak sanggup membina 3 desa/kelurahan 	<ul style="list-style-type: none"> - Membuat kelas pelatihan innas susulan untuk wilayah yang terdampak bencana - Mengirimkan nota dinas ke Direktorat Diseminasi Statistik untuk mengubah jadwal ARC - Memperketat jadwal penyelesaian publikasi - Podes: Diseminasi hasil podes 2025 tetap dilakukan melalui cara lain yaitu upload publikasi di website BPS - Desa Cantik: (1) Memberikan feedback Web Desa Cantik yang sudah dibuat dan menunggu kesiapan infrastruktur di Direktorat SIS, (2) Mengkomunikasikan melalui WA dengan PIC Hukum untuk follow up proses review Kepka dan Perka, (3) Melakukan konfirmasi usulan Target Desa Cantik binaan tahun 2026.

Kendala	Solusi
<p>mengingat padatnya kegiatan tahun 2026.</p> <ul style="list-style-type: none"> - SLHI: (1) Beberapa data sektoral dari K/L mengalami update, sehingga mengalami perbaikan dan perlu dientri kembali pada Publikasi SLHI 2025 (2) Beberapa data tidak konsisten dengan tahun sebelumnya, misalnya satuan yang berubah atau perbedaan angka yang melonjak/menurun tajam, sehingga perlu konfirmasi ulang dengan K/L penyedia data. - SDLP: (1) Jumlah desa tepi laut 2025 lebih rendah dibandingkan jumlah desa tepi laut 2024, secara logika tidak relevan, namun terjelaskan dengan tidak dilakukannya pendataan pada 152 desa karena kendala keamanan dan lainnya dan ditemukan data sekunder yang tidak konsisten, (2) Beragam pekerjaan minor dan mayor pada tahap pengolahan dan analisis, dengan waktu yang tumpang tindih ditambah dengan pekerjaan tambahan, baik teknis dan nonteknis, berpengaruh terhadap progres pekerjaan. Hal ini karena adanya perbedaan kapasitas masing-masing SDM, berpotensi membebani SDM dengan kapasitas yang mumpuni, 	<ul style="list-style-type: none"> - SLHI: (1) Menindaklanjuti hasil pemeriksaan silang data yang sudah dientri dalam Publikasi SLHI 2025, (2) Melakukan konfirmasi ulang dengan K/L penyedia data, (3) Mengupdate kembali data yang tidak konsisten berdasarkan hasil konfirmasi dari K/L penyedia data. - SDLP: (1) Mengikuti solusi dalam publikasi Podes yaitu memberikan penjelasan catatan di setiap tabel terkait. Data sekunder yang tidak konsisten diputuskan tidak dipakai karena dapat menimbulkan misleading bagi pengguna data, (2) SDM dengan kapasitas yang lebih kuat membantu SDM dengan kapasitas standar, (3) Melakukan pembagian waktu yang ketat dalam penggunaan akun, melakukan pendampingan melekat terhadap SDM yang membutuhkan dengan mengeluarkan effort yang relatif besar sehingga Pelaksanaan Penyusunan Publikasi Statistik Sumber Daya Laut dan Pesisir 2025 dapat diselesaikan dengan tuntas, baik, dan memberikan daya tarik khusus di tingkat Lembaga (BPS).

Kendala	Solusi
<p>(3) Pembatasan waktu reformat ke dalam indesign karena berbagi akun official BPS untuk adobe indesign, adanya revisi hasil pengolahan beberapa tabel yang cukup memberikan tambahan effort dalam aktivitas reformat ke dalam indesign.</p> <ul style="list-style-type: none"> - ALHB: Ada reuiu dan perbaikan dari pimpinan dan diseminasi terbatas waktu dengan jadwal rilis. - Statkrim: Data statistik peradilan pidana yang bersumber dari K/L belum seluruhnya tersedia hingga batas akhir penyusunan publikasi. - Statpol: (1) Ketersediaan data, khususnya data Pilkada tahun 2005 sampai dengan 2013, (2) Data hasil pilkada merupakan isu sensitif belakangan ini, khususnya data yang mencakup identitas pasangan calon kepala daerah, (3) Minimnya dokumentasi proses Pilkada sebelum tahun 2024 (4) Terbatasnya akun Indesign yang resmi sehingga layouting hanya dapat dikerjakan oleh 1 orang. - SPAK: Reuiu publikasi Analisis Petty Corruption dari pimpinan melewati batas tanggal upload publikasi pada Simotik. 	<ul style="list-style-type: none"> - ALHB: Menyegerakan melakukan perbaikan sehingga publikasi bisa dirilis tepat waktu. - Statkrim: Pembahasan mengenai statistik peradilan pidana tidak ditampilkan dalam publikasi Statistik Kriminal, dan dialihkan untuk disajikan dalam Laporan Kegiatan Data Tunggal Statistik Kriminal (DTSK) Tahun 2025. - Statpol: (1) Menyajikan data Pilkada yang tersedia di KPU dan ditambah dengan data dari berbagai media, (2) Konsultasi dengan Bawaslu dan DKPP terkait data terkait identitas pasangan calon kepala daerah yang dapat disajikan pada publikasi, (3) Mengajukan permintaan dokumentasi pilkada tahun 2015-2020 ke Bawaslu RI, (4) Menggunakan aplikasi indesign portable yang tidak resmi. - SPAK: Karena non ARC, publikasi masih aman dapat diupload pada bulan Desember.

Kendala	Solusi
<ul style="list-style-type: none"> - Penghitungan dan Analisis Kemiskinan Makro di Indonesia: (1) Kompleksitas indikator karakteristik kemiskinan (pendidikan, pekerjaan, kondisi perumahan, akses layanan dasar) menuntut kehati-hatian dalam pemilihan variabel agar selaras dengan konsep dan definisi statistik resmi, (2) Diperlukannya pencermatan berlapis untuk memastikan konsistensi angka, konsep, definisi, dan narasi analisis antara bab, tabel, dan infografik, sehingga proses finalisasi membutuhkan waktu yang relatif panjang. - Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/ Kota: (1) Semakin menurunnya tingkat kemiskinan di sejumlah kabupaten/kota berdampak pada semakin kecilnya jumlah sampel rumah tangga miskin dalam data Susenas Maret 2025. Kondisi ini menyebabkan meningkatnya Relative Standard Error (RSE) pada beberapa indikator karakteristik kemiskinan di tingkat kabupaten/kota, sehingga membatasi ketajaman analisis dan ruang interpretasi hasil, khususnya untuk wilayah dengan tingkat kemiskinan relatif rendah, (2) 	<ul style="list-style-type: none"> - Penghitungan dan Analisis Kemiskinan Makro di Indonesia: (1) Menyusun prioritas indikator karakteristik kemiskinan yang paling relevan dan sering digunakan dalam analisis kebijakan, dengan tetap mengacu pada konsep dan definisi BPS, (2) Mengoptimalkan koordinasi melalui pembagian peran yang jelas antara penulis dan penelaah, serta penerapan rolling review untuk mempercepat konsolidasi masukan. - Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/ Kota: (1) Menerapkan pengendalian kualitas estimasi dengan menjadikan indikator karakteristik kemiskinan yang memiliki nilai Relative Standard Error (RSE) tidak memenuhi kriteria sebagai NA (Not Available), (2) Mengoptimalkan koordinasi melalui pembagian peran yang jelas antara penulis dan penelaah, serta penerapan rolling review untuk mempercepat konsolidasi masukan

Kendala	Solusi
<p>Diperlukannya pencermatan berlapis untuk memastikan konsistensi angka, konsep, definisi, dan narasi analisis antara bab, tabel, dan infografik, sehingga proses finalisasi membutuhkan waktu yang relatif panjang.</p>	

Rencana Tindak Lanjut

Rekomendasi perbaikan kinerja berupa rencana tindak lanjut (RTL) yang akan dilaksanakan pada tahun 2026 oleh masing-masing direktorat, dengan uraian sebagai berikut:

- a. Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan
 1. Persiapan kegiatan pembinaan statistik sektoral tahun 2026 dengan melakukan penataan prioritas, penyesuaian materi, serta perencanaan pembinaan yang lebih terstruktur agar pelaksanaan pembinaan dapat berjalan efektif dan merata.
 2. Pembinaan K/L mitra dalam persiapan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) sebelum masa penilaian
- b. Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat
 1. Menambah jumlah anggota Tim Susenas pada tahun 2026
 2. Menyelenggarakan kelas pelatihan innas susulan dengan Pusdiklat BPS
 3. Menyesuaikan kembali jadwal ARC Publikasi agar tidak tumpang tindih
- c. Direktorat Statistik Ketahanan Sosial
 1. Podes:
 - Pengiriman surat kegiatan Podes 2026 ke Daerah (jadwal kegiatan, alokasi petugas dll)
 - Rapat Interkementerian tentang Kebutuhan Data pada Podes 2026
 - Penyusunan Kuesioner Podes 2026
 - Penyusunan buku pedoman Podes 2026
 - Penyusunan bahan ajar Podes 2026

- Penyusunan QG Podes 2026-
- 2. Desa Cantik: Persiapan Kegiatan Desa Cantik 2026 (catatan: mulai tahun 2026 kegiatan desa cantik tidak masuk ke IKU 1, masuk ke IKU lain terkait desa cantik)
- 3. SLHI: Melakukan evaluasi penyusunan Publikasi SLHI 2026
- 4. SDLP:
 - Melaksanakan evaluasi tahap persiapan SDLP 2025 untuk persiapan penyusunan SDLP 2026.
 - Melaksanakan evaluasi tahap pengumpulan data SDLP 2025 untuk persiapan penyusunan SDLP 2026.
 - Melaksanakan evaluasi tahap pengolahan dan analisis data SDLP 2025 untuk persiapan penyusunan SDLP 2026.
 - Melaksanakan review kinerja tahap diseminasi dan evaluasi SDLP 2025 untuk persiapan penyusunan SDLP 2026.
- 5. ALHB: Rapat Pembahasan Persiapan kegiatan ALHB tahun 2026
- 6. Statkrim:
 - Rapat pembahasan persiapan kegiatan Statistik Kriminal 2026
 - Pengiriman surat kegiatan Statistik Politik dan Keamanan ke daerah
 - Penyusunan Kuesioner Statistik Politik dan Keamanan 2026
 - Penyusunan webentry Simonpolkam 2026
- 7. Statpol:
 - Rapat pembahasan persiapan kegiatan Statistik Politik 2026.
 - Pengiriman surat kegiatan Statistik Politik dan Keamanan ke daerah.
 - Penyusunan Kuesioner Statistik Politik dan Keamanan 2026.
 - Penyusunan webentry Simonpolkam 2026
- 8. SPAK: Melakukan Persiapan kegiatan SPAK 2026
- 9. Penghitungan dan Analisis Kemiskinan Makro di Indonesia: Menyusun perbandingan (trend analysis) karakteristik penduduk miskin antar periode untuk mengidentifikasi perubahan pola kemiskinan secara spasial dan demografis
- 10. Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/ Kota: Menyusun perbandingan (trend analysis) karakteristik penduduk miskin antar

periode untuk mengidentifikasi perubahan pola kemiskinan secara spasial dan demografis

11. Rilis Kemiskinan Juli:

- Penyusunan Timeline BRS Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2026
- Penyusunan program pengolahan Kemiskinan
- Penyusunan Lembar Kerja Tabel Makro Kemiskinan Maret 2026
- Penyusunan format bahan dukung rilis kemiskinan untuk BPS daerah
- Melakukan review sintaks pengolahan

12. Rilis Ketimpangan Juli:

- Penyusunan timeline kegiatan penyusunan BRS Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Indonesia Maret 2025
- Penyusunan program pengolahan ketimpangan Maret 2025
- Penyusunan Lembar Kerja Tabel Makro Ketimpangan Maret 2025
- Melakukan review sintaks pengolahan

b. Capaian Persentase Kenaikan Rata-rata Nilai IPS K/L Mitra Deputi Statistik Sosial dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Capaian kinerja pada IKU 2 yaitu persentase kenaikan rata-rata nilai IPS K/L mitra Deputi Statistik Sosial dalam penyelenggaraan statistik sektoral disajikan dalam tabel berikut:

Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Sasaran 2. Terwujudnya Penyelenggaraan Statistik Sektoral Kementerian/Lembaga Mitra Bidang Statistik Sosial yang berkualitas				
IKU 2. Persentase kenaikan rata-rata nilai IPS K/L Mitra Deputi Statistik Sosial dalam penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persen	18,13	18,13	100,00

Pada Deputi Bidang Statistik Sosial, target, realisasi, dan capaian untuk indikator ini adalah persentase kenaikan rata-rata nilai IPS K/L mitra Deputi Bidang Statistik Sosial. Kegiatan penilaian sudah selesai dilaksanakan pada tahun 2024 dan pada tahun 2025 tidak dilakukan penilaian EPSS, sehingga rata-rata peningkatan nilai IPS menggunakan nilai tahun 2023-2024. Peningkatan rata-rata nilai IPS ini mencerminkan adanya peningkatan kualitas tata kelola statistik sektoral pada K/L mitra, termasuk dalam aspek standar, metodologi, kualitas data, serta koordinasi dalam kerangka Sistem Statistik Nasional. Capaian ini akan terus ditingkatkan melalui proses pembinaan yang dilakukan secara terarah dan berkelanjutan, sehingga mampu menjaga konsistensi peningkatan kualitas statistik sektoral. Ke depan, capaian ini menjadi fondasi penting untuk terus mendorong integrasi, harmonisasi, dan pemanfaatan data sektoral yang semakin andal, terpadu, dan mendukung pengambilan kebijakan berbasis data.

Sementara itu kegiatan pembinaan sektoral tetap dilakukan di masing-masing direktorat untuk mengukur tingkat keberhasilan pembinaan statistik sektoral. Dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan sektoral terdapat kendala yang dihadapi serta solusi yang sudah dilakukan.

Berikut adalah kendala dan solusi dalam kegiatan pembinaan statistik sektoral yang dilakukan di lingkungan Deputi Bidang Statistik Sosial.

Kendala	Solusi
<ul style="list-style-type: none"> - Pada Triwulan IV terdapat peningkatan permintaan pembinaan statistik sektoral tematik yang tidak direncanakan di awal (ad hoc) dari berbagai K/L dengan cakupan dan kebutuhan yang beragam sehingga berdampak pada : - Adanya benturan jadwal yang sudah dialokasikan sebelumnya kepada tim PSS 	<ul style="list-style-type: none"> - Realokasi anggota tim PSS untuk melakukan pembinaan terhadap K/L Mitra dan penyelesaian administrasi - Pembagian tanggungjawab sebagai PIC K/L disesuaikan dengan beban kerja - Peran aktif dari BPS untuk terus berkoordinasi dan berkomunikasi dengan Kepolisian RI untuk menjadwalkan pembinaan.

<ul style="list-style-type: none"> - Proses administrasi yang cenderung menumpuk di periode akhir tahun. - Jumlah anggota tim PSS lebih sedikit dibandingkan jumlah K/L yang menjadi lokus pembinaan - Pelaksanaan kegiatan harus menyesuaikan dengan jadwal K/L, sehingga terkadang realisasi pelaksanaan kegiatan mundur dari jadwal yang sudah direncanakan. - Pelaksanaan pembinaan terkait EPSS yang mengundang semua K/L sekaligus tidak dapat dilaksanakan secara luring karena tidak tersedia anggaran fullday. 	<ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan pembinaan secara luring dengan mengunjungi K/L, tetapi jika jadwal K/L tidak memungkinkan maka pembinaan dapat dilakukan secara daring.
---	---

Rencana tindak lanjut untuk kegiatan pembinaan statistik sektoral yang diimplementasikan pada setiap direktorat adalah sebagai berikut:

- a. Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan
 1. Persiapan kegiatan pembinaan statistik sektoral tahun 2026 dengan melakukan penataan prioritas, penyesuaian materi, serta perencanaan pembinaan yang lebih terstruktur agar pelaksanaan pembinaan dapat berjalan efektif dan merata.
 2. Pembinaan K/L mitra dalam persiapan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) sebelum masa penilaian
- b. Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat

Menambah jumlah anggota tim sesuai jumlah K/L yang menjadi lokus pembinaan
- c. Direktorat Statistik Ketahanan Sosial
 1. Perencanaan kegiatan pembinaan untuk topik EPSS
 2. Menyusun Laporan Kegiatan Pembinaan Statistik Sektoral
 3. Koordinasi dengan Divtik selaku walidata POLRI untuk meningkatkan pemahaman tentang urgensi Pembinaan Statistik Sektoral

4. Penjadwalan ulang untuk pelaksanaan kegiatan Sistem Statistik Nasional di POLRI

3.2 Capaian Kinerja Deputi Bidang Statistik Sosial Terhadap Target Rencana Strategis (Renstra)

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Deputi Bidang Statistik Sosial tahun 2025–2029, serta mendukung pencapaian RPJMN tahun 2025–2029, Deputi Bidang Statistik Sosial berkontribusi pada 2 (dua) sasaran strategis dan 2 (dua) sasaran program yang mencerminkan hasil dari program dan kegiatan Deputi Bidang Statistik Sosial. Capaian kinerja Deputi Bidang Statistik Sosial terhadap target Renstra disajikan pada tabel berikut:

Tabel 9. Capaian Kinerja Deputi Bidang Statistik Sosial Tahun 2025 terhadap Target Renstra

Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025*)	Target 2029*)	Realisasi 2025	Capaian Terhadap Target 2025	Capaian Terhadap Target 2029
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Peningkatan Pemanfaatan data dan Insight Statistik Sosial yang berkualitas					116,50	106,26
Tingkat Pemanfaatan Data Statistik Sosial	Persen	81,31	89,15	94,73	116,50	106,26
Terwujudnya Penyelenggaraan Statistik Sektoral Kementerian/Lembaga Mitra Deputi Bidang Statistik Sosial yang Berkualitas					100,00	91,89
Persentase Kenaikan Rata-Rata Nilai IPS K/L Mitra Deputi Bidang Statistik Sosial dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persen	18,13	19,73	18,13	100,00	91,89

*) Diambil dari : Target Renstra sesuai surat Plt. Sestama Nomor B-142/02000/PR.110/2025 tanggal 14 Maret 2025, hal : Penyampaian Metadata IKU, Konfirmasi Baseline, Target IKU 2025-2029, dan Indikator Proksi IKU

Dari tabel 9 terlihat bahwa pada Tingkat Pemanfaatan Data Statistik Sosial capaian kinerja sudah melebihi target yaitu sudah mencapai 116,50 persen, bahkan capaian target sudah melebihi target tahun 2029. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas, relevansi, dan pemanfaatan data Statistik Sosial berkembang sangat positif, bahkan telah melampaui target kinerja yang direncanakan. Kondisi ini mencerminkan meningkatnya kepercayaan dan kebutuhan pemangku kepentingan terhadap data Statistik Sosial sebagai dasar perumusan kebijakan berbasis bukti.

Indikator kedua yaitu Persentase Kenaikan Rata-Rata Nilai IPS K/L Mitra Deputi Bidang Statistik Sosial dalam Penyelenggaraan Statistik Sektor realisasi tahun 2025 sudah mencapai 100 persen tetapi jika dibandingkan dengan target tahun 2029 baru mencapai 91,89 persen. Capaian ini menunjukkan bahwa proses pembinaan, koordinasi, dan harmonisasi statistik sektoral berjalan sesuai rencana dan berada pada jalur yang tepat menuju target jangka menengah.

Secara keseluruhan, capaian kinerja Deputi Bidang Statistik Sosial sampai dengan tahun 2025 menunjukkan hasil yang sangat baik, dengan sebagian besar sasaran kegiatan telah mencapai atau melampaui target yang ditetapkan dalam Renstra. Capaian tersebut menjadi dasar yang kuat bagi Deputi Bidang Statistik Sosial dalam melanjutkan pelaksanaan program dan kegiatan pada periode berikutnya guna mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional.

Faktor pendorong dalam mencapai target adalah pada Deputi Bidang Statistik Sosial adalah sebagai berikut:

1. Semakin optimalnya pemanfaatan digitalisasi dalam proses bisnis statistik, baik pada tahap pengumpulan dengan penerapan moda CAPI, pengolahan data terintegrasi, *dashboard monitoring* dan evaluasi pada pelaksanaan survei maupun diseminasi data. Pengalaman dalam penerapan moda CAPI, pengolahan data terintegrasi, serta pengembangan dashboard monitoring dan evaluasi pada pelaksanaan survei menjadi modal penting untuk meningkatkan efisiensi, ketepatan waktu, dan kualitas data, sekaligus mendukung pengendalian kualitas secara real time pada tahun 2025. Kesemua faktor tersebut mendukung tercapainya target pada Sasaran 1, yaitu terwujudnya penyediaan data dan informasi statistik kependudukan dan ketenagakerjaan yang berkualitas.

2. Koordinasi dan sinergi yang kuat antara unit kerja di lingkungan BPS serta dengan kementerian/lembaga mitra turut mempercepat pencapaian target pada Sasaran 3. Ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten dan berpengalaman, didukung oleh perencanaan kegiatan yang matang dan terarah, juga menjadi faktor kunci dalam menjaga kualitas dan ketepatan waktu pelaksanaan program dan kegiatan pada Sasaran 3. Selain itu, pelaporan kegiatan Pembinaan Statistik Sektorial yang tepat waktu juga menjadi salah satu faktor tercapainya target pada Sasaran 3.
3. Kolaborasi dengan lembaga nasional maupun internasional guna menghasilkan indikator maupun metode baru. Kolaborasi yang dilaksanakan di antara dengan Forum Masyarakat Statistik dan World Bank dalam penghitungan kemiskinan ekstrem, *United Nations Crime Trend Survey* (UN CTS) dan *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) dalam menghasilkan data statistik kriminal, dan sebagainya.
4. Deputi Bidang Statistik Sosial berpotensi banyak indikator strategis yang mendukung RPJPN dan SDGs. Hal ini selaras dengan kepercayaan pemerintah yang menjadikan BPS sebagai sumber data rujukan dalam rangka RPJPN 2025-2045. Di antara indikator yang dihasilkan Direktorat Statistik Ketahanan sosial untuk mendukung RPJPN antara lain *gini ratio*, kemiskinan, Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK), Indeks Demokrasi Indonesia (IDI), dan sebagainya. Selain itu, juga banyak menghasilkan indikator yang mendukung SDGs seperti data Jumlah desa tertinggal, Indeks Kebebasan, Indeks Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi, kemiskinan, dan lain sebagainya.
5. Tersedianya sumber daya yang mumpuni dengan kualifikasi pendidikan tinggi dan keahlian serta keterampilan khusus yang dapat memperlancar pelaksanaan kegiatan dan pekerjaan, baik yang bersifat rutin seperti pelaksanaan kegiatan survei maupun penyusunan publikasi, kegiatan ad-hoc maupun keterlibatan pegawai sebagai perwakilan Deputi Bidang Statistik Sosial untuk menjadi narasumber maupun partisipan dalam beberapa forum internasional (UNESCAP, UNSC, SESRIC, dan *UN expert group meeting, working group*, dan lain sebagainya);
6. Melakukan perencanaan sebelum melakukan kegiatan. Pada awal tahun dilakukan identifikasi kegiatan tahun 2025. Setelah identifikasi kegiatan kemudian dibentuk tim, yang anggota tim tidak ada tumpang tindih, sehingga ketua tim dapat mengatur

anggotanya secara penuh. Semua tim segera menyusun jadwal rancangan kegiatan yang akan dilakukan selama setahun.

Selain faktor pendorong, Deputi Bidang Statistik Sosial juga memiliki faktor penghambat dalam melaksanakan kegiatannya. Faktor tersebut sebagai berikut:

1. Data yang kurang akurat atau tidak relevan dapat mengurangi kepercayaan pemangku kepentingan terhadap data;
2. Pemangku kepentingan mungkin tidak memanfaatkan data statistik sosial secara optimal karena kurangnya pemahaman mengenai penggunaan data atau insight;
3. Ketidakpercayaan terhadap data yang dapat timbul akibat persepsi bias atau independensi yang diragukan;
4. Ketidakefahaman antar-instansi mengenai standar statistik dapat mengurangi integrasi SSN;
5. Ketimpangan kemampuan teknis SDM statistik antar Kementerian/Lembaga dapat menghasilkan kualitas data statistik sektoral bidang sosial yang tidak standar;
6. Kebijakan berupa penghematan anggaran dapat mempengaruhi kegiatan, di antaranya frekuensi dan pelaksanaan, yang mendukung pencapaian target kinerja;
7. Ketersediaan data dari unit lain (K/L maupun Direktorat) yang terlambat dari jadwal sehingga dapat menghambat penyusunan publikasi yang menggunakan data tersebut;
8. Hambatan pada pelaksanaan kegiatan lapangan di daerah (keterbatasan SDM maupun jadwal yang tumpang tindih) yang mempengaruhi hasil dan capaian di BPS Pusat.

3.3 Capaian Prioritas Nasional dan Prioritas Presiden, dan Isu Strategis Nasional Tahun 2025

Bagian ini menyajikan gambaran capaian Deputi Bidang Statistik Sosial dalam mendukung Prioritas Nasional dan Prioritas Presiden, serta merespons Isu Strategis Nasional Tahun 2025. Uraian difokuskan pada kontribusi nyata yang telah dihasilkan

melalui berbagai output kegiatan statistik sosial, sekaligus mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya, solusi yang telah ditempuh, serta rencana tindak lanjut ke depan. Untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif dan terstruktur, pembahasan pada bagian ini dirinci menurut masing-masing direktorat, yaitu Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat, dan Direktorat Statistik Ketahanan Sosial, sesuai dengan peran dan lingkup tugasnya dalam mendukung pencapaian agenda pembangunan nasional.

3.3.1. Output yang Sudah Dihasilkan

Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan

1. Output Prioritas Nasional : Pembinaan Statistik Sektoral

Pada tahun 2025, Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan melaksanakan pembinaan statistik sektoral kepada enam kementerian/lembaga, yaitu Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, dan Kementerian Luar Negeri. Output Pembinaan statistik yang dilaksanakan meliputi:

- a. Pembinaan statistik baik yang dilakukan dalam internal BPS maupun eksternal BPS
- b. Upaya pembinaan statistik meliputi:
 - Peningkatan kemampuan SDM dalam penyelenggaraan statistik secara internal melalui :
 - 1) Internalisasi Pelaksanaan PSS 2025 kepada anggota tim pembina statistik sektoral
 - 2) Kickoff Meeting Pembinaan Statistik Sektoral Tahun 2025 yang diikuti oleh Tim Pembina dan Walidata Kementerian/lembaga
 - 3) Internalisasi Petunjuk Teknis Pembinaan Statistik Sektoral yang diikuti oleh tim pembina
 - 4) Internalisasi Aplikasi dan Monitoring Evaluasi Pembinaan Statistik Sektoral yang diikuti oleh tim pembina

- 5) Internalisasi Penyelenggaraan Satu Data Indonesia yang diikuti oleh tim pembina
 - 6) Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Pembinaan Statistik Sektor 2025 yang diikuti oleh tim pembina
- Perwujudan kondisi yang mendukung terbentuknya pembakuan dan pengembangan konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran-ukuran dalam kerangka semangat kerjasama dengan para penyelenggara kegiatan statistik di kementerian/Lembaga binaan
 - 1) Pembahasan Identifikasi Kegiatan Statistik Sektor di 6 K/L binaan
 - 2) Pembinaan Prinsip Satu Data Indonesia untuk 6 K/L binaan
 - 3) Pembinaan Sistem Statistik Nasional untuk 6 K/L binaan
 - 4) Pembinaan Proses Bisnis Statistik untuk 6 K/L binaan
 - 5) Pembinaan Kualitas Data untuk 6 K/L binaan
 - 6) Pembinaan Kelembagaan untuk 6 K/L binaan
 - 7) Lokakarya Penyusunan Metadata, Perumusan Rekomendasi kegiatan Statistik, dan Strategi Peningkatan Penyelenggaraan Statistik Sosial di Kementerian Luar Negeri
 - Peningkatan kemampuan penggunaan dan pemanfaatan hasil statistik
 - 1) Fasilitasi pelatihan Statistika Dasar dan Sektor 2025 bagi Pejabat Fungsional Pranata Informasi Diplomatik (PID) Kementerian Luar Negeri
 - 2) Pembahasan kerja sama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dan BKKBN dan Badan Pusat Statistik mengenai Mekanisme Pertukaran Data
 - 3) Rapat Penguatan Koordinasi Statistik Sektor di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
 - 4) Pembinaan Penyelenggaraan Statistik Sektor Kemendukbangga/BKKBN
 - 5) Fasilitasi Forum Satu Data Kementerian Luar Negeri: Arah Strategis Pengembangan Ekosistem Big Data Kementerian Luar Negeri
 - 6) Rapat Evaluasi Pembinaan Statistik Sektor dan Persiapan Evaluasi Pembinaan Statistik Sektor (EPSS) 2026

- 7) Pembinaan Pengolahan dan Penyajian Data Kementerian Luar Negeri
- 8) Narasumber Rapat Koordinasi Persiapan Evaluasi Satu Data Indonesia dan Peningkatan Tata Kelola Data di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
- 9) Narasumber Forum Satu Data Jilid II dan Sosialisasi EPSS di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
- 10) Narasumber pada Rapat Koordinasi Pengolahan dan Analisis Hasil Pendataan Lengkap Gastrodiplomasi Indonesia Kementerian Luar Negeri
- 11) Narasumber pada Forum Satu Data Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan
- 12) Fasilitasi Kegiatan Public Hearing Pengembangan Survei Citra Indonesia sebagai narasumber
- 13) Indikator Pembangunan Prioritas Nasional: Diplomasi Asta Cita dan Diplomasi Ekonomi pada RPJMN 2025-2029 Kementerian Luar Negeri

2. Output Prioritas Presiden

a. Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN)

Visi Presiden 2025–2029, “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”, menekankan pentingnya kerja sama seluruh elemen bangsa untuk melanjutkan fondasi pembangunan sebelumnya guna mewujudkan Indonesia sebagai negara maju pada 2045. Visi ini diwujudkan melalui delapan Asta Cita yang mencakup 17 program prioritas dan Quick Wins lintas sektor untuk menjawab tantangan pembangunan secara cepat, tepat, dan terukur. Berikut 17 agenda prioritas presiden yang dimaksud adalah:

- 1) Mencapai Swasembada Pangan, Energi dan air.
- 2) Peyempurnaan Sistem Penerimaan Negara
- 3) Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi
- 4) Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
- 5) Pemberantasan kemiskinan
- 6) Pencegahan dan pemberantasan narkoba

- 7) menjamin tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat indonesia: peningkatan BPJS Kesehatan dan penyediaan obat untuk rakyat.
- 8) Penguatan pendidikan, Sains dan Teknologi serta digitalisasi
- 9) Penguatan pertahanan dan keamanan negara dan pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif.
- 10)Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak serta penyandang disabilitas.
- 11)Menjamin pelestarian lingkungan hidup
- 12)Menjamin ketersediaan pupuk, benih dan pestisida langsung ke Petani.
- 13)Menjamin Pembangunan Hunian Berkualitas Terjangkau Bersanitasi Baik untuk masyarakat perdesaan/perkotaan dan Rakyat yang membutuhkan.
- 14)Melanjutkan pemerataan ekonomi dan Penguatan UMKM melalui Program Kredit Usaha dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) serta kota-kota Inovatif-karakteristik-mandiri lainnya.
- 15)Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasis Sumber Daya Alam (SDA), termasuk Sumber Daya Maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi.
- 16)Memastikan kerukunan antar umat beragama, kebebasan beribadah, pendirian dan perawatan rumah ibadah.
- 17)Pelestarian Seni Budaya, peningkatan ekonomi kreatif dan peningkatan prestasi olahraga.

Lebih lanjut, Badan Pusat Statistik mendukung 11 program prioritas presiden yaitu dengan cara mendorong pencapaian pembangunan melalui perencanaan, anggaran, dan kinerja yang selaras dan tepat dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Makan Bergizi Gratis (MBG)
- 2) Koperasi Desa Merah Putih
- 3) Sekolah unggul garuda
- 4) Cek Kesehatan Gratis (CKG)
- 5) Pembangunan Rumah Sakit berkualitas

- 6) Pembangunan bendungan dan irigasi
- 7) Program 3 juta rumah
- 8) Sekolah rakyat
- 9) Rehabilitasi sekolah
- 10) Penuntasan tuberkulosis (TBC)
- 11) Lumbung Pangan

Pada tahun 2025 Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan, ikut terlibat dalam kegiatan pengelolaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional. Keterlibatan tersebut antara lain, sebagai PIC untuk beberapa KL seperti Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN, BPJS Ketenagakerjaan, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil)– Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Luar Negeri. Selain itu Duknaker juga menyediakan hasil survei untuk dimanfaatkan sebagai salah satu sumber pembaruan DTSEN di tahun 2025, antara lain Sakernas Februari 2025, Sakernas Agustus 2025, dan Supas 2025.

- Kemnaker: melakukan koordinasi terkait pemadanan data yang bersumber dari kemnaker untuk dipadankan dengan DTSEN.
- BP2MI: melakukan koordinasi terkait pemadanan data yang bersumber dari BP2MI untuk dipadankan dengan DTSEN.
- KPU: melakukan koordinasi terkait pemadanan data yang bersumber dari KPU untuk dipadankan dengan DTSEN.
- Kemendukbangga: melakukan koordinasi terkait pemadanan data yang bersumber dari Kemendukbangga untuk dipadankan dengan DTSEN.
- BPJS Ketenagakerjaan: melakukan koordinasi terkait pemadanan data yang bersumber dari BPJS Ketenagakerjaan untuk dipadankan dengan DTSEN.

- Dukcapil-Kemendagri: melakukan koordinasi terkait verifikasi data NIK untuk pembaruan DTSEN untuk dipadankan dengan data SIAK Dukcapil.

b. Makan Bergizi Gratis (MBG)

Kontribusi Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan dalam kegiatan Makan Bergizi Gratis (MBG) menghasilkan berbagai output strategis yang mendukung penyediaan data dan informasi bagi pengambilan kebijakan. Output tersebut meliputi penyusunan buku pedoman pelaksanaan survei sebagai acuan teknis pelaksanaan di lapangan, ketersediaan raw data hasil pendataan yang telah melalui proses cleaning untuk menjamin kualitas dan konsistensi data, serta laporan supervisi sebagai bahan evaluasi dan perbaikan pelaksanaan kegiatan. Selain itu, juga turut berperan dalam menghasilkan tabulasi dan penyajian tabel-tabel analitis yang dilaporkan secara berkala kepada pimpinan sebagai dasar pemantauan dan perumusan tindak lanjut program MBG.

3. Output Isu Strategis Nasional: Output Pendataan Penduduk Ibu Kota Nusantara (PPIKN)

Terdapat beberapa output yang dihasilkan BPS dalam mendukung isu strategis nasional yaitu:

- 1) Sesuai dengan Undang-Undang No.16 Tahun 1997 tentang statistik Kegiatan sensus ekonomi informasi yang menghasilkan indikator : struktur ekonomi, informasi karakteristik usaha dan informasi ekonomi digital dan ekonomi lingkungan.
- 2) Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) output yang dihasilkan: Notulensi rapat/diskusi, dataset inventori GRK Indonesia 2019-2023, Indikator inti berupa intensitas emisi GRK. Publikasi resmi BPS: Neraca Arus Energi dan Neraca Emisi GRK Indonesia 2019-2023 (Rilis Juni 2025)
- 3) Perpres No.7 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Perpres No. 61 Tahun 2024 Tentang Neraca Komoditas Dan Perpres No. 17 Tahun 2025 Tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional, output yang dihasilkan:

Data Komoditas pangan yang meliputi gula, pergaraman, jagung, beras, daging lembu, perikanan dan bawang putih.

- 4) Sensus Ekonomi output yang dihasilkan pada tahun 2025 adalah instrumen dan proses bisnis pendataan lapangan yang siap digunakan untuk pelaksanaan SE2026.
- 5) Dari isu terkini salah satu aktivitas yang dilakukan adalah IKN sebagai pusat pemerintahan baru maka perlu dirumuskan kebijakan dalam rangka penyediaan data dan indikator untuk wilayah IKN dan merumuskan kebijakan dalam penyediaan indikator untuk penyajian wilayah kecil (small area estimation). Sedangkan output yang dihasilkan adalah penggunaan CAPI dan penggunaan Mobile Positioning Data (MPD).

Termasuk didalam tugas dan fungsi pekerjaan Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan terkait isu strategis nasional yaitu :

- 1) Pelaksanaan Pendataan Penduduk Ibu Kota Nusantara (PPIKN) pada tahun 2025 sesuai dengan Nota Kesepahaman OIKN dan BPS Nomor 005/MoU/OIKN-BPS/VI/2025 dan Nomor 33/HK.610/NK/07/2025 Tanggal 3 Juni 2025 tentang Penyediaan, Pemanfaatan, dan Pengembangan Data dan/atau Informasi Statistik dengan output sebagai berikut:
 - Tersedianya data penduduk secara lengkap pada wilayah Otorita Ibukota Nusantara beserta karakteristik demografinya.
 - Tersedianya data dan indikator kependudukan.
 - Tersedianya geotagging rumah tangga untuk intervensi kebijakan secara langsung.
 - Tersedianya frame untuk survei strategis yang akan menghasilkan indikator wilayah IKN.

Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat

1. Output prioritas nasional: Pembinaan Statistik Sektor

Dalam mendukung pencapaian Prioritas Nasional sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2025–2029, Badan Pusat Statistik (BPS) berperan sebagai Pembina Data Statistik sesuai Perpres No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Dalam tatanan Sistem Statistik Nasional (SSN), pembinaan statistik

merupakan salah satu upaya implementasi aspek Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi, dan Standarisasi (KISS) dalam penyediaan data dan informasi statistik. Tujuannya adalah meningkatkan kompetensi penyelenggara statistik sektoral, meningkatkan kualitas statistik sektoral, dan menghasilkan data sektoral yang berkualitas dan dapat dipercaya. Sejalan dengan hal tersebut, Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat turut mendukung pencapaian Prioritas Nasional melalui perannya sebagai pembina statistik sektoral pada kementerian/lembaga. Pembinaan Statistik Sektoral dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral melalui penguatan tata kelola, standarisasi konsep dan definisi, serta peningkatan kualitas data yang dihasilkan.

Pada tahun 2025, Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat melaksanakan pembinaan statistik sektoral kepada tujuh kementerian/lembaga, yaitu Kementerian Kesehatan; Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Kementerian Kebudayaan; Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah; Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi; Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; serta Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Pembinaan ini bertujuan untuk memastikan tersedianya data sektoral yang berkualitas, selaras dengan standar statistik nasional, serta mendukung perumusan kebijakan berbasis bukti dalam rangka pencapaian sasaran Prioritas Nasional.

Output kegiatan pembinaan yang dilaksanakan meliputi internalisasi dan pembinaan statistik sektoral kepada seluruh pegawai Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat; pelaksanaan workshop Pembinaan Statistik Sektoral kepada seluruh kementerian/lembaga yang menjadi lokus pembinaan; pelaksanaan rapat koordinasi dan identifikasi kegiatan statistik sektoral pada seluruh kementerian/lembaga lokus pembinaan; serta pelaksanaan penilaian mandiri Penyelenggaraan Statistik Berkualitas beserta pengumpulan bukti dukungannya.

Nilai Tingkat Penyelenggaraan Pembinaan Statistik Sektoral sesuai Standar untuk Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat pada Triwulan IV 2025

sebesar 95,79 poin, di atas target yang ditetapkan sebesar 80 poin. Pada tahun 2025 tidak dilakukan penilaian IPS sehingga dasar hitung untuk tahun 2025 kenaikan rata-rata nilai IPS K/L mitra dihitung dari kenaikan nilai IPS 2023–2024 pada kementerian/lembaga yang bukan merupakan K/L baru yaitu Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

2. Output prioritas presiden:

a. Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN)

Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) menyediakan data seluruh keluarga yang diperingkatkan berdasarkan tingkat kesejahteraannya menjadi desil 1 sampai dengan desil 10, sehingga dapat dimanfaatkan untuk penargetan berbagai program pemerintah, sebagaimana diamanatkan Inpres Nomor 4 tahun 2025. Pemanfaatan DTSEN telah dilakukan melalui kolaborasi lintas sektor, antara lain untuk penyaluran bantuan sosial sembako dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) oleh Kementerian Sosial, penyediaan data dan pemanfaatan data statistik untuk mendukung program pemerintah dalam pemenuhan perumahan bagi guru, penyediaan dan pemutakhiran data dan/atau informasi statistik tenaga kesehatan serta penyelenggaraan perumahan bagi tenaga kesehatan, program bantuan perumahan untuk buruh, program bantuan perumahan untuk pekerja migran Indonesia, serta program bantuan perumahan untuk wartawan.

Di dalam tim penyelenggaraan Sekolah Rakyat, BPS merupakan bagian dari Satgas Peserta Didik yang bertugas melakukan pepadanan data calon peserta didik Sekolah Rakyat dengan DTSEN dan memberikan informasi mengenai peringkat kesejahteraan keluarganya. Selain itu, BPS memberikan dukungan kepada Kementerian Sosial dalam pelaksanaan verifikasi lapangan calon peserta didik Sekolah Rakyat. Hasil verifikasi selanjutnya dipadankan dengan DTSEN dan menghasilkan profil siswa sekolah rakyat. Verifikasi sekolah rakyat telah dilaksanakan di 166 lokasi yang tersebar di 144 kabupaten/kota pada 31 provinsi.

Sampai dengan 16 November 2025, sebanyak 24 K/L telah memanfaatkan DTSEN, baik sebagai pengirim data, penerima data balikan, maupun dalam rangka pemutakhiran data. K/L tersebut antara lain antar lain: Kementerian ESDM (PLN), Pertamina, Bappenas, Kementerian Sosial, Kementerian Koordinator PMK, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Agama, BPJS Kesehatan, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kemen PKP), Kementerian Kesehatan, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI), Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Dukcapil), BPJS Ketenagakerjaan, BP Tapera, Bank Indonesia, SMF PNM, Kemendagri, KPU, Kemenko Pemberdayaan Masyarakat, BPKP, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN, Baznas, serta Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Selain itu, sebanyak 6 Pemerintah Daerah, yaitu Pemerintah Kota Surabaya, Pemerintah Kota Yogyakarta, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Daerah Aceh, Pemerintah Kabupaten Tangerang, dan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, juga telah memanfaatkan DTSEN.

b. Makan Bergizi Gratis (MBG)

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu prioritas pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui perbaikan status gizi anak sekolah dan kelompok rentan. BPS mendukung pelaksanaan program tersebut melalui penyediaan data statistik sosial ekonomi dan gizi yang digunakan sebagai dasar perencanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan, serta dalam mengukur dampak program terhadap kesejahteraan masyarakat. Melalui kuesioner Susenas Maret dan September 2025, BPS mengumpulkan informasi terkait anggota rumah tangga penerima Program Makan Bergizi Gratis untuk kelompok sasaran anak sekolah. Selain itu Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat juga menjadi bagian dalam kegiatan Adhoc Survei Evaluasi dan Monitoring Program Makan Bergizi Gratis, pada Survei Khusus dan Survei Baseline, di bawah komando Deputy Neraca dan Analisis Statistik.

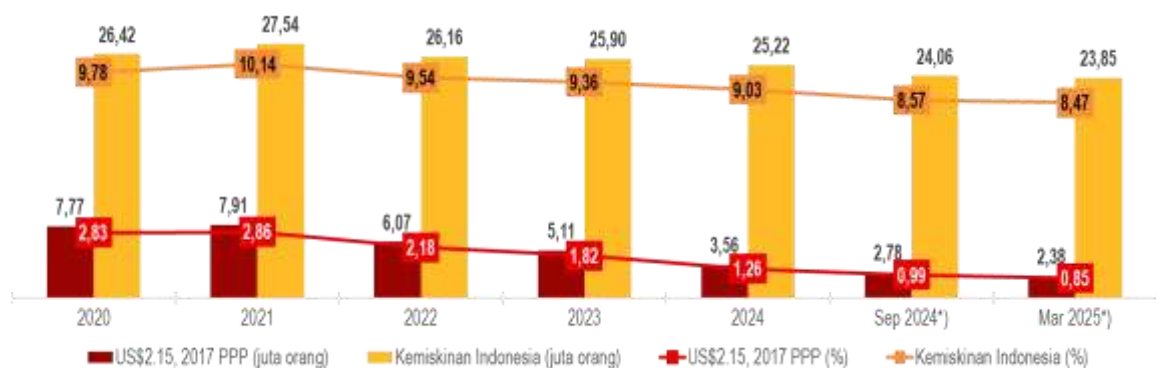
Direktorat Statistik Ketahanan Sosial

1. Output Prioritas Nasional : Pembinaan Statistik Sektoral

- 1) Konsultasi dan Asistensi Analisis Data Kriminal
- 2) Pembinaan Satu Data Indonesia
- 3) Pembinaan Proses Bisnis
- 4) Pembinaan Kelembagaan
- 5) Pembinaan Sistem Statistik Nasional
- 6) Pembinaan Kualitas Data
- 7) Pembinaan Standar Data Statistik dan Metadata Statistik Kementerian Sosial
- 8) Pembinaan Romantik di Kemendes dan PDT
- 9) Rapat Evaluasi Pembinaan Statistik Sektoral dan Persiapan Evaluasi Pembinaan Statistik Sektoral (EPSS) 2026
- 10) Menyusun Laporan Pembinaan Statistik Sektoral Tahun 2025

2. Output Prioritas Presiden: Kemiskinan Ekstrem

Pelaksanaan Inpres Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem diwujudkan melalui aktivitas utama salah satunya penghitungan tingkat kemiskinan ekstrem secara berkala. Berdasarkan hasil penghitungan terakhir, kondisi kemiskinan ekstrem di Indonesia menunjukkan perbaikan yang cukup signifikan seperti digambarkan dalam gambar berikut.



Keterangan:

- Sumber perkembangan miskin ekstrem (US\$2.15, 2017 PPP) 2020-2024 adalah pjp.worldbank.org/country-profiles/IDN

- *) Merupakan estimasi BPS menggunakan metode Bank Dunia

Gambar 5 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin dan Miskin Ekstrem Indonesia, 2020-2025

3. Prioritas Presiden: Makan Bergizi Gratis

Direktorat Statistik Ketahanan Sosial dalam hal ini berperan dalam berbagai kegiatan, antara lain: sebagai Instruktur Nasional survei MBG, asistensi analisis laporan MBG, dan supervisi pelaksanaan lapangan.

4. Output Prioritas Presiden: Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional

Pada tahun 2025 Direktorat Statistik Ketahanan Sosial, ikut terlibat dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional. Keterlibatan tersebut antara lain, sebagai PIC untuk beberapa KLD seperti Kemensos, Kemendesa dan PDT, BKN, Korlantas polri, Provinsi Maluku Utara, dan NTB. Adapun kegiatan yang dilakukan adalah:

- 1) Kemensos: *men-support* dalam melakukan verifikasi keluarga ataupun groundchek, yang data akan dipergunakan sebagai data pembaharuan DTSEN.
- 2) Kemendesa dan PDT: meminta nerima data yang dimiliki oleh Kemendesa dan PDT yang dipergunakan untuk memperkaya variabel DTSEN.
- 3) BKN dan Korlantas Polri: meminta data dari kedua Lembaga tersebut yang dipergunakan untuk memperkaya variabel DTSEN, tetapi sampai saat ini belum berhasil.
- 4) Provinsi Maluku Utara, dan NTB: membantu pemerintah dalam melakukan pemutakhiran DTSEN, dan sampai saat ini masih berlangsung.

3.3.2. Kendala, Solusi, dan Rencana Tindak Lanjut

1. Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan

a. Capaian Prioritas Nasional : Pembinaan Statistik Sektor

Kendala:

- Pelaksanaan pembinaan masih menghadapi kendala koordinasi dan penjadwalan, serta cakupan pembinaan di salah satu K/L mitra yang belum menjangkau seluruh unit kerja terkait.

Solusi:

- Direncanakan pelaksanaan pembinaan statistik sektoral disertai penyesuaian kehadiran dan pembagian tugas tim, penguatan

komunikasi dengan narahubung K/L, serta pertemuan lanjutan yang melibatkan seluruh unit kerja terkait.

Rencana Tindak Lanjut:

- Persiapan kegiatan pembinaan statistik sektoral tahun 2026 dengan melakukan penataan prioritas, penyesuaian materi, serta perencanaan pembinaan yang lebih terstruktur agar pelaksanaan pembinaan dapat berjalan efektif dan merata.

b. Capaian Prioritas Presiden : DTSEN

Kendala

- Pada tahap awal pembentukan dan pelaksanaan DTSEN, belum terdapat pembagian peran dan penugasan yang jelas antar unit kerja di lingkungan BPS, khususnya terkait penanggung jawab koordinasi dengan kementerian/lembaga (K/L) mitra, sehingga koordinasi pemadanan data berpotensi berjalan kurang optimal.
- Banyaknya K/L mitra serta beragamnya jenis dan karakteristik data sosial ekonomi yang dipadankan (ketenagakerjaan, kependudukan, kepemiluan, dan administrasi kependudukan) menuntut koordinasi intensif, yang pada awalnya terkendala belum adanya PIC yang secara khusus mengawal proses pemadanan dan verifikasi data DTSEN.

Solusi:

- Adanya kebijakan pembagian penugasan PIC per K/L mitra DTSEN guna memperjelas peran, tanggung jawab, dan alur koordinasi dalam pengelolaan dan pemutakhiran DTSEN yang ditetapkan oleh Deputi Bidang Statistik Sosial.
- Penetapan PIC tersebut diikuti dengan penguatan koordinasi teknis antar unit kerja dan K/L mitra, sehingga proses pemadanan data, verifikasi, serta integrasi DTSEN dapat dilaksanakan secara lebih terstruktur dan terkoordinasi.

Tindak Lanjut:

- Masing-masing PIC yang telah ditetapkan mengawal seluruh rangkaian kegiatan DTSEN sesuai pembagian K/L, mulai dari koordinasi

penyerahan data, pemadanan, verifikasi, hingga pembaruan DTSEN secara periodik.

- Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan terus mendukung keberlanjutan pemutakhiran DTSEN melalui penguatan peran PIC, pemanfaatan hasil survei (Sakernas dan Supas), serta koordinasi rutin dengan K/L mitra guna menjamin kualitas, konsistensi, dan kemutakhiran data DTSEN.

c. Isu Strategis Nasional: Kegiatan Pendataan PPIKN

Kendala

- Wilayah pendataan sulit dijangkau karena kondisi geografis dan pembangunan yang masih berlangsung.
- Tingginya mobilitas pekerja konstruksi serta jadwal kerja yang padat menyulitkan proses pendataan.
- Tantangan dalam menjaga konsistensi dan keterbandingan data PPIKN dengan Sakernas dan Susenas.

Solusi:

- Petugas pendataan direkrut dari desa/lokasi yang sama sehingga lebih memahami kondisi wilayah dan memudahkan akses ke rumah tangga sasaran.
- Pendataan dilakukan pada waktu tertentu yang lebih memungkinkan, seperti malam hari atau hari libur, agar responden dapat ditemui.
- Dilakukan evaluasi dan cleaning data untuk mengidentifikasi anomali, serta cross-check ke lapangan guna memastikan kesesuaian dan kualitas data.

Tindak Lanjut:

- Perencanaan yang matang dengan mempertimbangkan sumber daya lokal untuk mendukung kesiapan kegiatan lapangan.
- Dengan adanya data dasar PPIKN, maka dapat dipantau perkembangan atau perubahannya sehingga data anomali dapat diminimalisir
- Dalam keadaan tertentu untuk mencakup responden tertentu akan disusun mekanisme yang mengakomodir ketersediaan waktu respon

2. Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat

a. Capaian Prioritas Nasional: Pembinaan Statistik Sektoral

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Pembinaan Statistik Sektoral Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat antara lain:

- 1) Adanya efisiensi anggaran pada awal tahun, khususnya pada Triwulan I.
- 2) Kementerian/lembaga baru atau hasil pemekaran masih dalam proses penyesuaian struktur organisasi sehingga belum terbentuk unit kerja yang menangani data atau berperan sebagai walidata.
- 3) Tingkat pemahaman terhadap pentingnya pembinaan statistik yang masih bervariasi antar kementerian/Lembaga.
- 4) Kendala dalam penentuan waktu pertemuan dengan kementerian/lembaga meskipun anggaran telah dibuka untuk pertemuan luring.
- 5) Padatnya jadwal anggota tim Pembinaan Statistik Sektoral (PSS) sehingga menyulitkan sinkronisasi jadwal internal maupun dengan kementerian/Lembaga.
- 6) Jumlah anggota tim PSS yang belum sebanding dengan jumlah kementerian/lembaga lokus pembinaan.

Solusi terhadap kendala kegiatan pembinaan statistik sektoral Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat antara lain:

- 1) Pelaksanaan kegiatan pembinaan statistik sektoral kepada kementerian/lembaga secara daring sebagai respons terhadap efisiensi anggaran.
- 2) Penguatan koordinasi dengan penanggung jawab (PIC) masing-masing kementerian/Lembaga.
- 3) Penyesuaian materi pembinaan sesuai dengan tingkat pemahaman masing-masing kementerian/Lembaga.
- 4) Penyusunan kalender jadwal bersama untuk mengatasi kendala penjadwalan.
- 5) Pembagian tanggung jawab PIC kementerian/lembaga yang disesuaikan dengan beban kerja tim.

Rencana tindak lanjut terhadap kendala kegiatan pembinaan statistik sektoral antara lain:

- 1) Pelaksanaan workshop Pembinaan Statistik Sektorial secara daring pada awal tahun sebagai tindak lanjut efisiensi anggaran.
 - 2) Penyusunan materi pembinaan yang disesuaikan dengan tingkat pemahaman masing-masing kementerian/Lembaga.
 - 3) Penyusunan jadwal kunjungan ke setiap kementerian/Lembaga.
 - 4) Pelaksanaan kegiatan pembinaan statistik sektorial sesuai dengan rencana yang telah disusun.
 - 5) Penambahan jumlah anggota tim sesuai dengan jumlah kementerian/lembaga yang menjadi lokus pembinaan.
- b. Capaian Prioritas Presiden: Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN)

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat antara lain:

- 1) Data yang dikelola dalam rangka penyusunan DTSEN adalah data by name by address yang merupakan data pribadi. Penyebarluasan data pribadi oleh BPS kepada 3 K/L sesuai amanat Inpres 4/2025 perlu didukung oleh aturan hukum sebagai turunan dari Inpres 4/2025.
- 2) Data individu dan keluarga di dalam DTSEN belum seluruhnya memiliki informasi variabel yang lengkap sebagaimana dibutuhkan untuk pemeringkatan.
- 3) Proses akuisisi data dari K/L/D memerlukan prosedur standar dalam rangka meningkatkan kualitas pemeringkatan dan keseragaman periode pembaruan data, serta untuk menurunkan risiko keamanan data.
- 4) Data yang dikirimkan oleh K/L/D memiliki kualitas yang beragam sehingga diperlukan prosedur standar untuk menjamin kualitas data sumber pembaruan DTSEN.

Solusi terhadap kendala kegiatan DTSEN Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat antara lain:

- 1) Menyusun Perban DTSEN sebagai aturan turunan dari Inpres No. 4 Tahun 2025.
- 2) Melakukan identifikasi sumber data yang dapat digunakan dalam pemutakhiran.

Rencana tindak lanjut terhadap kendala kegiatan DTSEN antara lain:

- 1) Menyusun tata kelola DTSEN sebagai standar operasional pengelolaan DTSEN di BPS maupun dalam hubungan dengan K/L dan Pemerintah Daerah.
- 2) Mengintegrasikan pengumpulan data untuk pembaruan DTSEN dalam Sensus Ekonomi 2026.
- 3) Melalui kegiatan pembinaan statistik sektoral mendorong setiap Pemda memiliki mekanisme pemutakhiran DTSEN secara berkala.

c. Prioritas Presiden: Program Makan Bergizi Gratis (MBG)

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat antara lain:

- 1) Konten Susenas sudah padat sehingga variable terkait monitoring Program MBG terbatas.
- 2) Pencatatan imputasi MBG pada kuesioner Konsumsi Pengeluaran tidak tergambar terpisah.
- 3) Pembahasan pada tahap persiapan kurang matang, pada tahap teknis misalnya pembahasan kuesioner, Pembangunan aplikasi Fasih, sehingga menyebabkan kendala pada proses cleaning.

Solusi terhadap kendala kegiatan Program MBG Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat antara lain:

- 1) Informasi MBG di Susenas Maret memuat 3 pertanyaan. Pada Susenas September 13 pertanyaan.
- 2) Informasi MBG pada Survei Baseline digunakan sebagai bahan evaluasi untuk pelaksanaan survey lainnya.

Rencana tindak lanjut terhadap kendala kegiatan Program MBG yaitu perlu pembahasan pencatatan imputasi MBG pada kuesioner Konsumsi Pengeluaran agar lebih terukur share konsumsi rumah tangga dari MBG.

3. Direktorat Statistik Ketahanan Sosial

a. Capaian Prioritas Presiden: Kemiskinan Ekstrem

Dalam pelaksanaannya, kegiatan penghitungan kemiskinan ekstrem menghadapi beberapa kendala teknis:

- 1) Perubahan metodologi Bank Dunia dalam penghitungan kemiskinan ekstrem pada level internasional mengharuskan BPS mempelajari secara mendalam dan menyesuaikan perubahan tersebut ke dalam penghitungan kemiskinan ekstrem di level nasional.
- 2) Konsep penghitungan kemiskinan ekstrem Bank Dunia kini mengakomodasi perbedaan temporal dan spasial. Untuk perbedaan temporal (*temporal differences*), Bank Dunia menggunakan *Consumer Price Index* (CPI) agar garis kemiskinan yang digunakan tetap bersifat absolut dari waktu ke waktu. Sementara itu, untuk perbedaan spasial (*spatial differences*), Bank Dunia menerapkan *spatial deflator* yang dibentuk dari informasi pengeluaran makanan dan nonmakanan rumah tangga pada level kabupaten/kota. Dalam penerapannya, BPS menghadapi kendala karena Bank Dunia menggunakan perubahan CPI *March-to-March* (*year-on-year*), sedangkan pelaksanaan SUSENAS Maret 2025 dilakukan pada Februari 2025 sebagai bentuk antisipasi perubahan pola konsumsi masyarakat selama bulan Ramadhan yang jatuh pada Maret 2025. Perbedaan waktu ini berimplikasi pada kebutuhan penyesuaian teknis dalam penggunaan CPI.
- 3) Mulai tahun 2025 Bank Dunia telah menggunakan garis kemiskinan ekstrem terbaru, yaitu US\$3,00 PPP 2021, menggantikan garis sebelumnya US\$2,15 PPP 2017. Pergeseran standar ini memerlukan adaptasi teknis tambahan dalam proses penghitungan.

Solusi terhadap kendala kegiatan penghitungan kemiskinan ekstrem antara lain:

- 1) BPS secara intensif berkonsultasi dengan Bank Dunia guna memperoleh kejelasan teknis terkait metodologi terbaru, sekaligus membahas penyesuaian yang diperlukan akibat pelaksanaan SUSENAS Maret 2025 yang dilakukan pada bulan Februari. Hasil konsultasi ini memperkaya kapasitas teknis tim BPS dalam penghitungan kemiskinan ekstrem dan

menghasilkan kesepakatan terkait penyesuaian CPI serta komponen lain yang terdampak.

- 2) BPS juga melakukan sosialisasi penghitungan kemiskinan ekstrem terbaru kepada perwakilan BPS Provinsi pada kegiatan Rekonsiliasi Penghitungan Kemiskinan Kabupaten/Kota 2025. Sosialisasi ini penting agar seluruh satuan kerja memahami metodologi baru, mampu menerapkannya secara konsisten.

Rencana tindak lanjut terhadap kendala kegiatan penghitungan kemiskinan ekstrem antara lain:

- 1) Melakukan penyesuaian terhadap komponen penghitungan kemiskinan ekstrem, khususnya spatial deflator dan CPI, agar selaras dengan kondisi dan ketersediaan data Susenas 2026.
- 2) Melakukan penyesuaian khusus untuk penghitungan kemiskinan ekstrem periode September, mengingat spatial deflator pada level kabupaten/kota hanya dapat dihitung menggunakan data Susenas Maret 2025 sehingga diperlukan pendekatan teknis tambahan untuk menjaga konsistensi penghitungan pada periode tersebut.

b. Capaian Prioritas Nasional: Pembinaan Statistik Sektoral

Kegiatan Pembinaan Statistik Sektoral dalam pelaksanaannya menghadapi beberapa kendala diantaranya:

- 1) Pelaksanaan kegiatan harus menyesuaikan dengan jadwal K/L, sehingga terkadang realisasi pelaksanaan kegiatan mundur dari jadwal yang sudah direncanakan.
- 2) Pelaksanaan pembinaan terkait EPSS yang mengundang semua K/L sekaligus tidak dapat dilaksanakan secara luring karena tidak tersedia anggaran *fullday*.

Solusi terhadap kendala kegiatan pembinaan statistik sektoral antara lain:

- 1) Peran aktif dari BPS untuk terus berkoordinasi dan berkomunikasi dengan Kepolisian RI untuk menjadwalkan pembinaan.

- 2) Pelaksanaan pembinaan secara luring dengan mengunjungi K/L, tetapi jika jadwal K/L tidak memungkinkan maka pembinaan dapat dilakukan secara daring.

Rencana tindak lanjut terhadap kendala kegiatan pembinaan statistik sektoral yaitu perencanaan kegiatan pembinaan statistik sektoral tahun 2026.

3.4 Prestasi dan Inovasi Deputi Bidang Statistik Sosial Tahun 2025

Prestasi dan inovasi yang dicapai oleh Deputi Bidang Statistik Sosial sepanjang Tahun 2025 merupakan wujud komitmen dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan statistik sosial serta mendukung pencapaian target pembangunan nasional. Uraian prestasi dan inovasi pada bagian ini disajikan secara terpisah untuk masing-masing direktorat, yaitu Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat, dan Direktorat Statistik Ketahanan Sosial, sesuai dengan karakteristik dan ruang lingkup tugasnya.

3.4.1 Prestasi

Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan

Selama tahun 2025 prestasi yang berhasil diperoleh Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan sebagai berikut:

1. Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan memperoleh piagam penghargaan sebagai Unit Kerja Eselon II BPS Pusat yang berhasil mendapatkan nilai 4,20 pada domain Kualitas Data, dan nilai 3,67 pada Aspek Pemanfaatan Data Statistik sehingga Kualitas Data dan Pemanfaatan Data Tahun 2025 dinyatakan Berkualitas berdasarkan hasil Tim Penilai Statistik Berkualitas BPS.
2. Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan secara nyata aktif ikut mewujudkan “Satu Data Indonesia” sesuai amanat Perpres No 39/2019 tentang Satu Data Indonesia melalui kegiatan “Satu Data Migrasi Internasional” yang tersebar di berbagai K/L.
3. Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan menginisiasi kegiatan pengembangan Sistem Statistik Hayati Indonesia bekerja sama dengan Ditjen Dukcapil (Kemendagri) dan Kementerian PPN/Bappenas untuk merealisasikan

capaian yang diamanatkan pada Perpres 62/2019 tentang Strategi Nasional Percepatan Administrasi Kependudukan untuk Pengembangan Statistik Hayati (Stranas AKPSH).

4. Perpres Statistik Hayati masuk dalam Program Penyusunan Perpres 2026: Masuknya Perpres Statistik Hayati dalam Program Penyusunan Perpres 2026 merupakan prestasi strategis karena mengangkat statistik menjadi agenda kebijakan nasional serta menegaskan BPS sebagai leading sector dalam pengelolaan statistik hayati yang bersumber dari pencatatan sipil. Hal ini bermakna:

Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat

Terkait kinerjanya di tahun 2025, Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat memperoleh beberapa penghargaan yaitu:

1. Piagam penghargaan dengan predikat “Terbaik I” untuk Penilaian Statistik Berkualitas Tahun 2025 dengan nilai 4,67 pada Domain Kualitas Data dan 4,33 pada Aspek Pemanfaatan Data statistik.
2. Penghargaan/Pengakuan konsumen terkait data atau publikasi yang dihasilkan Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat
 - a. Data mikro Susenas menempati peringkat pertama kategori data mikro yang paling dibutuhkan dan diminati konsumen data di tahun 2025.
 - b. Statistik Pendidikan 2024 menempati peringkat ketiga kategori publikasi yang banyak dicari konsumen data per Desember 2025.

Direktorat Statistik Ketahanan Sosial

Selama tahun 2025, Direktorat Statistik Ketahanan Sosial tercatat menorehkan prestasi yakni diantaranya mendapatkan apresiasi atas dedikasi dan kontribusi dalam Pelaksanaan EPSS BPS pada Penilaian Statistik Berkualitas 2025 Unit Kerja Eselon II BPS Pusat. Penghargaan tersebut diserahkan Kepala BPS pada bulan November 2025.



Gambar 6. Penerimaan Piagam Penghargaan Pelaksanaan EPSS BPS pada Penilaian Statistik Berkualitas 2025 Unit Kerja Eselon II BPS Pusat

3.4.2 Inovasi

Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan

Sepanjang tahun 2025 Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan telah berhasil melaksanakan inovasi dalam hal Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan melaksanakan kegiatan Duknaker Sharing (D'Ring) secara online dimana narasumbernya adalah pegawai yang baru saja menyelesaikan Tugas Belajarnya (Pasca Sarjana) dan sharing mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kepegawaiaan dan peningkatan Sumber Daya Manusia. Kegiatannya adalah sebagai berikut:

1. Duknaker Sharing #01 berjudul "Internalisasi Pelaksanaan Pembinaan Statistik Sektoral" oleh narasumber Yogo Aryo Jatmiko, Monica Windi Triasturi, dan Hamim Tsalis Soblia tanggal 16 Januari 2025.
2. Duknaker Sharing #02 berjudul "Sosialisasi Manajemen Risiko" oleh narasumber dari Tim Inspektorat BPS RI pada tanggal 30 Januari 2025.
3. Duknaker Sharing #09 berjudul "Pendugaan Area Kecil Model Sub-area Twofold dalam Pendugaan Proporsi Komuter Tingkat Kabupaten/Kota si Sepuluh Wilayah Metropolitan" oleh narasumber Yudi Fathul Amin tanggal 23 Juni 2025.
4. Duknaker Sharing #10 berjudul "Cerita Hasil Refleksi Duknaker 2025" tanggal oleh Tim Kesekretariatan Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan tanggal 14 November 2025.

5. Dalam hal penerapan standar internasional, Tim Sakernas 2025 sudah menerapkan pengukuran indikator ketenagakerjaan berdasarkan *International Conference Labour Statistician (ICLS)* ke-19, 20, dan 21 yang mutakhir mulai Sakernas Februari 2025. Sepanjang 2025, sudah dilakukan serangkaian diskusi untuk penyiapan sintaks penyusun dari ketiga standar terbaru tersebut namun hasilnya masih belum dipublikasikan.
6. Dalam hal pengembangan statistik ketenagakerjaan, Tim Pengembangan Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan juga telah melakukan kajian pengukuran indikator sektor dan pekerja informal menggunakan konsep baru berdasarkan ICLS ke-17 yang kemudian akan disempurnakan dengan ICLS ke-21 sebagai tindak lanjut permintaan Forum Masyarakat Statistik (FMS). Indikator sektor dan pekerja informal menggunakan konsep baru tersebut akan disempurnakan dengan ICLS ke-21 sudah mulai disusun namun belum dipublikasikan. Dalam pemanfaatan hasil kajian tersebut, indikator pekerja informal ICLS ke -21 sudah mulai disosialisasikan oleh Kepala BPS saat mengunjungi ILO di Geneva dan pemerintah Indonesia. Indikator ini juga merupakan salah satu yang akan dipresentasikan oleh Kepala BPS pada *Meeting of the group of experts on quality of employment*, Geneva, Switzerland, 4-6 Mei 2026 yang diadakan oleh UNECE.

Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat

Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat melakukan inovasi sebagai berikut:

1. *Sharing Session* "Dari Data Jadi Cerita: Inspirasi Infografis yang Memikat! bagi internal pegawai Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat. Kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan kapasitas pegawai dalam penulisan publikasi serta infografis.
2. *Knowledge sharing* pemanfaatan data Susenas kepada pengguna data. Kegiatan ini dikenal dengan "KERABAT" atau Kesra Rabu Bersahabat. KERABAT dilakukan sebagai wujud implementasi dari Sasaran strategis Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat, yaitu meningkatnya pemanfaatan data statistik kesejahteraan rakyat yang berkualitas, baik yang digunakan dalam penyediaan indikator RPJMN maupun indikator global SDGs. Selama tahun 2025, KERABAT dilaksanakan sebanyak 4 (empat) kali dengan tema yang berbeda. Adapun tema di setiap kegiatan adalah sebagai berikut.

2. KERABAT I: *Knowledge Sharing* Penghitungan Indikator PoU dan Analisisnya
Pelaksanaan: Rabu, 12 Maret 2025
Narasumber: Amiek Chamami SST, M.Stat
3. KERABAT II: *Knowledge Sharing* "Seberapa Jauh Buah Jatuh dari Pohonnya? Kombinasi Pendidikan Orang Tua dan Pengaruhnya terhadap Tingkat Pendidikan Anak di Indonesia"
Pelaksanaan: Rabu, 11 Juni 2025
Narasumber: Freshy Windy Rosmala Dewi SST
4. KERABAT III: *Knowledge Sharing* Pengenalan *Food Insecurity Experience Scale* (FIES)
Pelaksanaan: Rabu, 25 Juni 2025
Narasumber: Amiek Chamami SST, M.Stat
5. KERABAT IV: *Knowledge Sharing* Menghitung Dampak Perlindungan Sosial terhadap Nilai Indikator
Pelaksanaan: Rabu, 27 Agustus 2025
Narasumber: Amiek Chamami SST, M.Stat

Direktorat Statistik Ketahanan Sosial

Pada 2025, Direktorat Statistik Ketahanan Sosial telah berinovasi dengan menghasilkan beberapa terobosan berikut:

1. Web infra Podes yang memetakan infrastruktur hasil pendataan Podes. Web ini dapat membantu meringankan beban petugas Podes dalam mengumpulkan data infrastruktur di desa dan mendapatkan data infrastruktur yang lebih lengkap (tagging lokasi infra). Inovasi ini mulai diterapkan pada tahun 2025 dan dapat dimanfaatkan oleh internal unit kerja/satker dan BPS secara keseluruhan. Inovasi web infra ini telah digunakan oleh K/L/satker/unit kerja lain untuk mendukung pekerjaannya. Berikut adalah link dan penggambaran inovasi tersebut web infra Podes <https://infrastruktur.web.bps.go.id/>



Gambar 7 Interface Web Infra Podes 2025

2. Inovasi Penggunaan Big Data Untuk Pengumpulan Data Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). Inovasi ini bermanfaat untuk: (1) Menghemat sumber daya manusia; (2) Menghemat waktu; (3) Efisiensi anggaran. Bekerja sama dengan Bappenas dan menggunakan *intelligent media analytics* (IMA) yang fasilitasnya dimiliki Pusdatin Bappenas. Penggunaan big data dalam IDI ini mulai diterapkan pada 2025 untuk menghitung IDI 2024. Penerima manfaat inovasi IDI antara lain, internal unit kerja/satker seperti Direktorat Statistik Ketahanan Sosial, DAPS (untuk data Indeks HAM), maupun BPS secara keseluruhan, dan KL lain diantaranya Kemenkopolkam (IKU Kemenkopolkam), Bappenas (RPJMN, RPJPN, RKP, SDG's), Kemendagri (IKU Kemendagri), Kementerian HAM (RPJMN), dan Pemda (IKU Gubernur, RPJMD), maupun Perguruan tinggi, lembaga kajian sosial politik, NGO. Inovasi ini telah direplikasi oleh K/L/satker/unit kerja lain seperti Kementerian HAM yang menggunakan teknik pengumpulan data yang digunakan oleh IDI dalam mengumpulkan data Indeks HAM (rilis 15 Desember 2025). Berikut adalah tautan bukti dukung replikasi <https://www.antaranews.com/berita/5305996/kementerian-ham-dan-bps-luncurkan-indeks-ham-indonesia>

3.5 Realisasi dan Efisiensi Anggaran

Anggaran Deputy Bidang Statistik Sosial Tahun 2025 merupakan total dari anggaran tiga direktorat, yaitu Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat, dan Direktorat Statistik Ketahanan Sosial. Total pagu anggaran Deputy Bidang Statistik Sosial Tahun 2025 mencapai Rp9.343.761.000,-. Hingga akhir Tahun 2025, realisasi anggaran tercatat sebesar 87,39% dari total pagu anggaran yang telah ditetapkan.

Tingkat efisiensi pelaksanaan anggaran Deputy Bidang Statistik Sosial diukur dengan membandingkan persentase capaian kinerja terhadap persentase realisasi anggaran, dengan menggunakan rumus **Efisiensi = %capaian kinerja/%realisasi anggaran**. Pengukuran ini dimaksudkan untuk menilai sejauh mana penggunaan anggaran telah menghasilkan capaian kinerja yang optimal. Nilai efisiensi yang sama dengan atau lebih besar dari 1 menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran telah efisien, sedangkan nilai efisiensi yang kurang dari 1 menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran belum sepenuhnya efisien.

Adapun rincian capaian kinerja serta anggaran dan realisasinya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 10. Realisasi dan Efisiensi Anggaran Deputy Bidang Statistik Sosial

Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025*)	Realisasi 2025	Capaian Terhadap Target 2025 (%)	PAGU yang dapat digunakan 2025 (Rp)	Realisasi Anggaran 2025 (Rp)	Persentase Realisasi Anggaran 2025 (%)	Efisiensi**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Sasaran 1. Peningkatan Pemanfaatan Data dan <i>Insight</i> Statistik Sosial yang Berkualitas								
Tingkat Pemanfaatan Data Statistik Sosial	Persen	81,31	94,73	116,50	9.219.631.000	8.108.038.041	87,94	1,3
Sasaran 2. Terwujudnya Penyelenggaraan Statistik Sektoral Kementerian/Lem baga Mitra Deputy								

Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025*)	Realisasi 2025	Capaian Terhadap Target 2025 (%)	PAGU yang dapat digunakan 2025 (Rp)	Realisasi Anggaran 2025 (Rp)	Persentase Realisasi Anggaran 2025 (%)	Efisiensi**)
Bidang Statistik Sosial yang Berkualitas								
Persentase Kenaikan Rata-Rata Nilai IPS Kementerian / Lembaga Mitra Deputi Bidang Statistik Sosial dalam Penyelenggaraan Statistik Sosial	Persen	18,13	18,13	100	124.130.000	57.368.902	46,22	2,2
Total				108,25	9.343.761.000	8.165.406.943	87,39	1,2

*) Target 2025 diambil dari target PK terakhir

**) dihitung dari Capaian terhadap target 2025 (%) / Persentase realisasi anggaran 2025 (%)

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun 2025, unit kerja Deputi Bidang Statistik Sosial secara umum menunjukkan capaian kinerja yang sangat baik. Secara agregat, capaian kinerja mencapai 108,25 persen dengan tingkat realisasi anggaran sebesar 87,39 persen, sehingga diperoleh nilai efisiensi sebesar 1,2. Nilai tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan unit kerja telah berlangsung secara efisien, di mana capaian kinerja yang diperoleh melampaui proporsi anggaran yang digunakan.

Pada Sasaran 1: Peningkatan Pemanfaatan Data dan Insight Statistik Sosial yang Berkualitas, indikator Tingkat Pemanfaatan Data Statistik Sosial mencapai 116,50 persen dengan realisasi anggaran sebesar 87,94 persen, sehingga menghasilkan nilai efisiensi 1,3. Capaian ini mencerminkan keberhasilan unit kerja dalam meningkatkan pemanfaatan data statistik sosial melalui penguatan diseminasi, peningkatan kualitas layanan data, serta pemanfaatan berbagai kanal komunikasi data yang lebih efektif dan adaptif terhadap kebutuhan pengguna.

Selanjutnya, pada Sasaran 2: Terwujudnya Penyelenggaraan Statistik Sektor Kementerian/Lembaga Mitra Deputi Bidang Statistik Sosial yang Berkualitas, indikator Persentase Kenaikan Rata-Rata Nilai IPS Kementerian/Lembaga Mitra mencapai 100 persen dengan realisasi anggaran sebesar 46,22 persen, sehingga menghasilkan nilai

efisiensi 2,2. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pembinaan dan pendampingan teknis kepada kementerian/lembaga mitra dapat dilaksanakan secara efektif dengan dukungan anggaran yang relatif minimal, tanpa mengurangi kualitas capaian kinerja.

Secara keseluruhan, hasil tersebut menunjukkan bahwa unit kerja di lingkungan Deputi Bidang Statistik Sosial telah mampu mengelola sumber daya secara optimal untuk mendukung pencapaian sasaran strategis. Capaian ini menjadi dasar untuk mempertahankan praktik pengelolaan kinerja dan anggaran yang efektif, sekaligus mendorong peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pada tahun berikutnya. Adapun upaya-upaya efisiensi yang dilakukan unit kerja di Deputi Bidang Statistik Sosial tahun 2025 antara lain:

1. Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan
 - a. Pelatihan instruktur maupun petugas baik SAKERNAS, SUPAS, dan PPIKN dilakukan secara daring (online).
 - b. Pembinaan statistik sektoral terhadap K/L mitra yang sebagian dilakukan secara daring (online).
 - c. Sosialisasi indikator hasil survei ke daerah maupun kegiatan lain secara online.
 - d. Perjalanan dinas dilakukan dengan lebih selektif.
2. Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat
 - a. Melaksanakan rapat dengan K/L lokus pembinaan statistik sektoral secara daring.
 - b. Menambah peserta pelatihan innas Susenas dengan peserta cadangan dari BPS Provinsi sehingga pengiriman innas pusat untuk pelatihan petugas Susenas di kabupaten/kota dapat dikurangi.
 - c. Menghimbau pelaksana perjalanan dinas untuk memanfaatkan harga tiket NKRI dari maskapai Garuda Indonesia atau memilih alternatif maskapai lain untuk efisiensi perjalanan dinas.
 - d. Melaksanakan perjalanan dinas supervisi Susenas secara efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan yaitu menjaga kualitas data Susenas.
3. Direktorat Statistik Ketahanan Sosial
 - a. Pelatihan Desa Cantik Kabupaten/Kota dilakukan secara online pada kegiatan Desa Cantik.

- b. Koordinasi dengan K/L terkait jadwal penyusunan publikasi maupun pelaksanaan pembinaan statistik sektoral dilakukan secara daring/online meeting.
- c. Sosialisasi ke daerah terkait kegiatan penyusunan publikasi maupun kegiatan lain secara online.
- d. Pemberian penghargaan Desa Cantik dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan BPS lain.
- e. Mengundang rapat dengan peserta KL tanpa memberikan anggaran transport lokal untuk peserta KL tersebut.
- f. Perjalanan dinas dilakukan dengan lebih selektif agar kegiatan yang dicakup lebih optimal.
- g. Rate paket meeting yang digunakan lebih rendah dari SBM agar kebutuhan jumlah peserta dapat terpenuhi.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Capaian kinerja Deputi Bidang Statistik Sosial pada tahun 2025 secara rata-rata mencapai 108,25 persen, dengan tingkat realisasi anggaran sebesar 87,39 persen. Dari 2 (dua) indikator kinerja yang ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Statistik Sosial dengan Kepala Badan Pusat Statistik, seluruh indikator kinerja mampu memenuhi target, yaitu sebesar 100 persen, bahkan ada yang melebihi 100 persen. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian kinerja Deputi Bidang Statistik Sosial, baik dari keseluruhan indikator tujuan maupun pada masing-masing indikator sasaran, telah mencapai nilai 100 persen atau lebih dan masuk dalam kategori A (sangat baik). Deputi Bidang Statistik Sosial pada tahun 2025 berhasil mempertahankan capaian kinerja dalam kategori A sebagaimana capaian kinerja pada tahun 2024. Indikator dengan capaian kinerja tertinggi pada tahun 2025 adalah tingkat pemanfaatan data statistik sosial yang mencapai 116,50 persen.

Anggaran Deputi Bidang Statistik Sosial yang dialokasikan untuk mendukung kinerja sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja 2025 adalah sebesar Rp 43.300.323.000,-. Seiring berjalannya waktu, pada akhir tahun 2025 terdapat penyesuaian di lingkungan Deputi Bidang Statistik Sosial sehingga anggaran yang dapat digunakan sampai triwulan IV 2025 menjadi Rp 9.343.755.000,-. nilai tersebut terbagi ke dalam 3 (tiga) kegiatan, yaitu penyediaan dan pengembangan statistik kependudukan dan ketenagakerjaan, penyediaan dan pengembangan statistik kesejahteraan rakyat, serta penyediaan dan pengembangan statistik ketahanan sosial. Sampai dengan 31 Desember 2025, serapan anggaran seluruh kegiatan adalah sebesar Rp 8.165.406.943,- atau 87,39 persen dari total anggaran POK.

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dari seluruh kegiatan di lingkungan Deputi Bidang Statistik Sosial selama tahun 2025 direpresentasikan dalam bentuk akuntabilitas kinerja Deputi Bidang Statistik Sosial. Berbagai upaya perbaikan teknis maupun nonteknis terus dilakukan guna menyempurnakan tingkat keberhasilan capaian kinerja dalam rangka mewujudkan renstra tahun 2025–2029. Hasil evaluasi

atas pelaksanaan fungsi dan tugas Deputy Bidang Statistik Sosial menyimpulkan bahwa secara umum pencapaian kinerja Deputy Bidang Statistik Sosial menunjukkan tingkat keberhasilan yang sangat baik.

4.2 Rekomendasi Perbaikan Kinerja

a. Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan

Pelaksanaan program kegiatan sepanjang tahun 2025 sudah sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, namun masih memerlukan beberapa langkah perbaikan untuk menyempurnakannya. Secara umum langkah perbaikan dan rekomendasi Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis yang akan dilakukan pada tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Rencana tindak lanjut untuk IKU “Persentase Publikasi/Laporan Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan yang Berkualitas” adalah sebagai berikut:
 - Penyesuaian *timeline* penyusunan publikasi dan jadwal rilis publikasi tahun 2026
 - Identifikasi publikasi berkualitas tahun 2026
 - Persiapan penyusunan publikasi berkualitas tahun 2026
2. Rencana tindak lanjut untuk IKU “Tingkat Keberhasilan Pembinaan Statistik Sektoral Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan” adalah sebagai berikut:
 - Persiapan kegiatan pembinaan statistik sektoral tahun 2026 dengan melakukan penataan prioritas, penyesuaian materi, serta perencanaan pembinaan yang lebih terstruktur agar pelaksanaan pembinaan dapat berjalan efektif dan merata.
 - Pembinaan K/L mitra dalam persiapan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) sebelum masa penilaian.

b. Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat

Untuk Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat, berdasarkan ulasan capaian kinerja Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat tahun 2025, dapat disimpulkan bahwa secara rata-rata capaian kinerja baik. Namun Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat terus meningkatkan capaian masing-masing indikator kinerja secara maksimal sesuai dengan target. Dibutuhkan dukungan seluruh fungsi untuk mewujudkan capaian kinerja yang lebih optimal dengan efisiensi yang lebih baik.

Secara umum, berbagai tantangan yang dihadapi Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat telah disampaikan secara detail pada bagian potensi dan permasalahan. Berbagai tantangan yang telah dapat diidentifikasi sebelumnya memerlukan berbagai tindak lanjut sebagai berikut:

1. Meningkatnya kepercayaan terhadap penggunaan data Susenas dengan berbagai ragam data Susenas ditindaklanjuti dengan mewujudkan beragam publikasi dan analisis data sesuai kebutuhan pengguna data. Ragam publikasi yang tercantum sesuai target maupun beragam publikasi dan analisis tambahan yang disosialisasikan pada berbagai pihak kementerian/lembaga, akademisi, dan masyarakat luas sehingga memberikan manfaat dan dampak pengambilan kebijakan berbasis data yang semakin baik.
2. Seluruh tahapan kegiatan pelaksanaan Susenas semakin optimal memenuhi standar operasional yang ditetapkan, dengan demikian diharapkan berdampak pada kualitas data yang dihasilkan.
3. Peningkatan anggaran sebagai upaya pemberian tanda terimakasih kepada responden Susenas perlu terus diupayakan untuk meningkatkan partisipasi responden dalam Susenas.
4. Strategi guna meningkatkan daya tarik petugas lapangan yang berkualitas di tengah tumpang tindihnya kegiatan lapangan di kabupaten/kota antara lain dilakukan dengan upaya peningkatan biaya pendataan rumah tangga yang lebih baik terutama sesuai beban tugas Susenas yang semakin menantang.

5. Untuk menunjang pelaksanaan lapangan Susenas yang semakin optimal, perlu untuk kembali mengadakan pelatihan petugas secara luring/*offline*, dan menambah jam pelajaran pelatihan. Dengan semakin banyaknya kegiatan yang tumpang tindih di BPS, para petugas yang sudah biasa mengikuti kegiatan Susenas sudah mengikuti kegiatan lain dan tidak bisa lagi mengikuti kegiatan Susenas, sehingga banyak petugas baru yang pemahamannya terhadap materi Susenas masih kurang namun diikutsertakan di kegiatan Susenas.
6. Dibutuhkan koordinasi antar tim dan direktorat terkait kegiatan BPS yang sering tumpang tindih, agar bisa menyesuaikan *timeline* antar kegiatan yang efektif dan efisien
7. Meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk mengomunikasikan berbagai temuan di bidang pengolahan yang telah berlaku sebelumnya terus diupayakan sehingga program entri yang dibangun telah memiliki kualitas lebih baik dan minim perbaikan program entri data.
8. Pengembangan kapabilitas sumber daya manusia (SDM) di lingkungan Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat terus diupayakan terutama dengan menyelenggarakan dan mengikutsertakan pegawai kegiatan-kegiatan pengembangan kapasitas secara periodik dan berkesinambungan seperti diklat, seminar, *workshop* dan kegiatan peningkatan kemampuan teknis lainnya. Selain itu, kesempatan tugas belajar pada jalur formal seperti melanjutkan pendidikan jenjang S2 dan S3 sehingga peningkatan kualitas SDM semakin baik.
9. Penyusunan matriks beban kerja antarpersonil serta pemanfaatan kolaborasi perlu dilakukan sehingga beban kerja tiap-tiap SDM dapat terpetakan secara jelas. Dalam kasus adanya yang bersifat *adhoc*, pekerjaan dapat diberikan kepada staf yang memiliki beban kerja lebih ringan dan sesuai dengan kapasitasnya.
10. Inovasi sesuai perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan statistika juga perlu terus diselaraskan guna meningkatkan kualitas data yang

dihasilkan Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat di masa mendatang.

11. Peningkatan inovasi dalam proses bisnis kegiatan statistik di lingkungan Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat seperti proses *workshop* intama, pelatihan innas, dan pelatihan petugas Susenas.
12. Perlu memberikan pemahaman yang selaras kepada kementerian/lembaga sebagai dasar pelaksanaan pembinaan statistik sektoral. Terutama pemahaman mengenai keahlian statistik agar kementerian/lembaga dapat menghitung indikator kinerjanya masing-masing.

c. Direktorat Statistik Ketahanan Sosial

Untuk Direktorat Statistik Ketahanan Sosial, rekomendasi perbaikan kinerja berupa rencana tindak lanjut (RTL) yang akan dilaksanakan pada tahun 2026 triwulan I-IV adalah sbb:

- A. RTL untuk IKU “Persentase Publikasi/ Laporan Statistik Ketahanan Sosial yang Berkualitas” adalah sebagai berikut:
 1. **Podes: (1)** Pengiriman surat kegiatan Podes 2026 ke Daerah; rapat Interkementerian tentang Kebutuhan Data pada Podes 2026, penyusunan kuesioner, buku pedoman, dan bahan ajar dan QC Podes 2026; (2) Pelatihan Podes (Workshop Intama, Pelatihan Innas, Pelatihan Inda, Pelatihan Petugas) dan Pengumpulan Data; (3) Evaluasi Data dan Pengolahan Podes serta IKG.; dan (4) Finalisasi data podes serta Penyusunan publikasi podes.
 2. **Descan: (1)** Persiapan Kegiatan Desa Cantik 2026 ; (2) Monitoring Pelaksanaan Program Desa Cantik 2026; (3) Uji Coba CAWI dan Dashboard Penilaian Desa Cantik 2026, Sosialisasi Penilaian Desa Cantik 2026, Penilaian Mandiri Desa Cantik, Verifikasi Penilaian Desa Cantik di Provinsi, *Desk Evaluation*, *Field Evaluation*, Pleno Penilaian Akhir Desa Cantik; dan Penganugerahan Desa Cantik Terbaik 2026 ; (4) Pemeriksaan Output Desa Cantik 2026 dan Keberlanjutan 2021-

2025 untuk Web Desa Cantik, Pembuatan Kepka Desa Cantik Revisi 2026, dan Penyusunan Laporan Pelaksanaan Program Desa Cantik 2026 (catatan: mulai tahun 2026 kegiatan desa cantik tidak masuk ke IKU 1, masuk ke IKU lain terkait desa cantik).

3. **SLHI: (1)** Melakukan evaluasi penyusunan Publikasi SLHI 2026; (2) Rapat pengumpulan data untuk penyusunan Publikasi SLHI 2026, Menyiapkan surat permintaan data ke K/L, Menyiapkan kebutuhan penyusunan publikasi (*dummy tabel*, dsb), Melakukan zoom meeting dengan K/L terkait untuk koordinasi dan diskusi solusi mengenai penyusunan Publikasi SLHI 2026, dan terselesaikannya perpanjangan PKS antara BPS dengan BMKG; (3) Rapat pengolahan dan pemeriksaan data untuk penyusunan Publikasi SLHI 2026, Melakukan entri data pada Publikasi SLHI 2026, dan pemeriksaan data pada Publikasi SLHI 2026.; (3) Rapat pengolahan dan pemeriksaan data untuk penyusunan Publikasi SLHI 2026, Rapat evaluasi data untuk penyusunan Publikasi SLHI 2027, dan Melakukan rilis Publikasi SLHI 2026.
4. **SDLP:** (1) Melaksanakan evaluasi tahap persiapan, pengumpulan data, pengolahan dan analisis, *review* kinerja tahap diseminasi dan evaluasi SDLP 2025 untuk persiapan penyusunan SDLP 2026; (2) Perencanaan dan desain kegiatan kompilasi data statistik sumber daya laut dan pesisir serta Persiapan tema, *outline*, dan narasi publikasi, penguatan aplikasi SISLH 2026 kolaborasi dengan Tim Direktorat Sistem Informasi Statistik, pengumpulan data sekunder di tingkat daerah, menyusun draft narasi/analisis tematik, dan penyusunan template publikasi; (3) Lanjutan perencanaan dan desain kegiatan kompilasi data statistik sumber daya laut dan pesisir serta penyusunan publikasi, pengumpulan data sekunder di tingkat pusat, pencarian informasi/verifikasi/studi mendalam ke daerah apabila BPS memberikan anggarannya (kegiatan dilakukan dalam selang waktu TW 3 dan TW 4), pencarian informasi di instansi di tingkat pusat apabila tersedia anggarannya (kegiatan dilakukan dalam selang

waktu TW 3 dan TW 4), pengolahan data hasil pengumpulan data sekunder (evaluasi/tabulasi), melanjutkan draft narasi/analisis tematik/menyusun infografis, memfinalkan template publikasi, dan melaksanakan penyusunan publikasi; (4) dan Lanjutan pengumpulan data sekunder di tingkat pusat, lanjutan periode pencarian informasi/verifikasi/studi mendalam ke daerah apabila BPS memberikan anggaran, lanjutan periode pencarian informasi di instansi di tingkat pusat apabila tersedia anggarannya, lanjutan pengolahan data hasil pengumpulan data sekunder (evaluasi/tabulasi), memfinalkan draft narasi/analisis tematik/infografis, melaksanakan kegiatan yang dibutuhkan dalam diseminasi kegiatan penyusunan publikasi Statistik Sumber Daya Laut Pesisir, evaluasi internal, dan finalisasi publikasi.

5. **ALHB: (1)** Rapat Pembahasan Persiapan kegiatan ALHB tahun 2026
(2) Rapat pengumpulan data untuk penyusunan Publikasi ALHB 2026, menyiapkan surat permintaan data ke K/L, menyiapkan kebutuhan penyusunan publikasi (dummy tabel, dsb), dan melakukan zoom meeting dengan K/L terkait untuk melakukan koordinasi dan diskusi solusi mengenai penyusunan Publikasi ALHB 2026; (3) Rapat pengolahan dan pemeriksaan data untuk penyusunan Publikasi Publikasi ALHB 2026, melakukan entri data pada Publikasi Publikasi ALHB 2026, dan melakukan pemeriksaan data pada Publikasi ALHB 2026; dan (4) Rapat pengolahan dan pemeriksaan data untuk penyusunan Publikasi ALHB 2026, rapat dalam rangka evaluasi data untuk penyusunan Publikasi ALHB 2026, dan melakukan rilis Publikasi ALHB 2026.
6. **Statkrim: (1)** Rapat persiapan kegiatan Statistik Kriminal 2026, pengiriman surat kegiatan Statistik Politik dan Keamanan ke daerah, penyusunan Kuesioner Statistik Politik dan Keamanan 2026, dan penyusunan webentry Simonpolkam 2026; (2) Rapat pengumpulan data untuk penyusunan Publikasi Statistik Kriminal 2026, menyiapkan surat permintaan data ke K/L dan daerah, menyiapkan

kebutuhan penyusunan publikasi (dummy tabel, outline publikasi, dsb), dan melakukan reviu dan perancangan webentry dalam rangka pengumpulan data kriminal 2026; (3) Rapat pengolahan dan pemeriksaan data untuk penyusunan Publikasi Statistik Kriminal 2026, melakukan pengolahan data Publikasi Statistik Kriminal 2026, dan melakukan pemeriksaan data Publikasi Statistik Kriminal 2026; dan (4) Menyusun draft Publikasi Statistik Kriminal 2026, dan melakukan pemeriksaan dan finalisasi draft Publikasi Statistik Kriminal 2026.

7. **Statpol: (1)** Rapat persiapan kegiatan Statistik Politik 2026, pengiriman surat kegiatan Statistik Politik dan Keamanan ke daerah, penyusunan Kuesioner Statistik Politik dan Keamanan 2026, dan penyusunan webentry Simonpolkam 2026; (2) Koordinasi dengan sumber data untuk penyusunan Statistik Politik 2026 dilakukan lebih awal sebelum 30 Juni 2026; (3) Pengumpulan data dan dokumentasi dari sumber data sudah dilakukan sebagai dukungan pada penulisan publikasi Statistik Politik 2026; dan Mengajukan penggunaan akun indesign lebih dari satu orang untuk mempercepat penyusunan publikasi Statistik Politik 2026.
8. **SPAK: (1)** Persiapan kegiatan SPAK 2026; (2) Bila anggaran SPAK 2026 jadi disediakan maka kegiatan SPAK yang dapat dilaksanakan diantaranya penyusunan Quality Gates SPAK 2026 dan Pengumpulan data; (3) Pengolahan dan pemeriksaan data SPAK; dan (4). penyusunan publikasi IPAK 2026. (catatan RTL 2-4 dapat dilaksanakan bila anggaran SPAK 2026 tersedia).
9. **Penghitungan dan Analisis Kemiskinan Makro di Indonesia: (1)** Menyusun perbandingan (trend analysis) karakteristik penduduk miskin antar periode untuk mengidentifikasi perubahan pola kemiskinan secara spasial dan demografis.; (2) Penyusunan outline dan dummy tabel untuk publikasi, pengumpulan data dukung terkait fenomena kemiskinan dari BPS Daerah, permintaan data Susenas KP ke Direktorat Kesejahteraan Rakyat untuk keperluan penghitungan

dan analisis angka kemiskinan makro, melakukan pemeriksaan data awal, melakukan pengolahan angka kemiskinan provinsi dan nasional, dan melakukan pemeriksaan hasil pengolahan angka kemiskinan provinsi dan nasional; (3) Menerima data Susenas KOR dari Direktorat Kesejahteraan Rakyat untuk keperluan penyusunan publikasi kemiskinan makro, melakukan review syntax pengolahan untuk data KOR (karakteristik kemiskinan), melakukan pemeriksaan hasil pengolahan angka kemiskinan provinsi dan nasional, melakukan pengolahan karakteristik kemiskinan, melakukan pemeriksaan hasil pengolahan karakteristik kemiskinan dan menyusun draft halaman muka (cover) Publikasi Penghitungan dan Analisis Kemiskinan Makro; dan (4) Melakukan pemeriksaan dan finalisasi draft Publikasi Penghitungan dan Analisis Kemiskinan Makro di Indonesia 2025, dan mengunggah naskah Publikasi Penghitungan dan Analisis Kemiskinan Makro di Indonesia 2025 melalui simotik.

10. **Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/ Kota: (1)** Menyusun perbandingan (trend analysis) karakteristik penduduk miskin antar periode untuk mengidentifikasi perubahan pola kemiskinan secara spasial dan demografis; (2) Penyusunan outline dan dummy tabel untuk publikasi, pengumpulan data dukung terkait fenomena kemiskinan dari BPS Daerah, permintaan data Susenas KP ke Direktorat Kesejahteraan Rakyat untuk keperluan penghitungan dan analisis angka kemiskinan makro, melakukan pemeriksaan data awal, melakukan pengolahan angka kemiskinan provinsi dan nasional, dan melakukan pemeriksaan hasil pengolahan angka kemiskinan provinsi dan nasional; (3) Review kembali syntaks pengolahan (d disesuaikan dengan kuesioner terupdate), pemeriksaan kondisi data (konsistensi, penimbang, dsb), pengolahan angka kemiskinan kabupaten/kota 2026, rekonsiliasi angka kemiskinan kabupaten/kota 2026 dengan BPS Daerah, pengolahan karakteristik kemiskinan kabupaten/kota 2025, pemeriksaan silang (crosscheck) hasil pengolahan karakteristik kemiskinan kabupaten/kota 2026, dan penyusunan draft publikasi

Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota 2026; dan (4) Menyusun analisis karakteristik kemiskinan kabupaten/kota berdasarkan data Susenas Maret 2026, melakukan pemeriksaan dan finalisasi draft Publikasi Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota 2026, dan mengunggah naskah Publikasi Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota 2025 melalui simotik.

11. **Rilis Kemiskinan Juli:** (1) Penyusunan Timeline BRS Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2026. penyusunan program pengolahan Kemiskinan, penyusunan Lembar Kerja Tabel Makro Kemiskinan Maret 2026, penyusunan format bahan dukung rilis kemiskinan untuk BPS daerah, dan melakukan review syntaks pengolahan; (2) Pengumpulan data dukung terkait fenomena kemiskinan dari BPS Daerah, permintaan data Susenas KP ke Direktorat Kesejahteraan Rakyat untuk keperluan rilis Kemiskinan Juli, melakukan pemeriksaan data awal, melakukan pengolahan angka kemiskinan provinsi dan nasional, melakukan pemeriksaan hasil pengolahan angka kemiskinan provinsi dan nasional, melakukan penyusunan draft Naskah BRS Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2025; (3) Pemeriksaan dan finalisasi draft BPS Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2025, dan pengunggahan naskah BRS Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2025.
12. **Rilis Ketimpangan Juli:** (1) Penyusunan Timeline BRS Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2026. penyusunan program pengolahan Kemiskinan, penyusunan Lembar Kerja Tabel Makro Kemiskinan Maret 2026, penyusunan format bahan dukung rilis kemiskinan untuk BPS daerah, dan melakukan review syntaks pengolahan; (2) Pengumpulan data dukung terkait fenomena kemiskinan dari BPS Daerah, permintaan data Susenas KP ke Direktorat Kesejahteraan Rakyat untuk keperluan rilis Kemiskinan Juli, melakukan pemeriksaan data awal, melakukan pengolahan angka kemiskinan provinsi dan nasional, melakukan pemeriksaan hasil pengolahan angka kemiskinan provinsi dan nasional, melakukan

penyusunan draft Naskah BRS Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2025; (3) Pemeriksaan dan finalisasi draft BPS Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2025, dan pengunggahan naskah BRS Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2025.

B. RTL untuk IKU “Tingkat Keberhasilan Pembinaan Statistik Sektoral” adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan kegiatan pembinaan statistik sektoral tahun 2026
2. Menyusun Rencana Kerja Pembinaan Statistik Sektoral
3. Melakukan monev mandiri semester 1
4. Melakukan pembinaan ke KL yang menjadi lokus pembinaan.
5. Melakukan monev mandiri semester 2
6. Menyusun laporan

LAMPIRAN

Lampiran 1 Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Statistik Sosial 2025

Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Statistik Sosial Tahun 2025 (Awal)



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DEPUTI BIDANG STATISTIK SOSIAL

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Ateng Hartono, SE, M.Si
Jabatan : Deputi Bidang Statistik Sosial

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Amalia Adininggar W. S.T., M.Si., M.Eng., Ph.D
Jabatan : Plt. Kepala Badan Pusat Statistik

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Amalia Adininggar W. S.T., M.Si., M.Eng., Ph.D
NIP. 19720305199903 2 003

Palembang, 24 Januari 2025
Pihak Pertama

Dr. Ateng Hartono, SE, M.Si
NIP. 19690109199211 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DEPUTI BIDANG STATISTIK SOSIAL

No (1)	Sasaran (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1.	Peningkatan Pemanfaatan Data dan <i>Insight</i> Statistik Sosial yang Berkualitas	Tingkat Pemanfaatan Data Statistik Sosial	81,31 Persen
2.	Terwujudnya Penyelenggaraan Statistik Sektoral Kementerian/Lembaga Mitra Deputi Bidang Statistik Sosial yang Berkualitas	Persentase Kenaikan Rata-Rata Nilai IPS Kementerian/Lembaga Mitra Deputi Bidang Statistik Sosial dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral	18,13 Persen

	Program/Kegiatan		Anggaran
1)	2905 Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan	Rp.	32.574.470.000
2)	2906 Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kesejahteraan Rakyat	Rp.	3.713.679.000
3)	2907 Penyediaan dan Pengembangan Statistik Ketahanan Sosial	Rp.	7.012.174.000
	Jumlah	Rp.	43.300.323.000

Plt. Kepala Badan Pusat Statistik

Amalia Adininggar W. S.T., M.Si., M.Eng., Ph.D
NIP. 19720305199903 2 003

Palembang, 24 Januari 2025
Deputi Bidang Statistik Sosial

Dr. Ateng Hartono, SE, M.Si
NIP. 19690109199211 1 001

Perjanjian Kinerja Deputy Bidang Statistik Sosial Tahun 2025 (Reviu Akhir)



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DEPUTI BIDANG STATISTIK SOSIAL

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Ateng Hartono, SE, M.Si
Jabatan : Deputy Bidang Statistik Sosial

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Amalia Adininggar W. S.T., M.Si., M.Eng., Ph.D
Jabatan : Kepala Badan Pusat Statistik

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Amalia Adininggar W. S.T., M.Si., M.Eng., Ph.D
NIP. 19720305199903 2 003

Jakarta, 19 Februari 2025

Pihak Pertama

Dr. Ateng Hartono, SE, M.Si
NIP. 19690109199211 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DEPUTI BIDANG STATISTIK SOSIAL

No (1)	Sasaran (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1.	Peningkatan Pemanfaatan Data dan <i>Insight</i> Statistik Sosial yang Berkualitas	Tingkat Pemanfaatan Data Statistik Sosial	81,31 Persen
2.	Terwujudnya Penyelenggaraan Statistik Sektoral Kementerian/Lembaga Mitra Deputi Bidang Statistik Sosial yang Berkualitas	Persentase Kenaikan Rata-Rata Nilai IPS Kementerian/Lembaga Mitra Deputi Bidang Statistik Sosial dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral	18,13 Persen

Program/Kegiatan		Anggaran	
1)	2905 Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan	Rp.	32.574.470.000
2)	2906 Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kesejahteraan Rakyat	Rp.	3.713.679.000
3)	2907 Penyediaan dan Pengembangan Statistik Ketahanan Sosial	Rp.	7.012.174.000
Jumlah		Rp.	43.300.323.000

Kepala Badan Pusat Statistik

Amalia Adininggar W. S.T., M.Si., M.Eng., Ph.D
NIP. 19720305199903 2 003

Jakarta, 19 Februari 2025
Deputi Bidang Statistik Sosial

Dr. Ateng Hartono, SE, M.Si
NIP. 19690109199211 1 001

Lampiran 2. Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2025

Unit Organisasi	Jenjang Pendidikan					Jumlah
	SMA	DIII	S1/DIV	S2	S3	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Deputi Bidang Statistik Sosial					1	1
Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan (Duknaker)	2	1	25	36	3	67
Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat (Kesra)	1	1	26	27	3	58
Direktorat Statistik Ketahanan Sosial (Hansos)	0	0	30	35	2	67
Deputi Bidang Statistik Sosial (KBSS)	3	2	81	98	9	193

Lampiran 3. Jumlah Pegawai Menurut Golongan Kepangkatan Tahun 2025

Unit Organisasi	Golongan Kepangkatan								Jumlah
	III/a	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Deputi Bidang Statistik Sosial								1	1
Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan	3	14	11	24	7	6	1	1	67
Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat	6	9	9	16	10	3	3	2	58
Direktorat Statistik Ketahanan Sosial	6	15	17	15	5	7	1	1	67
Deputi Bidang Statistik Sosial	15	38	37	55	22	16	5	5	193

Lampiran 4. Jumlah Pegawai Menurut Jabatan Tahun 2025

No.	Jabatan	Direktorat			DBSS
		Duknaker	Kesra	Hansos	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Deputi				1
2	Direktur	1	1	1	3
3	Statistisi Ahli Utama	0	1	0	1
4	Statistisi Ahli Madya	11	14	12	37
5	Statistisi Ahli Muda	34	25	28	87
6	Statistisi Ahli Pertama	13	13	24	50
7	Arsiparis Ahli Pertama	0	2	1	3
8	Arsiparis Mahir	1	1	0	2
9	Fungsional Umum	7	1	1	9
	Jumlah	67	58	67	193

Lampiran 5. Daftar Dokumen Pemerintah yang Digunakan sebagai Dasar Hitung Tingkat Pemanfaatan Data Statistik (TPDS)

1. Renstra Badan Gizi Nasional
2. Renstra Badan Keamanan Laut
3. Renstra Badan Nasional Penanggulangan Bencana
4. Renstra Badan Pangan Nasional
5. Renstra Kementerian Agama
6. Renstra Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
7. Renstra Kementerian Hak Asasi Manusia
8. Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan
9. Renstra Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
10. Renstra Kementerian Kesehatan
11. Renstra Kementerian Ketenagakerjaan
12. Renstra Kementerian Keuangan
13. Renstra Kementerian Komunikasi dan Digital
14. Renstra Kementerian Koordinator Bidang Pangan
15. Renstra Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
16. Renstra Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
17. Renstra Kementerian Koperasi
18. Renstra Kementerian Pekerjaan Umum
19. Renstra Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
20. Renstra Kementerian Pemuda dan Olahraga
21. Renstra Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
22. Renstra Kementerian Perhubungan
23. Renstra Kementerian Sosial
24. Renstra Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
25. Renstra Perpustakaan Nasional
26. RKP Aceh
27. RKP Bali
28. RKP Bengkulu

29. RKP Gorontalo
30. RKP Jambi
31. RKP Jawa Tengah
32. RKP Jawa Timur
33. RKP Kalimantan Barat
34. RKP Kalimantan Selatan
35. RKP Kalimantan Tengah
36. RKP Kalimantan Utara
37. RKP NTB
38. RKP NTT
39. RKP Sulawesi Barat
40. RKP Sulawesi Tengah
41. RKP Sulawesi Tenggara
42. RKP Sumatera Barat
43. RPJMD Aceh
44. RPJMD Bali
45. RPJMD Bangka Belitung
46. RPJMD Banten
47. RPJMD Bengkulu
48. RPJMD Gorontalo
49. RPJMD Jambi
50. RPJMD Jawa Tengah
51. RPJMD Jawa Timur
52. RPJMD Kalimantan Barat
53. RPJMD Kalimantan Selatan
54. RPJMD Kalimantan Tengah
55. RPJMD Kalimantan Timur
56. RPJMD Kalimantan Utara
57. RPJMD Lampung
58. RPJMD Maluku
59. RPJMD NTB
60. RPJMD NTT

61. RPJMD Riau
62. RPJMD Sulawesi Barat
63. RPJMD Sulawesi Selatan
64. RPJMD Sulawesi Tengah
65. RPJMD Sulawesi Tenggara
66. RPJMD Sumatera Barat
67. RPJMD Sumatera Selatan
68. RPJMD Sumatera Utara
69. RPJMN
70. RPJPN

Lampiran 6. Daftar K/L/Pemda Target Pembinaan Tahun 2025

Kementerian Lokus Pembinaan Statistik Sektorial Tahun 2025

Deputi Bidang Statistik Sosial

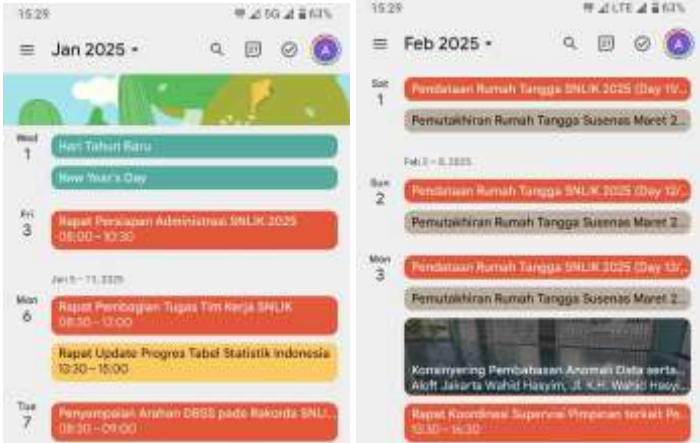
1. Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan
 - a. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
 - b. Kementerian Dalam Negeri
 - c. Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
 - d. Kementerian Ketenagakerjaan
 - e. Kementerian Luar Negeri
 - f. Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
2. Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat
 - a. Kementerian Kesehatan
 - b. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - c. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
 - d. Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat
 - e. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
 - f. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
 - g. Kementerian Kebudayaan
3. Direktorat Statistik Ketahanan Sosial
 - a. Kejaksaan Agung RI
 - b. Kepolisian Negara RI
 - c. Kementerian Sosial
 - d. Komisi Pemberantasan Korupsi
 - e. Kementerian Desa dan PDT
 - f. Kementerian Transmigrasi

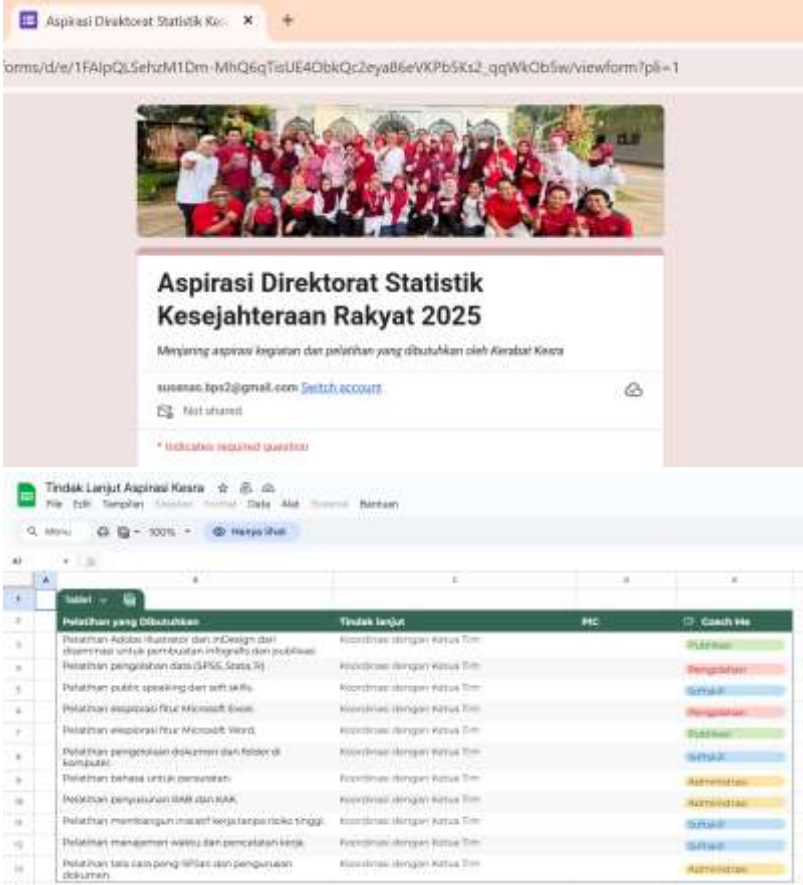

Lampiran 7. Daftar Prestasi/Penghargaan Deputi Bidang Statistik Sosial Menurut Unit Kerja/Satuan Kerja Tahun 2025

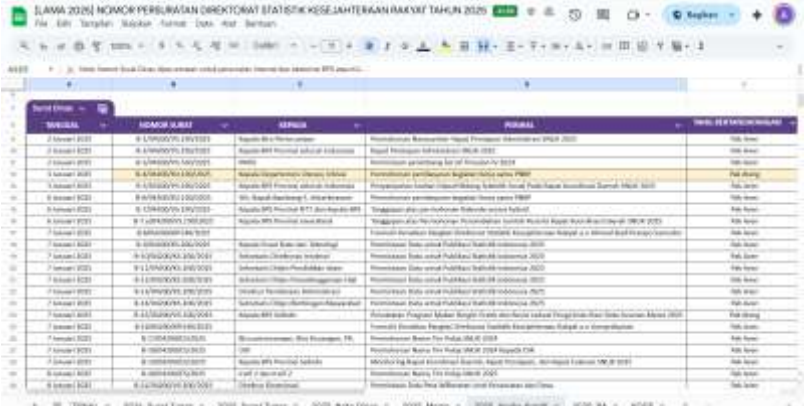

No	Unit Kerja	Prestasi/Penghargaan
1	Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan	<p>1. Penghargaan sebagai Unit Kerja Eselon II BPS Pusat yang berhasil mendapatkan nilai 4,20 pada domain Kualitas Data, dan nilai 3,67 pada Aspek Pemanfaatan Data Statistik.</p>  <p>2. Mewujudkan “Satu Data Indonesia” sesuai amanat Perpres No 39/2019 tentang Satu Data Indonesia melalui kegiatan “Satu Data Migrasi Internasional” yang tersebar di berbagai K/L.</p> <p>3. Menginisiasi kegiatan pengembangan Sistem Statistik Hayati Indonesia bekerja sama dengan Ditjen Dukcapil (Kemendagri) dan Kementerian PPN/Bappenas untuk merealisasikan capaian yang diamanatkan pada Perpres 62/2019 tentang Strategi Nasional Percepatan Administrasi Kependudukan untuk Pengembangan Statistik Hayati (Stranas AKPSH).</p>
2	Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat	<p>1. Penghargaan dari Kepala BPS sebagai Unit Kerja Eselon II BPS Pusat yang memperoleh predikat Berkualitas pada Kualitas Data dan Pemanfaatan Data Tahun 2025.</p> <p>2. Penghargaan dari Kepala BPS sebagai Unit Kerja Eselon II BPS Pusat dengan hasil Penilaian Statistik Berkualitas Tahun 2025 Terbaik Pertama.</p>

No	Unit Kerja	Prestasi/Penghargaan
		
3	Direktorat Statistik Ketahanan Sosial	1. Apresiasi atas dedikasi dan kontribusi Direktorat Statistik Ketahanan Sosial dalam Pelaksanaan EPSS BPS pada Penilaian Statistik Berkualitas 2025 Unit Kerja Eselon II BPS Pusat.

Lampiran 8. Daftar Inovasi Deputi Bidang Statistik Sosial Menurut Unit Kerja/Satuan Kerja Tahun 2025

No	Unit Kerja	Prestasi/Penghargaan
1	Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Duknaker Sharing (Dring) dengan tema/judul: <ol style="list-style-type: none"> a. Internalisasi Pelaksanaan Pembinaan Statistik Sektoral oleh narasumber Yogo Aryo Jatmiko, Monica Windi Triasturi, dan Hamim Tsalis Soblia tanggal 16 Januari 2025. b. Sosialisasi Manajemen Risiko oleh narasumber dari Tim Inspektorat BPS RI pada tanggal 30 Januari 2025. c. Pendugaan Area Kecil Model Sub-area Twofold dalam Pendugaan Proporsi Komuter Tingkat Kabupaten/Kota si Sepuluh Wilayah Metropolitan oleh narasumber Yudi Fathul Amin tanggal 23 Juni 2025. d. Cerita Hasil Refleksi Duknaker 2025” tanggal oleh Tim Kesekretariatan Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan tanggal 14 November 2025. 2. Tim Sakernas 2025 sudah menerapkan pengukuran indikator ketenagakerjaan berdasarkan International Conference Labour Statistician (ICLS) ke-19, 20, dan 21 yang mutakhir mulai Sakernas Februari 2025. 3. Kajian pengukuran indikator sektor dan pekerja informal menggunakan konsep baru berdasarkan ICLS ke-17 yang kemudian akan disempurnakan dengan ICLS ke-21 sebagai tindak lanjut permintaan Forum Masyarakat Statistik (FMS).
2	Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memanfaatkan Google Calendar sebagai sarana mengomunikasikan dan menginformasikan jadwal-jadwal kegiatan masing-masing tim di Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat. 

No	Unit Kerja	Prestasi/Penghargaan
		<p>2. Menginventaris pelatihan yang dibutuhkan pegawai Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat, terkait dengan pekerjaan.</p>  <p>3. Menyelenggarakan Sharing Session "Dari Data Jadi Cerita: Inspirasi Infografis yang Memikat!", untuk memenuhi salah satu aspirasi kebutuhan pelatihan yang disampaikan pegawai.</p>  <p>4. Menyimpan surat-surat dinas pada Google Drive yang diintegrasikan dengan Google Spreadsheet Nomor Surat</p>

No	Unit Kerja	Prestasi/Penghargaan
		<p>Dinas Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat, sehingga arsip surat-surat dinas tersusun dengan lebih baik.</p>  <p>5. Memanfaatkan SINERGI, output Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (Latsar CPNS2025) Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat, untuk mempermudah Tim Pengolahan dalam mengorganisasi serial data untuk beberapa indikator umum dan kumpulan syntax indikator umum tersebut.</p> 
3	Direktorat Statistik Ketahanan Sosial	<ol style="list-style-type: none"> 1. Web infra Podes yang memetakan infrastruktur hasil pendataan Podes. 2. Inovasi Penggunaan Big Data Untuk Pengumpulan Data Indeks Demokrasi Indonesia (IDI).

Lampiran 9. Alokasi Anggaran Belanja Unit Kerja TA 2025

Deputi Bidang Statistik Sosial tidak mempunyai alokasi anggaran belanja unit kerja tersendiri, namun gabungan dari 3 direktorat dibawahnya. Dari hasil penjumlahan anggaran dari setiap direktorat, berikut alokasi anggaran DBSS beserta capaian kinerjanya :

Alokasi Anggaran dan Capaian Kinerja Deputi Bidang Statistik Sosial

Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025*)	Realisasi 2025	Capaian Terhadap Target 2025 (%)	PAGU yang dapat digunakan 2025 (Rp)	Realisasi Anggaran 2025 (Rp)	Persentase Realisasi Anggaran 2025 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Sasaran 1. Peningkatan Pemanfaatan Data dan <i>Insight</i> Statistik Sosial yang Berkualitas							
Tingkat Pemanfaatan Data Statistik Sosial	Persen	81,31	94,73	116,50	9.219.631.000	8.108.038.041	87,94
Sasaran 2. Terwujudnya Penyelenggaraan Statistik Sektoral Kementerian/Lembaga Mitra Deputi Bidang Statistik Sosial yang Berkualitas							
Persentase Kenaikan Rata-Rata Nilai IPS Kementerian/ Lembaga Mitra Deputi Bidang Statistik Sosial dalam Penyelenggaraan Statistik Sosial	Persen	18,13	18,13	100	124.130.000	57.368.902	46,22
Total				108,25	9.343.761.000	8.165.406.943	87,39

Adapun alokasi anggaran terdapat pada masing-masing direktorat sebagai berikut:

Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan

1. IKU 1: Persentase Publikasi/Laporan Statistik Kependudukan dan Kependudukan yang Berkualitas” menggunakan anggaran dari 2 output yaitu BMA 004. Publikasi/Laporan Survei Angkatan Kerja Nasional dan BMA 005. Publikasi/Laporan Statistik Kependudukan Dan Ketenagakerjaan

Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat

Uraian	Pagu Revisi	Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran	Persen Realiasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
BDB.100 Pembinaan Statistik Sektoral Kesejahteraan Rakyat	42,374,000	24,618,902	17,755,098	58,10
BMA.003 Publikasi/Laporan Statistik Kesejahteraan Rakyat	593,493,000	565,915,111	27,577,889	95,35
BMA.006 Publikasi/Laporan Survei Sosial Ekonomi Nasional	1,926,927,000	1,643,447,113	283,479,887	85,29
Total	2,562,794,000	2,233,981,126	328,812,874	87,17

Direktorat Statistik Ketahanan Sosial

1. IKU 1: Persentase Publikasi/Laporan Statistik Ketahanan Sosial yang Berkualitas menggunakan anggaran dari 2 output yaitu:

a. BMA 006. Publikasi/Laporan Statistik Ketahanan Sosial

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2025
Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item; Transaksi
Periode Desember 2025

Kementerian : 054 BADAN PUSAT STATISTIK
Unit Organisasi : 01 BADAN PUSAT STATISTIK
Satuan Kerja : 018576 SEKRETARIAT UTAMA BADAN PUSAT STATISTIK Hal 1 dari 8

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
JUMLAH SELURUHNYA	1.824.950.000	0	1.319.573.118	81.302.831	1.380.875.949	84,98 %	244.074.051
GG Program Penyediaan dan Pelebaran Informasi Statistik	1.824.950.000	0	1.319.573.118	81.302.831	1.380.875.949	84,98 %	244.074.051
GG.2007 Penyediaan dan Pengembangan Statistik Ketahanan Sosial	1.824.950.000	0	1.319.573.118	81.302.831	1.380.875.949	84,98 %	244.074.051
BMA Data dan Informasi Publik	1.824.950.000	0	1.319.573.118	81.302.831	1.380.875.949	84,98 %	244.074.051
BMA.006 PUBLIKASI LAPORAN STATISTIK KETAHANAN SOSIAL	1.543.958.000	0	1.251.927.809	80.816.831	1.332.544.440	85,01 %	231.413.560
005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	1.140.000	0	1.140.000	0	2.530.000	68,18 %	1.190.000
001 PERSYAPAN	184.431.000	0	181.384.900	6.000.000	169.384.000	91,81 %	15.047.000
002 PENGUMPULAN DATA	122.543.000	0	96.220.188	26.403.107	110.623.296	90,27 %	11.919.704
003 PENYELAJIAN DAN ANALISIS	1.889.984.000	0	872.107.580	28.211.124	1.000.218.704	53,04 %	8.684.296
004 DISEMINASI DAN EVALUASI	233.260.000	0	29.885.840	0	29.885.840	12,81 %	183.374.160

b. BMA 008. Publikasi/Laporan Pendaftaran Podes

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2025
Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item; Transaksi
Periode Desember 2025

Kementerian : 054 BADAN PUSAT STATISTIK
Unit Organisasi : 01 BADAN PUSAT STATISTIK
Satuan Kerja : 018576 SEKRETARIAT UTAMA BADAN PUSAT STATISTIK Hal 7 dari 8

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
BMA.008 PUBLIKASI LAPORAN PENDAFTARAN PODES	80.992.000	0	57.645.309	686.000	68.331.309	84,37 %	12.660.691
001 PERSYAPAN	15.388.888	0	0	0	0	0,00 %	15.388.888
002 PENGUMPULAN DATA	65.603.112	0	67.645.309	686.000	68.331.309	98,06 %	7.261.799

2. IKU 2: Tingkat Keberhasilan Pembinaan Statistik Sektoral Direktorat Statistik Ketahanan Sosial

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2025

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item; Transaksi
Periode Desember 2025

Kementerian : 054 BADAN PUSAT STATISTIK

Unit Organisasi : 01 BADAN PUSAT STATISTIK

Satuan Kerja : 018576 SEKRETARIAT UTAMA BADAN PUSAT STATISTIK

Hal 1 dari 4

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
JUMLAH SELURUHNYA	44.466.000	0	21.080.000	10.310.000	31.390.000	70.59 %	13.076.000
GG Program Penyediaan dan Pelebaran Informasi Statistik	44.466.000	0	21.080.000	10.310.000	31.390.000	70.59 %	13.076.000
GG.2507 Penyediaan dan Pengembangan Statistik Ketahanan Sosial	44.466.000	0	21.080.000	10.310.000	31.390.000	70.59 %	13.076.000
BDS Fasilitas dan Pembinaan Lembaga	44.466.000	0	21.080.000	10.310.000	31.390.000	70.59 %	13.076.000
BDB.100 PEMBINAAN STATISTIK SEKTORAL KETAHANAN SOSIAL	44.466.000	0	21.080.000	10.310.000	31.390.000	70.59 %	13.076.000
100 PELAKSANAAN PEMBINAAN STATISTIK SEKTORAL	44.466.000	0	21.080.000	10.310.000	31.390.000	70.59 %	13.076.000

Lampiran 11. Surat Hasil Penilaian SAKIP



BADAN PUSAT STATISTIK

Jalan dr. Sutomo No. 6-8 Jakarta 10710, Telp. (021) 3841196, 3842508, 3810291-4,
Fax. (021) 3857048, Homepage: <http://www.bps.go.id> E-mail: bps@bps.go.id

Nomor : T-233/08100/PW.120/LHE/2025 Jakarta, 22 Desember 2025
Sifat : Terbatas
Lampiran : 1 (satu) set
Hal : Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Deputi Bidang Statistik Sosial Tahun 2025

Yth. Deputi Bidang Statistik Sosial
di

Tempat

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 45 Tahun 2023 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan BPS, Inspektorat Wilayah I telah melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP pada Deputi Bidang Statistik Sosial Tahun 2025. Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Deputi Bidang Statistik Sosial menunjukkan nilai sebesar **"73.00"** dengan predikat **"BB"**. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi SAKIP sudah **"Sangat Baik"**.

Kami mengucapkan terima kasih kepada Saudara beserta seluruh jajaran, atas kerjasama dan kesungguhan dalam memenuhi dokumen pendukung kegiatan Evaluasi Implementasi SAKIP. Semoga Deputi Bidang Statistik Sosial dapat lebih meningkatkan implementasi SAKIP di unit kerjanya untuk mewujudkan pemerintahan yang berorientasi hasil (*result-oriented government*) dan menindaklanjuti rekomendasi yang telah kami sampaikan.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.



Plt. Inspektur Wilayah I,

Eko Yuwono

Tembusan:

1. Kepala Badan Pusat Statistik
2. Wakil Kepala Badan Pusat Statistik
3. Inspektur Utama



* Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (BSS-E), BSSN

* Untuk lebih detail dan lengkap, silakan mengunjungi www.bps.go.id

Lampiran LHE Akuntabilitas Kinerja
Surat Nomor: T-233/08100/PW.120/LHE/2025
Tanggal 22 Desember 2025

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), serta berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 45 Tahun 2023 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan BPS, kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Deputi Bidang Statistik Sosial.

Tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil sehingga diharapkan dapat mendorong setiap unit kerja BPS untuk berkomitmen dan secara konsisten mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan melalui implementasi SAKIP. Secara khusus evaluasi AKIP bertujuan untuk: (a) Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP; (b) Menilai tingkat implementasi SAKIP; (c) Menilai tingkat akuntabilitas kinerja; (d) Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP; (e) Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

A. Dasar Hukum Evaluasi

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;



1. Dokumen ini telah dibubuhkan dengan tanda elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Elektronik (BNSF, BSSN).
2. Untuk lebih jelasnya silakan kunjungi laman BPS.

5. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pusat Statistik;
6. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik;
7. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 45 Tahun 2023 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan BPS;
8. Keputusan Kepala BPS Nomor 354 Tahun 2025 tentang Tim Evaluator AKIP di Lingkungan BPS Tahun 2025;
9. Surat Edaran Inspektur Utama Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pusat Statistik;
10. Surat Tugas Inspektur Wilayah I Nomor: B-46/08100/PW.110/2025, tanggal 18 Juli 2025 tentang Melaksanakan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2025 sesuai lampiran Evaluator dan Unit Kerjanya.

B. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang lingkup evaluasi AKIP mencakup, antara lain:

1. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
2. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
3. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
4. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja; dan
5. Penilaian capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainnya.

Nilai hasil akhir evaluasi atas implementasi SAKIP berupa penjumlahan komponen-komponen yang memberikan gambaran tingkat akuntabilitas kinerja dengan kategori predikat sebagai berikut:



* Dokumen ini telah diterbitkan secara resmi melalui menggunakan sistem elektronik yang dikeluarkan oleh Badan Statistik Daerah (BSD), BSSN

* Untuk lebih detail, kunjungi laman www.bps.go.id

Predikat	Interpretasi
AA (Nilai > 90 - 100)	Sangat Memuaskan
A (Nilai > 80 - 90)	Memuaskan
BB (Nilai > 70 - 80)	Sangat Baik
B (Nilai > 60 - 70)	Baik
CC (Nilai > 50 - 60)	Cukup (Memadal)
C (Nilai > 30 - 50)	Kurang
D (Nilai > 0 - 30)	Sangat Kurang

C. Metodologi Evaluasi

Metodologi evaluasi yang digunakan adalah kombinasi dari metode kuantitatif dan kualitatif dengan menyesuaikan pada tujuan evaluasi yang telah ditetapkan serta mempertimbangkan kendala yang ada. Dilakukan pemeriksaan dokumen dan analisis bukti-bukti yang telah dikirimkan sesuai jangka waktu permintaan dokumen evaluasi yang ditetapkan, serta perbandingan dengan berbagai informasi kinerja pada beberapa sistem manajemen kinerja BPS.

D. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Evaluasi juga dilakukan dengan mempertimbangkan tindak lanjut atas rekomendasi yang telah diberikan pada tahun sebelumnya. Berdasarkan informasi yang disampaikan, Deputi Bidang Statistik Sosial telah menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya dan melakukan perbaikan sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemanfaatan perencanaan kinerja melalui pemantauan ketercapaian target kinerja tahunan dan relevansinya terhadap target jangka menengah untuk menyusun rencana aksi dalam upaya peningkatan kinerja.
2. Meningkatkan penggunaan data kinerja dalam pembahasan aktivitas serta perubahan budaya organisasi melalui penggunaan Kipapp yang mengelola aktivitas kinerja untuk seluruh pegawai.

E. Hasil Evaluasi

Evaluasi dilakukan dengan metode evaluasi sederhana/*desk evaluation*, dan evaluasi terbatas menggunakan data awal pengisian kertas kerja implementasi SAKIP dan kriteria dokumen evaluasi yang diisi oleh anggota tim Evaluator, dan rewiu berjenjang oleh Ketua Tim dan Pengendali Teknis. Selanjutnya dilakukan rewiu antar tim evaluator melalui kegiatan panelisasi Evaluasi AKIP. Berdasarkan hasil evaluasi Implementasi



* Dokumen ini telah diterbitkan secara resmi oleh BPS menggunakan kertas elektronik yang diterbitkan oleh Balai Serbukas Elektronik (BSE), BSSN
 † Untuk kode QR di samping untuk menampilkan file asli

SAKIP pada Deputi Bidang Statistik Sosial memperoleh nilai “73.00” dengan predikat “BB” yaitu “Sangat Baik”, dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai	
			2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Perencanaan Kinerja	30	22.80	22.80
2.	Pengukuran Kinerja	30	21.30	20.40
3.	Pelaporan Kinerja	15	10.20	10.05
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	18.50	19.75
	Nilai Hasil Evaluasi	100	72.80	73.00
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB	BB

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada Deputi Bidang Statistik Sosial Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja

a. Kondisi pemenuhan Perencanaan Kinerja

- 1) Telah terdapat pedoman teknis perencanaan kinerja dalam Lampiran II, III dan IV Peraturan Kepala BPS Nomor 9 Tahun 2015.
- 2) Unit kerja telah menyusun Renstra Terbaru 2025-2029, ditandatangani Pimpinan, dan dipublikasikan pada laman PPID.
- 3) Unit Kerja telah menetapkan PK Pimpinan Unit Kerja Tahun 2025 serta mempublikasikan pada laman PPID.
- 4) Telah terdapat dokumen perencanaan aktivitas yang mendukung kinerja melalui aplikasi KRISNA.
- 5) Telah terdapat dokumen perencanaan anggaran yang mendukung kinerja melalui aplikasi KRISNA.
- 6) Telah terdapat seluruh dokumen perencanaan kinerja jangka menengah unit kerja periode sebelumnya yang ditandatangani dan dipublikasikan melalui PPID dengan lengkap, yaitu Reviu Renstra 2020 dan Renstra 2025-2029
- 7) Telah terdapat seluruh dokumen perencanaan kinerja jangka pendek lima tahun terakhir yang ditandatangani dan dipublikasikan pada



* Dokumen ini telah diterbitkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku oleh Badan Statistik Elektronik (BSE), BSSN

* Untuk lebih lanjut, kunjungi laman BSSN atau hubungi kontak di bawah ini

laman PPID Unit Kerja dengan lengkap, yaitu Perjanjian Kinerja 2025, Perjanjian Kinerja 2024, Perjanjian Kinerja 2023, Perjanjian Kinerja 2022 dan Perjanjian Kinerja 2021.

b. Kondisi kualitas Perencanaan Kinerja

- 1) Dokumen perencanaan kinerja jangka pendek berupa Perjanjian Kinerja tahun 2025 telah dipublikasikan tepat waktu pada aplikasi SIMONEV (paling lambat tanggal 24 Juni untuk unit kerja pusat dan 23 April untuk unit kerja daerah).
- 2) Renstra 2025-2029 telah memuat rumusan Tujuan, Sasaran, dan Indikator yang mengacu pada Perka BPS terkait IKU Tahun 2025-2029
- 3) Renstra 2025-2029 telah memuat target kinerja yang akan dicapai untuk periode 2025-2029
- 4) PK Pimpinan Unit Kerja telah mengacu pada Surat PLT Sestama B-172/02000/PR.130/2025 untuk unit kerja daerah dan No B-66/02000/PR.630/2025 untuk unit kerja pusat
- 5) Rapat pembahasan Renstra 2025-2029 telah dilengkapi undangan yang telah ditandatangani Pimpinan.
- 6) Penetapan target pada PK telah dilengkapi dengan penjelasan dasar hitung yang memadai untuk tiap indikator Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan.
- 7) Penetapan target pada PK telah dilengkapi dengan penjabaran basis data yang memadai untuk tiap Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan.
- 8) Penetapan target pada PK telah dilengkapi penjelasan argumen logis yang memadai untuk tiap Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan.
- 9) Penetapan target PK telah memerhatikan realisasi kinerja tahun sebelumnya/kondisi kinerja terakhir untuk tiap Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (terdapat baseline 2024 khusus pada PK 2025).
- 10) Penetapan target PK telah ditetapkan secara menantang dengan memperhatikan batas minimal berdasarkan kebijakan nasional untuk tiap Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan.



* Dokumen ini telah diterbitkan sesuai dengan Peraturan Pemerintah tentang Akses Informasi Publik (PPAIP) dan Undang-Undang tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

† Untuk lebih jelasnya, silakan kunjungi laman www.kemendagri.go.id

- 11) Daftar hadir rapat pembahasan Rencana Strategis 2025-2029 telah menunjukkan keterlibatan pimpinan.
 - 12) Rapat pembahasan Renstra 2025-2029 telah dilengkapi notulen yang telah ditandatangani Pimpinan.
 - 13) Penetapan target pada Renstra 2025-2029 telah dilengkapi dengan penjelasan dasar hitung yang memadai untuk tiap Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan
 - 14) Penetapan target pada Renstra 2025-2029 telah dilengkapi dengan penjabaran basis data yang memadai untuk tiap Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan
 - 15) Penetapan target pada Renstra 2025-2029 telah dilengkapi penjelasan argumen logis yang memadai untuk tiap Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan.
 - 16) Rapat penetapan target pada PK terbaru telah dilengkapi undangan yang ditandatangani Pimpinan.
 - 17) Daftar hadir rapat penetapan target pada PK terbaru telah menunjukkan keterlibatan pimpinan.
 - 18) Rapat penetapan target pada PK telah dilengkapi notulen yang ditandatangani Pimpinan.
 - 19) Unit Kerja telah memiliki dokumen penjenjangan kinerja disetiap level jabatan
- c. Kondisi pemanfaatan Perencanaan Kinerja
- 1) Unit Kerja telah memiliki dokumen anggaran yang mengacu pada kinerja yang ingin dicapai
 - 2) Unit Kerja telah memiliki dasar hitung revisi anggaran.
 - 3) Dokumen revisi anggaran telah ditandatangani oleh PPK dan KPA (KAK/ tabel revisi POK)
 - 4) Aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan oleh Unit Kerja telah mendukung kinerja yang ingin dicapai sebagaimana terlihat dalam dokumen Renstra.
 - 5) Unit Kerja telah melakukan monitoring capaian Renstra 2024.



* Dokumen ini telah diterbitkan dengan akses terbuka menggunakan format elektronik yang disediakan oleh Badan Nasional E-Procurement (BNEP), BSSN

¹ Untuk lebih detail, kunjungi laman <https://www.bnep.go.id/>

- 6) Rapat monitoring capaian Rencana Strategis telah dilengkapi undangan yang ditandatangani Pimpinan.
- 7) Daftar hadir rapat monitoring capaian Rencana Strategis telah menunjukkan keterlibatan pimpinan.
- 8) Rapat monitoring capaian Rencana Strategis telah dilengkapi notulen yang ditandatangani Pimpinan.
- 9) Notulen rapat monitoring capaian Rencana Strategis telah memuat rencana tindak lanjut yang akan dilakukan kedepan dalam rangka mencapai target jangka menengah untuk tiap Indikator Kinerja Sasaran.
- 10) Notulen rapat monitoring capaian Rencana Strategis telah memuat pihak yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan rencana tindak lanjut untuk tiap Indikator Kinerja Sasaran.
- 11) Reviu target Rencana Strategis telah dilakukan paling sedikit satu tahun sekali dan telah dilakukan identifikasi ketercapaian target akhir Renstra 2020-2024
- 12) Rapat pembahasan ketercapaian target akhir renstra 2020-2024 telah ditandatangani Pimpinan
- 13) Daftar hadir rapat pembahasan ketercapaian target akhir renstra 2020-2024 telah menunjukkan keterlibatan Pimpinan.
- 14) Rapat pembahasan ketercapaian target akhir renstra 2020-2024 telah dilengkapi oleh notulen yang ditandatangani Pimpinan.
- 15) Notulen rapat pembahasan ketercapaian target akhir renstra 2020-2024 telah membahas seluruh Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan.
- 16) Notulen rapat pembahasan ketercapaian target akhir renstra telah menyajikan status ketercapaian terhadap target akhir renstra 2024
- 17) Notulen rapat pembahasan ketercapaian target akhir renstra telah memuat penjelasan yang memadai terkait analisis faktor pendukung dan penghambat ketercapaian target di setiap indikator
- 18) Target akhir Renstra 2024 untuk Seluruh Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan telah tercapai



* Dokumen ini telah diterbitkan sesuai dengan kebijakan aksesibilitas yang ditetapkan oleh Badan Kebijakan Fiskal (BKF), BSSN

* Untuk lebih lanjut, kunjungi situs www.bkf.go.id

Kelemahan Komponen Perencanaan Kinerja:

a. Kelemahan Kualitas Perencanaan Kinerja

- 1) Kualitas rumusan hasil berdasarkan Perka IKU BPS 2025-2029 belum disusun berdasarkan Critical Succes Factor (CSF) yang memadai untuk mencapai kondisi kinerja yang ingin dicapai
- 2) Dokumen perencanaan kinerja belum sepenuhnya memenuhi ukuran kinerja yang SMART.
- 3) Rumusan IKU 2025-2029 belum sepenuhnya menunjukkan hubungan sebab-akibat antar level kinerja yang memadai dalam menggambarkan kondisi kinerja yang harus dicapai
- 4) Penetapan SKP tahun 2025 pada aplikasi KipApp belum mencakup seluruh pegawai, yaitu sebesar 98,96%.
- 5) Dokumen perencanaan kinerja belum sepenuhnya dapat menunjukkan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (Crosscutting).

b. Kelemahan Pemanfaatan Perencanaan Kinerja

- 1) Notulen rapat pembahasan monitoring capaian Renstra telah menyajikan target jangka menengah tahun 2024 dengan realisasi tahun 2024, namun nilai target yang tersaji dalam notulen rapat tidak sesuai dengan nilai target yang terdapat dalam dokumen Renstra Reviu 2020-2024, yaitu pada IKS 1.1.1. (notulen rapat : Target = 100 dan dokumen Renstra Reviu : Target = 96)
- 2) Notulen rapat pembahasan monitoring capaian Renstra telah memuat capaian tahun 2024 terhadap target jangka menengah tahun 2024 untuk tiap Indikator Kinerja Sasaran, namun capaian tahun 2024 yang tertuang dalam notulen rapat tidak sesuai akibat nilai target 2024 yang tercantum di notulen rapat dengan yang tercantum dalam dokumen Renstra Reviu 2020-2024 berbeda, yaitu IKS 1.1.1. (notulen rapat : Target 2024 = 100; Realisasi 2024 = 100 dan Capaian 2024 = 100% dan dokumen Renstra Reviu : Target 2024 = 96; Realisasi = 100; Capaian Renstra 2024 = 104.17%)



* Dokumen ini telah diterbitkan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Kebijakan Fiskal (BSF), BSSN

* Untuk lebih jelasnya, silakan kunjungi laman [www.bps.go.id](#)

- 3) Notulen rapat pembahasan monitoring capaian Renstra telah memuat analisis kendala serta upaya yang telah dilakukan hingga periode 2024 pada setiap Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan. Namun demikian, terdapat beberapa indikator yang redaksinya tidak memuat uraian kendala, yaitu indikator 1.1.2, 1.1.3, dan 2.1.2.
- 4) Notulen rapat pembahasan monitoring capaian Renstra telah memuat batas waktu rencana tindak lanjut/rencana aksi pada setiap Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan. Namun demikian, batas waktu yang dicantumkan adalah Desember 2024, sedangkan rapat dilaksanakan pada Januari 2025, sehingga batas waktu tersebut tidak dimungkinkan terjadi.
- 5) Notulen rapat pembahasan ketercapaian target akhir Renstra 2020-2024 telah memuat target, reviu target, dan realisasi 2020–2024. Namun, ketercapaian akhir Renstra yang tertuang dalam notulen tidak sesuai akibat inkonsistensi nilai target Renstra 2024 antara notulen rapat dengan dokumen Renstra Reviu 2020-2024, yaitu pada IKSS 1.1.1, dimana dalam notulen di sebutkan ketercapaian akhir Renstra adalah 100% (T = 100%; R = 100%; C = 100%) sedangkan bila berdasarkan dokumen Renstra Reviu 2020-2024 ketercapaian akhir Renstra adalah 104.17% (T = 96; R = 100; C = 104.17)

2. Pengukuran Kinerja

a. Kondisi pemenuhan Pengukuran Kinerja

- 1) Telah terdapat pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja yaitu Peraturan Kepala BPS Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan BPS Pasal 23 dan 24.
- 2) Terdapat dasar hitung hingga X dan Y pada realisasi dari seluruh Indikator Kinerja pada notulen tw I 2025
- 3) Terdapat Analisis dan Penjelasan terkait basis data hingga X dan Y dari realisasi di seluruh indikator kinerja pada notulen tw I 2025
- 4) Telah terdapat Surat Keputusan/SK Tim SAKIP Unit Kerja.



* Dokumen ini telah diterbitkan secara resmi oleh BPS menggunakan sistem elektronik yang terdapat di situs Sistem Akuntabilitas Kinerja (SAKIP), BSSN

† Kode QR di samping untuk menampilkan file asli

- 5) Telah terdapat ketentuan yang jelas jika terjadi kesalahan data pada proses pengumpulan dan pengukuran data kinerja.
 - 6) Telah terdapat kemudahan untuk mengakses data bagi pihak yang berkepentingan pada mekanisme pengumpulan data kinerja.
 - 7) Telah terdapat kemudahan untuk menelusuri sumber datanya yang valid pada mekanisme pengumpulan data kinerja.
 - 8) SK Tim SAKIP telah memuat nama dan kedudukan dalam Tim.
 - 9) SK Tim SAKIP telah mengakomodir perwakilan dari Tim Kerja Penanggungjawab IKU.
 - 10) SK Tim SAKIP telah memuat uraian tugas untuk tiap kedudukan dalam Tim.
 - 11) SK Tim SAKIP telah memuat tugas untuk melakukan monitoring target, realisasi dan capaian jangka menengah
 - 12) SK Tim SAKIP telah memuat tugas untuk melakukan monitoring target, realisasi dan capaian triwulanan
 - 13) Telah terdapat SOP Pengumpulan Data Kinerja yang up to date.
 - 14) Telah terdapat penanggung jawab yang jelas pada mekanisme pengumpulan data kinerja.
 - 15) Telah terdapat waktu delivery yang jelas pada mekanisme pengumpulan data kinerja.
- b. Kondisi kualitas Pengukuran Kinerja
- 1) Unit Kerja telah melaksanakan rapat evaluasi capaian kinerja.
 - 2) Undangan rapat evaluasi capaian kinerja telah ditandatangani Pimpinan.
 - 3) Daftar hadir rapat evaluasi capaian kinerja telah menunjukkan keterlibatan Pimpinan.
 - 4) Notulen rapat evaluasi capaian kinerja telah ditandatangani Pimpinan.
 - 5) Seluruh IKS telah konsisten antara target pada PK 2025 dan FRA 2025.
 - 6) Notulen rapat evaluasi capaian kinerja telah memuat informasi target dan realisasi setiap Indikator Kinerja Sasaran.



* Dokumen ini telah diterbitkan sesuai dengan kebijakan pengumpulan, pemrosesan, penyimpanan, penyebaran, dan pembuangan informasi yang ditetapkan oleh Badan Kebijakan Fiskal (BKF), BSSN

† Untuk lebih lanjut, kunjungi [www.bkf.go.id](#) atau hubungi kami di [021-50132000](tel:021-50132000)

- 7) Notulen rapat evaluasi capaian kinerja telah memuat pembahasan analisis masalah/kendala setiap Indikator Kinerja Sasaran.
 - 8) Notulen rapat evaluasi capaian kinerja telah memuat pembahasan solusi/strategi yang telah dilakukan setiap Indikator Kinerja Sasaran.
 - 9) Notulen rapat evaluasi capaian kinerja telah memuat penetapan rencana aksi/rencana tindak lanjut setiap Indikator Kinerja Sasaran.
 - 10) Notulen rapat evaluasi capaian kinerja telah memuat penetapan PIC yang akan melaksanakan rencana aksi/rencana tindak lanjut yang telah ditetapkan untuk setiap Indikator Kinerja Sasaran.
 - 11) Unit Kerja telah mengirimkan FRA setiap triwulannya dengan tepat waktu.
 - 12) Hasil pengukuran SKP bulanan dapat diverifikasi atau ditelusuri sampai ke sumbernya.
 - 13) SKP bulanan yang berstatus dinilai telah divalidasi oleh pejabat penilai kinerja.
 - 14) Pengelolaan data kinerja telah memanfaatkan aplikasi monev.bps.go.id dan webapps.bps.go.id/kipapp, namun masih belum memadai karena belum terintegrasi antara perencanaan, pengukuran, dan capaian kinerja, sehingga pemantauan atas keselarasan antara perencanaan, capaian kinerja unit kerja, dan capaian kinerja individu belum dapat dilakukan.
- c. Kondisi pemanfaatan Pengukuran Kinerja
- 1) SKP bulanan telah dimanfaatkan sebagai dasar penyesuaian Tunjangan Kinerja meskipun belum terintegrasi secara sistem.
 - 2) Pengukuran kinerja telah menjadi dasar dalam penempatan/penghapusan jabatan baik struktural maupun fungsional. Persentase penyederhanaan struktur Organisasi BPS telah mencapai 100% pada tahun 2023 dan telah dalam posisi ideal meskipun kedepannya masih perlu pertimbangan terkait eselon III dan IV yang masih ada khususnya di Unit Kerja Pusat. Implementasi di Unit Kerja Pusat dan BPS Provinsi berupa pelaksanaan Peraturan BPS Nomor 4



* Dokumen ini telah diterbitkan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Statistik Daerah (BSD), BSSN

¹ Untuk kode QR di samping untuk menampilkan file asli

Tahun 2022 Tanggal 29 November 2022 tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan BPS.

- 3) Pengukuran kinerja telah mempengaruhi kebutuhan pegawai. Unit Kerja telah memenuhi formasi jabatan sesuai hasil analisis beban kerja (Kepka BPS Nomor 182 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Jabatan Hasil Analisis Beban Kerja Tahun 2024 di Lingkungan BPS).
- 4) Notulen rapat pembahasan Renstra telah memuat strategi dalam Renstra BPS.
- 5) Notulen rapat penyusunan Renstra telah memuat arah kebijakan dalam Renstra BPS.
- 6) Notulen rapat penyusunan Renstra telah memuat aktivitas dalam Renstra BPS.
- 7) Notulen rapat penyusunan Renstra telah memuat pembahasan anggaran dalam Renstra.
- 8) Notulen rapat evaluasi capaian kinerja telah memuat pembahasan upaya efisiensi.

Kelemahan Komponen Pengukuran Kinerja:

a. Kelemahan Kualitas Pengukuran Kinerja

- 1) Informasi target, realisasi, dan capaian pada indikator kinerja belum seluruhnya selaras antara Notulen rapat kinerja triwulan I Tahun 2025, FRA triwulan I Tahun 2025 dengan dokumen sumber/pendukung FRA triwulan I Tahun 2025, yaitu :
 - a). Pada IKSS 1.1.0.1 tidak dijelaskan asal perolehan angka TPDS(DP) dan TPDS(U), sehingga validitas angka tersebut tidak dapat dipastikan. Hal ini karena masih terdapat rumus pembentuk kedua komponen, misalnya TPDS(DP) yang terbentuk dari Pemanfaatan Data Statistik Sosial pada Dokumen Pemerintah dan Kualitas Pemanfaatan Data pada Dokumen yang diukur dari rata-rata Relevansi dan Kemutakhiran data. Selain itu, untuk indikator proksi IKSS 1.1.0.1 tidak terdapat bukti yang menunjukkan bahwa pengguna data bidang statistik sosial menggunakan data tersebut



* Dokumen ini telah diterbitkan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Badan Statistik Elektronik (BSE), BSSN

¹ Untuk kode QR di samping untuk menampilkan file asli

sebagai dasar perencanaan, monitoring, dan evaluasi dengan kategori instansi sebanyak 2.805;

b). Pada IKSS 2.1.0.1 tidak terdapat bukti dukung yang membuktikan Nilai Rata-Rata IPS dari K/L Mitra (alokasi baru) pada tahun dasar (2023).

- 2) Notulen Rapat Evaluasi Capaian Kinerja Triwulan I tahun 2025 belum memuat penetapan batas waktu tindak lanjut tiap Indikator Kinerja Sasaran sesuai ketentuan. Pada Notulen Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025, terdapat rencana tindak lanjut dengan batas waktu hingga Triwulan III 2025, padahal ketentuan menetapkan batas maksimal pada Triwulan II 2025. Selain itu, sebagian batas waktu hanya dicantumkan dalam bentuk triwulan tanpa menyebutkan bulan secara jelas. Hal ini terdapat pada IKS 1.1.0.1 dan IKS 2.1.0.1.
- 3) Seluruh rencana tindak lanjut pada Notulen Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025 belum didukung oleh bukti pelaksanaan.
- 4) Penilaian SKP bulanan tahun 2025 pada aplikasi KipApp belum mencakup seluruh pegawai, yaitu sebesar 96,84%.
- 5) Unit Kerja belum memiliki media pengelolaan data kinerja selain yang berasal dari ketentuan BPS Pusat.

b. Kelemahan Pemanfaatan Pengukuran Kinerja

- 1) Rapat evaluasi capaian kinerja TW I 2025 tidak dihadiri oleh sebagian besar/seluruh pegawai (minimal 80 persen dari total pegawai)
- 2) Unit kerja belum menyampaikan mekanisme reward and punishment kepada seluruh pegawai di unit kerja.
- 3) Reward and punishment Triwulan I tahun 2025 belum menilai seluruh pegawai di unit kerja
- 4) Unit kerja belum memiliki mekanisme reward and punishment level tim kerja/pegawai yang telah dilegalisasi untuk Triwulan I tahun 2025
- 5) Reward and punishment Triwulan I tahun 2025 belum didukung kertas kerja yang telah dilegalisasi



* Dokumen ini telah diterbitkan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Kebijakan Fiskal (BKF), BSSN
* Untuk lebih detail, kunjungi laman [www.bkf.go.id](#)

- 6) Kriteria reward and punishment dalam kertas kerja pada tingkat kedeputian belum memuat paling sedikit satu kriteria yang terkait dengan kinerja.
- 7) Bukti reward and punishment belum konsisten dengan kertas kerja karena tidak terdapat mekanisme, kertas kerja, maupun bukti pelaksanaan reward and punishment pada tingkat kedeputian.

3. Pelaporan Kinerja

a. Kondisi pemenuhan Pelaporan Kinerja

- 1) Unit kerja telah melaksanakan rapat evaluasi capaian kinerja setiap triwulanan (Triwulan II, III, dan IV tahun 2024).
- 2) Undangan rapat evaluasi capaian kinerja setiap triwulanan (Triwulan II, III, dan IV tahun 2024) telah ditandatangani Pimpinan.
- 3) Daftar hadir rapat evaluasi capaian kinerja setiap triwulanan (Triwulan II, III, dan IV tahun 2024) telah menunjukkan keterlibatan Pimpinan.
- 4) Notulen rapat evaluasi capaian kinerja setiap triwulanan (Triwulan II, III, dan IV tahun 2024) telah ditandatangani Pimpinan.
- 5) Notulen rapat evaluasi capaian kinerja setiap triwulanan (Triwulan II, III, dan IV tahun 2024) telah memuat informasi target dan realisasi.
- 6) Notulen rapat evaluasi capaian kinerja setiap triwulanan (Triwulan II, III, dan IV tahun 2024) telah memuat pembahasan rencana aksi/rencana tindak lanjut tiap IKS.
- 7) Notulen rapat evaluasi capaian kinerja setiap triwulanan (Triwulan II, III, dan IV tahun 2024) telah memuat kesepakatan pihak yang melakukan tindak lanjut tiap IKS.
- 8) Laporan Kinerja telah disusun dan diformalkan (ditandatangani pimpinan Unit Kerja).
- 9) Laporan Kinerja telah dipublikasikan pada PPID.
- 10) Laporan Kinerja telah disampaikan tepat waktu (tidak melebihi tanggal 21 Februari 2025)



* Dokumen ini telah diterbitkan sesuai dengan kebijakan aksesibilitas yang ditetapkan oleh Badan Kebijakan Fiskal (BKF), BSSN

¹ Untuk lebih jelasnya, kunjungi laman www.bkf.go.id

- 11) Laporan Kinerja 5 periode terakhir (2020, 2021, 2022, 2023 dan 2024) telah disusun, diformalkan, dan dipublikasikan tepat waktu.
- b. Kondisi kualitas Pelaporan Kinerja
- 1) Sistematika Laporan Kinerja telah memuat: Ringkasan Eksekutif, Bab I Pendahuluan, Bab II Perencanaan Kinerja, Bab III Akuntabilitas Kinerja, dan Bab IV Penutup.
 - 2) Bab II Laporan Kinerja telah memuat PK tahun 2024 dengan tujuan, sasaran, dan indikator kinerja sesuai dengan Perka BPS Nomor 3 Tahun 2022.
 - 3) Laporan Kinerja telah memuat seluruh pencapaian Sasaran Strategis dan IKS sesuai dengan Perka BPS Nomor 3 Tahun 2022.
 - 4) Informasi target pada Laporan Kinerja telah konsisten dengan PK tahun 2024.
 - 5) Laporan Kinerja telah memuat tabel perbandingan data kinerja yang memadai antara target tahun 2024 dengan realisasi tahun 2024.
 - 6) Laporan Kinerja telah memuat tabel perbandingan data kinerja yang memadai antara target tahun 2024 dengan realisasi tahun 2024 yang konsisten dengan FRA Triwulan IV tahun 2024.
 - 7) Laporan Kinerja telah memuat tabel perbandingan realisasi tahun 2024 dengan realisasi tahun 2023.
 - 8) Laporan Kinerja telah memuat tabel perbandingan realisasi tahun 2024 dengan realisasi tahun 2022.
 - 9) Laporan Kinerja telah memuat tabel perbandingan realisasi tahun 2024 dengan realisasi tahun 2021.
 - 10) Laporan Kinerja telah memuat informasi perbandingan capaian kinerja total periode 2020-2024.
 - 11) Laporan Kinerja telah memuat perbandingan capaian kinerja 2024 di Unit Kerja dengan capaian kinerja 2024 di level nasional (dalam/antar eselon I/II)
 - 12) Laporan Kinerja telah memuat analisis terkait perbandingan kinerja serta rekomendasi perbaikan kinerja kedepannya



* Dokumen ini telah diterbitkan sesuai dengan kebijakan terkait aksesibilitas yang ditetapkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSSE), BSSN

¹ Untuk kode QR di samping untuk menampilkan ke atas

- 13) Seluruh capaian kinerja pada Laporan Kinerja telah didasarkan atas data yang valid dan dapat diandalkan.
 - 14) Laporan Kinerja telah memuat analisis atas ketercapaian kinerja setiap IKS.
 - 15) Laporan Kinerja telah memuat evaluasi atas capaian kinerja setiap IKS disertai masalah/kendala dan solusi/upaya dalam upaya mencapai target kinerja.
 - 16) Laporan Kinerja telah memuat informasi efisiensi anggaran.
 - 17) Laporan Kinerja telah memuat upaya-upaya efisiensi yang telah dilakukan.
 - 18) Laporan Kinerja telah memuat nilai/kuantifikasi efisiensi yang telah dicapai hasil dari upaya yang telah dilakukan.
- c. Kondisi pemanfaatan Pelaporan Kinerja
- 1) Rapat evaluasi capaian kinerja triwulan IV tahun 2024 telah dihadiri seluruh/sebagian besar pegawai.
 - 2) Telah terdapat pembagian kinerja berdasarkan matriks peran hasil Pimpinan dan Ketua Tim (JFT) tahun 2024.
 - 3) Notulen rapat evaluasi capaian kinerja triwulan IV 2024 telah menjabarkan informasi penyesuaian anggaran untuk mencapai kinerja.
 - 4) Laporan Kinerja telah memuat informasi realisasi anggaran keuangan tiap sasaran strategis.

Kelemahan Komponen Pelaporan Kinerja:

a. Kelemahan Pemenuhan Pelaporan Kinerja

- 1) Notulen rapat evaluasi capaian kinerja setiap triwulanan (Triwulan II, III, dan IV Tahun 2024) telah memuat pembahasan masalah/kendala serta solusi/upaya yang telah dilakukan pada setiap IKS. Namun, pada Notulen Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2024 terdapat beberapa indikator yang redaksinya tidak memuat uraian kendala, yaitu indikator 1.1.2, 1.1.3, 2.1.1, dan 2.1.2.



* Dokumen ini telah diterbitkan sesuai dengan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan Sistem Informasi Elektronik (SIE), E-Sign, dan E-Procurement.

* Untuk lebih detail, kunjungi laman www.bps.go.id

- 2) Notulen rapat evaluasi capaian kinerja setiap triwulanan (Triwulan II, III, dan IV tahun 2024) belum memuat kesepakatan batas waktu tindak lanjut tiap IKS, yaitu:
 - a). Pada Notulen Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 batas waktu tindak lanjut IKSS 1.1.1, 1.1.2, dan 1.1.3 hanya disesuaikan dengan jadwal rilis masing-masing indikator tanpa mencantumkan minimal triwulan dan tahun, serta batas waktu tindak lanjut IKSS 2.1.1 dan 2.1.2 ditetapkan Desember 2024 yang melewati ketentuan maksimal Triwulan III Tahun 2024;
 - b). Pada Notulen Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2024 batas waktu tindak lanjut IKSS 1.1.1 juga hanya disesuaikan dengan jadwal rilis tanpa mencantumkan triwulan dan tahun;
 - c). Pada Notulen Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2024 batas waktu tindak lanjut seluruh IKSS dicantumkan Desember 2024–Triwulan I 2025 bahkan tidak secara jelas menyebutkan triwulan tertentu, sehingga melewati batas minimal yang ditetapkan yaitu Triwulan I Tahun 2025.

b. Kelemahan Kualitas Pelaporan Kinerja

- 1) LAKIN pada Bab II/Lampiran telah memuat target Renstra Tahun 2020-2024, namun target yang tertuang dalam LAKIN belum sesuai dengan target yang ada di dokumen Renstra Reviu, yaitu pada:
 - a). a). IKS 1.1.1. (LAKIN : Target 2022 = 100; Target 2023 = 100; Target 2024 = 100; sedangkan dokumen Renstra Reviu : Target 2022 = 96; Target 2023 = 96; Target 2024 = 96)
 - b). IKS 2.1.1. (LAKIN : Target 2020 = 93; Target 2021 = 96; Target 2022 = 94; Target 2023 = 100; sedangkan dokumen Renstra Reviu : Target 2020 = 100; Target 2021 = 94; Target 2022 = 87; Target 2024 = 97)
 - c). IKS 2.1.2. (LAKIN : Target 2021 kosong, tidak ada target; sedangkan dokumen Renstra Reviu Target 2021 = 100)
- 2) Laporan Kinerja belum memuat tabel perbandingan realisasi tahun 2024 dengan target Renstra tahun 2024 yang selaras dengan notulen monitoring capaian Renstra yaitu Target renstra iks 1.1.1 masih mengacu ke target PK 2024 bukan target Renstra 2024



* Dokumen ini telah diterbitkan dengan akses terbuka menggunakan format elektronik yang disediakan oleh Badan Statistik Desa (BSD), BSSN

¹ Untuk lebih detail, kunjungi laman www.bssn.go.id

- 3) Laporan Kinerja (LAKIN) telah memuat evaluasi dan analisis per Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan melalui tabel perbandingan antara realisasi dan capaian akhir Renstra. Namun, penyajian tersebut belum selaras dengan notulen monitoring capaian Renstra. Selain itu, pada LAKIN tidak tercantum kendala maupun solusi per indikator dalam analisis tabel perbandingan tersebut.
- 4) Perbandingan pada Laporan Kinerja belum dilengkapi dengan analisis.
- 5) Analisis dan evaluasi atas capaian kinerja setiap IKS pada Laporan Kinerja belum sesuai dengan notulen pembahasan FRA Triwulanan tahun 2024, yaitu:
 - a). Pada indikator 1.1.2 dan 1.1.3, Notulen mencantumkan redaksi seolah tidak terdapat kendala, namun dalam Laporan Kinerja justru tercantum adanya kendala;
 - b). Pada indikator 2.1.1 dan 2.1.2, Notulen menyebutkan bahwa Direktorat Kependudukan dan Ketenagakerjaan serta Direktorat Ketahanan Sosial tidak memiliki kendala, sedangkan dalam Laporan Kinerja terdapat uraian kendala.
- 6) Bab III Laporan Kinerja belum memuat informasi rencana perbaikan ke depan pada setiap indikator yang selaras dengan notulen FRA triwulan IV 2024 atau monitoring capaian Renstra 2024
- 7) Bab IV Laporan Kinerja belum menjelaskan Informasi rencana perbaikan secara umum hasil kesimpulan dari pembahasan rencana aksi atau tindaklanjut yang telah dijelaskan pada Bab III.

c. Kelemahan Pemanfaatan Pelaporan Kinerja

- 1) Informasi dalam laporan kinerja berkala belum digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja yaitu dengan pelaksanaan tindak lanjut hasil rapat evaluasi capaian kinerja triwulan IV tahun 2024 belum didukung dengan bukti yang memadai, yaitu:
 - a). Pada IKSS 1.1.1, dalam Notulen Direktorat Kesejahteraan Rakyat merencanakan koordinasi penyusunan jadwal kegiatan tahun 2025 dan perubahan publikasi. Namun, bukti dukung yang dilampirkan tidak menunjukkan adanya notulen maupun bahan paparan yang



* Dokumen ini telah diterbitkan secara resmi oleh BPS menggunakan format elektronik yang diterbitkan oleh Badan Statistik Elektronik (BSE), BSSN

¹ Untuk kode QR di samping untuk menampilkan ke atas

membahas jadwal kegiatan 2025 dan perubahan publikasi tersebut. Selain itu, Direktorat Ketahanan Sosial dalam Notulen merencanakan evaluasi atas publikasi Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK), Statistik Kriminal, serta Penghitungan dan Analisis Kemiskinan Makro Indonesia, namun dalam bukti dukung tidak terdapat dokumen rapat evaluasi terkait tiga publikasi tersebut;

- b). Pada IKSS 1.1.2, dalam Notulen Direktorat Kependudukan dan Ketenagakerjaan merencanakan persiapan penghitungan indikator pembangunan pada periode mendatang dengan memperhatikan perubahan program pemerintah dan Renstra BPS terbaru, namun tidak terdapat bukti dukung atas persiapan tersebut. Selain itu, tidak ditemukan bukti dukung atas rencana tindak lanjut Direktorat Ketahanan Sosial;
 - c). Pada IKSS 1.1.3, dalam Notulen Direktorat Ketahanan Sosial merencanakan evaluasi terhadap tiga indikator, namun bukti dukung yang tersedia hanya berupa tabulasi data, bukan hasil evaluasi.
 - d). Pada IKSS 2.1.1 dan 2.1.2, dalam Notulen Direktorat Ketahanan Sosial merencanakan penyusunan rancangan jadwal pembinaan sejak awal tahun, namun tidak terdapat bukti dukung atas hal tersebut. Selain itu, pada Direktorat Kependudukan dan Ketenagakerjaan terdapat rencana tindak lanjut berupa pembinaan statistik sektoral pada tahun berikutnya sesuai ketetapan BPS, namun tidak ditemukan bukti pelaksanaannya.
- 2) Unit Kerja belum memiliki mekanisme reward and punishment yang telah dilegalkan pada level tim/pegawai untuk tahun 2024
 - 3) Reward and punishment tahun 2024 belum didukung kertas kerja yang telah dilegalisasi
 - 4) Kriteria reward and punishment dalam kertas kerja pada tingkat ke deputian belum memuat paling sedikit satu kriteria yang terkait dengan kinerja.
 - 5) Bukti reward and punishment belum konsisten dengan kertas kerja karena tidak terdapat mekanisme, kertas kerja, maupun bukti pelaksanaan reward and punishment pada tingkat ke deputian.



* Dokumen ini telah diterbitkan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Kebijakan Fiskal (BKF), BSSN
† Untuk lebih detail, kunjungi laman [www.bkpsdpr.go.id](#)

- 6) Informasi dalam Laporan Kinerja belum sepenuhnya mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi dengan persentase pegawai pada Unit Kerja telah menyusun SKP Penilaian 2024 pada Aplikasi KipApp sebesar 97,42%.

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

a. Kondisi pemenuhan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

- 1) Telah terdapat pedoman teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal, berupa Peraturan Kepala BPS Nomor 45 Tahun 2023 tentang Pedoman Evaluasi AKIP di Lingkungan BPS, Keputusan Kepala BPS Nomor 354 Tahun 2025 tentang Tim Evaluator AKIP di Lingkungan BPS 2025, dan Surat Edaran Inspektur Utama BPS Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Teknis Evaluasi AKIP BPS 2025
- 2) Telah terdapat Petunjuk Teknis Evaluasi AKIP, berupa SOP Evaluasi AKIP untuk Unit Kerja BPS Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- 3) Evaluasi AKIP dilakukan terhadap seluruh Unit Kerja Pusat dan Daerah yang telah menyusun Laporan Kinerja Tahun 2024.
- 4) Evaluasi AKIP telah dilakukan oleh Tim Evaluator dalam bentuk gugus tugas.
- 5) LHE AKIP pada Unit Kerja telah dilegalisasi oleh Inspektur.
- 6) LHE AKIP yang dilegalisasi Inspektur telah disampaikan kepada Unit Kerja.
- 7) Evaluasi AKIP Unit Kerja dilakukan dengan memanfaatkan instrumen yang dibangun oleh Koordinator Evaluasi Pusat.
- 8) Pemberitahuan Evaluasi AKIP Tahun 2025 pada seluruh Unit Kerja Pusat dan Daerah telah dilakukan melalui Surat Inspektur Utama B-13/08000/PW.110/2025 tanggal 26 Mei 2025
- 9) Unit Kerja telah memenuhi dokumen evaluasi AKIP dengan lengkap dan tepat waktu
- 10) Unit Kerja telah melakukan tindak lanjut atas semua rekomendasi hasil evaluasi tahun sebelumnya.



* Dokumen ini telah diterbitkan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Kebijakan Fiskal (BKF), BSSN

¹ Untuk kode QR di samping untuk menampilkan ke sini

- 11) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal 3 periode terakhir (2022, 2023, 2024) dilaksanakan secara konsisten (terjadi peningkatan nilai SAKIP selama 3 tahun terakhir)

b. Kondisi kualitas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

- 1) Evaluasi AKIP telah dilaksanakan sesuai standar waktu.
- 2) Evaluasi AKIP telah dilaksanakan sesuai standar anggaran.
- 3) Evaluasi AKIP dilaksanakan oleh Tim Evaluator yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Evaluasi AKIP.
- 4) Evaluasi AKIP telah dilakukan dengan mekanisme revidi berjenjang dari Anggota Tim, Ketua Tim dan Pengendali Teknis serta revidi tingkat 2 dalam bentuk panel antar Tim.
- 5) Pimpinan Unit Kerja atau perwakilan telah mengikuti kegiatan entry meeting pelaksanaan evaluasi AKIP 2025
- 6) Pimpinan Unit Kerja atau perwakilan telah mengikuti kegiatan sosialisasi pelaksanaan evaluasi AKIP 2025
- 7) Pengisian Kertas Kerja Implementasi SAKIP dalam pengelolaan akuntabilitas kinerja dilakukan oleh Tim SAKIP Unit Kerja/Operator Unit Kerja.
- 8) Evaluasi AKIP telah dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai yaitu dengan: instrumen evaluasi yang komprehensif; LHE telah memuat penjelasan kelemahan pada tiap kriteria beserta rekomendasi yang spesifik pada aspek pemenuhan, kualitas, dan pemanfaatan; telah terdapat kerangka logis pelaksanaan evaluasi AKIP; ketersediaan anggaran untuk pendalaman evaluasi; dan telah dilakukan panelisasi hasil evaluasi antar Unit Kerja yang dievaluasi.
- 9) Tim Evaluasi AKIP telah melakukan monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi evaluasi AKIP Unit Kerja tahun 2024 dan melaksanakan Evaluasi tahun 2025.
- 10) Laporan Hasil Evaluasi AKIP 2024 telah disahkan oleh pimpinan APIP secara tepat waktu.



* Dokumen ini telah diterbitkan sesuai dengan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SP2BE), BSSN

¹ Untuk lebih jelasnya, silakan kunjungi laman www.kemendagri.go.id

- 11) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan menggunakan Teknologi Informasi, yaitu aplikasi SINERGI dan berbasis web yang dapat diakses melalui sinergi.web.bps.go.id.
- c. Kondisi pemanfaatan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal
- 1) Seluruh tindak lanjut rekomendasi LHE 2024 telah sesuai.
 - 2) Unit kerja telah dapat mencapai target kinerja pada triwulan I 2025 dengan total capaian kinerja sebesar minimal 100%
 - 3) Hasil Evaluasi AKIP telah dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja dengan terdapat peningkatan hasil evaluasi dibanding tahun sebelumnya.
 - 4) Hasil Evaluasi AKIP telah dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja.
 - 5) Unit Kerja telah memperoleh predikat WBK/WBBM dari (Tim Penilai Internal BPS/Tim Penilai Eksternal) dengan Kategori C (telah melakukan Pencanangan ZI)
 - 6) Unit kerja telah mendapatkan penghargaan yang terkait dengan kinerja pada periode Juli 2024 s.d. Juni 2025, yaitu apresiasi dari KL atas kerjasama mitra pengukuran indeks capaian revolusi mental

Kelemahan Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal:

-

F. Rekomendasi

Terhadap hasil evaluasi tersebut serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, kami merekomendasikan kepada Deputi Bidang Statistik Sosial untuk:

1. Meningkatkan kualitas monitoring kinerja strategis dengan menyempurnakan notula monitoring capaian Renstra 2025 melalui penambahan analisis capaian yang akurat, kendala yang mendalam, solusi yang terstruktur, rencana tindak lanjut yang spesifik, penetapan PIC yang jelas, dan batas waktu yang tegas [1.3.2.1]



* Dokumen ini telah diterbitkan secara resmi oleh BPS menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSSiE), BSSN

¹ Untuk kode QR di samping untuk menampilkan file asli

2. Meningkatkan kualitas evaluasi kinerja triwulanan dengan menyempurnakan notula TW I 2026 melalui penambahan analisis kendala yang mendalam, solusi yang terstruktur, rencana tindak lanjut yang spesifik, penetapan PIC yang jelas, dan batas waktu yang tegas sesuai pedoman yang telah ditetapkan [2.2.10.1]
3. Memperbaiki validitas data capaian kinerja TW I 2026 yang memungkinkan penelusuran hingga ke bukti dukung serta memastikan kesesuaian dengan basis data yang telah ditetapkan sehingga dapat meningkatkan kredibilitas dan akuntabilitas pengukuran kinerja organisasi [2.2.11.1]
4. Memperbaiki sistem dokumentasi tindak lanjut dengan mengembangkan database bukti pelaksanaan RTL yang komprehensif berupa dokumentasi foto kegiatan, laporan progress, dan bukti output kegiatan yang terstruktur sehingga dapat memastikan pelaksanaan tindak lanjut dapat diverifikasi. [2.2.12.1]
5. Memanfaatkan hasil pengukuran kinerja 2026 yang telah dilakukan sebagai dasar pertimbangan untuk pemberian reward dan punishment dengan menyusun mekanisme yang komprehensif, menetapkan kriteria kinerja yang jelas, melibatkan seluruh pegawai dalam penilaian, dan memastikan legalisasi pimpinan sehingga dapat meningkatkan motivasi dan komitmen pegawai dalam mencapai target kinerja [2.3.14.1]
6. Memanfaatkan hasil pengukuran kinerja 2026 yang telah dilakukan sebagai dasar pertimbangan untuk pemberian reward dan punishment yang selaras dengan kertas kerja penilaian [2.3.14.2]
7. Memperbaiki kualitas dokumentasi evaluasi kinerja dengan merevisi notula TW II, III, dan IV 2025 agar memuat analisis capaian yang akurat, kendala yang komprehensif, solusi yang terstruktur, rencana tindak lanjut yang spesifik, penetapan PIC yang jelas, dan batas waktu yang tegas sesuai pedoman. [3.1.17.1]
8. Meningkatkan kualitas pelaporan kinerja dengan menyempurnakan Lakin 2025 agar memenuhi seluruh kriteria dan persyaratan yang ditetapkan Biro Perencanaan melalui gap analysis, revisi sistematis, dan implementasi



* Dokumen ini telah diterbitkan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Biro Statistik Daerah (BSD), BSSN

* Untuk lebih lanjut, silakan kunjungi situs resmi BSSN atau hubungi kami melalui kontak yang tertera di atas.

template standar sehingga laporan kinerja dapat menjadi instrumen akuntabilitas yang efektif dan informatif [3.2.21.1]

9. Memperbaiki sistem dokumentasi tindak lanjut dengan mengembangkan database bukti pelaksanaan RTL TW IV 2025 yang komprehensif berupa dokumentasi foto, laporan progress, dan bukti output kegiatan yang terstruktur sehingga dapat memastikan pelaksanaan tindak lanjut dapat diverifikasi. [3.3.19.1]
10. Memanfaatkan hasil pengukuran kinerja 2025 sebagai dasar pertimbangan untuk pemberian reward dan punishment dengan menyusun mekanisme yang komprehensif, menetapkan kriteria kinerja yang jelas, melibatkan seluruh pegawai dalam penilaian, dan memastikan legalisasi pimpinan sehingga dapat meningkatkan motivasi dan komitmen pegawai dalam mencapai target kinerja [3.3.20.1]

Selanjutnya bukti tindak lanjut atas rekomendasi agar didokumentasikan dan akan dipantau pada evaluasi akuntabilitas kinerja periode Tahun 2026.

Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja;



1. Eko Yuwono, SAB, M.M. (Pengendali Teknis)
197106041994031003
2. Herry Purdiyanto, SST, M.Ak (Ketua Tim)
197607131999031002
3. Ezra Priska Donny Anggoro, SST, M.M. (Anggota Tim)
199306222016021001



* Dokumen ini telah diterbitkan secara resmi oleh BPS dan menggunakan identitas elektronik yang diberikan oleh Badan Serifikasi Elektronik (BSE), BSSN

† Untuk kode QR di samping untuk menampilkan ke asli

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



Badan Pusat Statistik

Jl. dr. Sutomo No. 6-8 Jakarta 10710

Telp: (021) 3841195, 3842508, 3810291-4, Fax: (021) 3857046

Homepage: <http://www.bps.go.id> E-mail: bpsHQ@bps.go.id